

**POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA PADA MASA
PEMERINTAHAN SOEKARNO (1949-1966)**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Makassar Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan*

**SULFACHRIADI
096514049**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
2015**

ABSTRAK

SULFACHRIADI. 2015, *Politik Luar Negeri Indonesia Pada Masa Pemerintahan Soekarno (1949-1966)*. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Dibimbing oleh Patahuddin, dan La Malihu.

Penelitian ini bertujuan untuk mengemukakan latar belakang lahirnya politik luar negeri yang digunakan Indonesia sebagai sebuah negara baru dalam dunia internasional, dan dampaknya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah dengan tahapan: Heuristik, Kritik, Interpretasi dan Historiografi. Penelitian ini menggunakan proses pendekatan deskriptif naratif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik luar negeri yang digunakan Indonesia merupakan sebuah jawaban untuk mencapai tujuan nasional yang berdasar pada landasan Idil yakni Pancasila dan landasan Konstitusional yakni UUD 1945, serta kondisi dalam dan luar negeri pada waktu itu. Di mana dalam pelaksanaannya terbagi dalam tiga era yakni, era sebelum KMB (1945-1949), era RIS dan Demokrasi Liberal (1949-1959) dan era Demokrasi Terpimpin (1959-1967). Politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif telah memberikan dampak baik bagi Indonesia dan dunia pada umumnya yakni diantaranya, keadaan politik dalam negeri, hubungan dengan Blok Barat dan Blok Timur serta menjadi pelopor lahirnya Gerakan Non Blok.

Berdasarkan hasil penelitian ini bisa disimpulkan bahwa, upaya-upaya politik luar negeri bebas aktif yang dijalankan Indonesia demi mencapai tujuan nasional dan sebagai jawaban dari kondisi dunia internasional pada masa tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebelum membahas seperti apa pelaksanaan politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, terlebih dahulu terdapat perihal yang perlu diketahui. Dimana perihal tersebut juga merupakan sebuah faktor yang mempengaruhi bagaimana pelaksanaan politik luar negeri Indonesia kedepannya. Adapun perihal tersebut dalam hal ini yakni, pada saat diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno dan Hatta tanggal 17 Agustus 1945, yang dianggap sebagai awal dari revolusi Indonesia.¹ Dunia internasional berada pada perseteruan dua kekuatan besar yakni Blok Barat dan Blok Timur.

Dimana dalam masa ketegangan antara Blok Barat dan Blok Timur tersebut merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia khususnya terhadap pemerintahan Soekarno. Selain dari adanya ketegangan antara kedua blok tersebut, juga terdapat hal yang menarik untuk dibahas yakni, adanya sikap dari pemerintah Belanda yang belum mengakui kedaulatan bangsa Indonesia sehingga berdampak terhadap kondisi dalam negeri Indonesia. Dimana dalam masa revolusi itu kondisi Indonesia belum sepenuhnya tenang. Ini dikarenakan Belanda pada waktu itu kembali melakukan pendudukan atas wilayah Indonesia. Pada saat Indonesia dengan Belanda sedang berseteru yang ditandai dengan

¹ Dikatakan demikian sebab karena pada waktu itu Indonesia secara *De Facto* telah merdeka. Lihat, Peter Kasenda, *Bung Karno Panglima Revolusi* (Yogyakarta: Galang Pustaka, 2014). Hlm 170.

pendudukan terhadap Yogyakarta Ibukota RI pada 19 Desember 1948,² negara-negara besar di dunia yang memiliki ideologi yang berbeda juga ikut terlibat dalam persetujuan tersebut guna mencoba mengarahkan jalan dari revolusi Indonesia.³ Hadirnya negara-negara besar dunia seperti Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam mengarahkan jalannya revolusi, merupakan dampak dari adanya ketegangan dan kompetisi yang terjadi pada kedua negara tersebut yakni, Amerika Serikat dan Uni Soviet yang terjadi pasca Perang Dunia II,⁴ atau biasa dikenal dengan Perang Dingin.

Selanjutnya, lahirnya persetujuan kedua negara pemenang Perang Dunia II tersebut tidak terlepas dari perbedaan ideologi yang dianut, yakni Uni Soviet dengan Komunis dan Amerika Serikat dengan Liberal-Kapital. Selanjutnya lahirnya kesenjangan dari kedua negara ini karena adanya ketidak sepemahaman ide mengenai pembentukan dan pemeliharaan keamanan pasca Perang Dunia II, dimana Sekutu Barat menghendaki adanya pemerintahan yang bersifat *demokratis* sedangkan Uni Soviet lebih mementingkan peningkatan keamanan dengan negara-negara yang berbatasan dengannya, dengan jalan mendominasi urusan dalam negeri negara-negara tersebut⁵. Kejadian inilah dianggap sebagai awal mula dari lahirnya Perang Dingin yang kemudian berdampak juga

² Anhar Gonggong, dkk. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI*, (Jakarta, CV. Tumaritis, 1993), Hlm 100.

³ Peter Kasenda, *Op.Cit.*, Hlm 170.

⁴ http://id.wikipedia.org/wiki/Perang_Dingin#Permulaan_Perang_Dingin_.281947.E2.80.931953.29 (diakses pada tanggal 20, Oktober 2014 pukul 10.31 Wita).

⁵ *Ibid.*

terhadap perkembangan politik di Indonesia, khususnya politik luar negeri pada masa pemerintahan Soekarno.

Hadirnya Soekarno Hatta sebagai dwi tunggal dalam perjuangan bangsa Indonesia memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan Indonesia dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang berkaitan khusus dengan politik luar negeri Indonesia sehingga revolusi dapat mengarah pada arah yang lebih baik. Dalam sejarah Indonesia terkhusus pada politik luar negeri masa revolusi nasional terdapat dua hal metode yang digunakan Indonesia dalam menyelesaikan konflik, dimana kedua metode ini memiliki perbedaan yang mendasar akan tetapi saling mendukung satu sama lain dalam hal penyelesaian konflik yakni metode kekuatan bersenjata dan diplomasi⁶. Sehubungan dengan politik luar negeri yang dijalankan Indonesia pada masa revolusi nasional, dalam dunia Internasional pada era pasca Perang Dunia II hadirnya dua blok besar yang memiliki ideologi yang berbeda, yakni Komunis dan Liberal merupakan sebuah tantangan sendiri bagi Indonesia dalam mengambil setiap keputusan mengenai politik luar negerinya.

Berkaitan dengan hadirnya dua blok besar yang memiliki ideologi yang berbeda yakni Blok Timur dengan Blok Barat, pada tanggal 2 September 1948.⁷ Moh. Hatta berpidato di hadapan Komite Nasional Indonesia Pusat, ia mengatakan:

⁶ Peter Kasenda, *Op.Cit.*, Hlm 177.

⁷ *Ibid.*

“Pemerintah berpendapat bahwa pendirian yang harus kita ambil ialah supaya kita jangan menjadi objek dalam pertarungan politik internasional, melainkan kita harus tetap menjadi subjek yang berhak menentukan sikap kita sendiri, berhak memperjuangkan tujuan kita sendiri, yaitu Indonesia yang Merdeka seluruhnya”⁸.

Berkaitan dengan pidato yang dikemukakan oleh Moh. Hatta, ia berkeinginan agar Negara Indonesia yang merupakan sebuah negara yang baru pada waktu itu mampu menjalankan sebuah politik luar negeri yang bebas dan aktif.⁹ Tidak hanya dalam negeri saja, Syahrir pernah berpidato mengenai politik yang bebas dan aktif, dalam sebuah pertemuan internasional yang bernama *Asian Relation Confrence* yang diadakan di New Delhi, tepatnya pada 25 Nopember 1947.¹⁰ Ia mengatakan:

“Dunia tampaknya memaksa kita membuat pilihan antara kekuasaan yang sekarang saling bermusuhan: antara Blok Anglo-Saxon dan Blok Sovyet Rusia. Benarlah sikap kita menolak untuk dipaksa. Kita mencari wujud internasional yang sesuai dengan kehidupan intern kita dan kita tidak ingin terperangkap dalam sistem-sistem yang tidak cocok dengan kita dan tentu saja tidak kedalam sistem-sistem yang bermusuhan dengan tujuan kita.”¹¹

Berdasarkan pidato kedua tokoh bangsa yang memiliki pengaruh dalam menentukan politik luar negeri Indonesia sudah jelas bahwa Negara Indonesia telah menganut politik Non-Blok atau *Non-Alignment* sebelum nama ini muncul dalam peristilahan politik internasional. Sehubungan dengan politik luar negeri yang dijalankan

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ A. B. Loebis, *Kilas Balik Revolusi: Kenangan, Pelaku dan Saksi* (Jakarta, 1992). Hlm 253.

¹¹ *Ibid.*

Indonesia dalam masa revolusinya akhirnya pada tanggal 27 Desember 1949,¹² Indonesia mendapatkan pengakuan kedaulatannya oleh Belanda. Akan tetapi jauh sebelum pengakuan kedaulatan yang didapatkan Indonesia dari Belanda, yakni pada tanggal 18 Nopember 1946,¹³ Dewan Menteri Luar Negeri Liga Arab mengeluarkan putusan agar anggota-anggota yang tergabung dalam Liga Arab dapat mengakui kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia secara *De facto* dan *De Jure*, hingga akhirnya pertengahan tahun 1947.¹⁴ Semua negara yang tergabung dalam Liga Arab telah mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia secara *De Facto* dan *De Jure*. Sehubungan dengan itu untuk pertama kali pada tanggal 10 Juni 1947,¹⁵ Indonesia menandatangani perjanjian persahabatan, hubungan diplomatik, konsuler dan perniagaan dengan Kerajaan Mesir, kemudian Suriah menyusul pada tanggal 2 juli 1947.¹⁶

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis mencoba menjelaskan seperti apa politik luar negeri yang dilakukan Indonesia pada masa pemerintahan Soekarno setelah penyerahan kedaulatan yang dilakukan oleh Belanda pada tahun 1949 sampai dengan berakhirnya jabatan kepemimpinan Soekarno secara penuh pada tahun 1967. Selanjutnya, mengapa penulis ingin meneliti politik luar negeri Indonesia dari tahun 1949, karena tahun tersebut merupakan tahun yang sangat berarti dalam

¹² M. C . Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200- 2004* (Jakarta: PT. Ikrar Mandiriabadi, 2005). Hlm 466.

¹³ M. Zein Hasan, *Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri* (Jakarta: Bulan Bintang, 1980). Hlm 290.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.* Hlm 290-291.

¹⁶ *Ibid.*

perjalanan revolusi bangsa Indonesia di bawah pemerintahan Soekarno, karena pada tahun itu bangsa Indonesia telah mendapatkan kedaulatannya dari tangan Belanda.

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis melakukan penelitian dan membahas hal-hal yang berkaitan dengan keadaan dunia Internasional yang setidaknya memberikan pengaruh terhadap Indonesia berkaitan dengan politik luar negeri yang akan dijalankan setelah mendapatkan kedaulatan dari tangan Belanda, hingga berakhirnya secara penuh masa kepemimpinan Soekarno terhadap bangsa Indonesia, dalam hal ini penyusun menganggap penelitian mengenai politik luar negeri Indonesia masa pemerintahan Soekarno perlu dikaji karena melihat Indonesia pada waktu itu merupakan sebuah negara baru merdeka yang berada pada saat sebagian negara-negara di dunia terbagi dalam dua Blok yang saling bersitegang, yang pada masa itu pula Indonesia berusaha mendapatkan dukungan dari negara-negara lain atas kemerdekaannya, serta membangun sebuah hubungan politik tanpa ikut serta dalam ketegangan yang terjadi terhadap kedua Blok tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya kemudian muncul permasalahan yang kemudian menjadi pokok pembahasan yang menjadi sebuah acuan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang lahirnya politik luar negeri bebas aktif?

2. Bagaimana pelaksanaan politik luar negeri Indonesia pada era soekarno?
3. Bagaimana dampak politik luar negeri bebas aktif terhadap Indonesia dan dunia pada umumnya?

C. Batasan Masalah

Sesuai dengan judul yang ada di atas, fokus dari penelitian ini adalah mengenai sejarahnya politik, selanjutnya dalam hal ini penulis mencoba menelusuri hal-hal apa yang dilakukan Indonesia terkait dalam bidang politik khususnya dalam politik luar negeri. Berkaitan dengan hal tersebut penulis menelusuri tentang politik luar negeri yang dilakukan Indonesia pada masa pemerintahan Soekarno pasca mendapatkan kedaulatannya sebagai negara merdeka serta menelusuri apa-apa saja yang mempengaruhi kebijakan politiknya khususnya politik luar negerinya, yang dimana pada waktu pasca Perang Dunia II terdapat dua kekuatan besar yakni Blok Barat dan Blok Timur, hingga Soekarno turun dari jabatan kepresidenannya

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka penelitian ini bertujuan antara lain:

1. Untuk mengetahui latar belakang lahirnya politik luar negeri bebas aktif.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan politik luar negeri Indonesia pada era soekarno.

3. Untuk mengetahui bagaimana bagaimana dampak politik luar negeri bebas aktif terhadap Indonesia dan dunia pada umumnya.

E. Manfaat Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah, adapun manfaat yang diperoleh penelitian ini yakni:

1. Untuk memberikan pemahaman bagaimana latar belakang lahirnya politik luar negeri bebas aktif.
2. Untuk memberikan pemahaman bagaimana pelaksanaan politik luar negeri Indonesia pada era soekarno.
3. Sebagai bahan bacaan tentang bagaimana dampak politik luar negeri bebas aktif terhadap Indonesia dan dunia pada umumnya.

F. Tinjauan Penelitian Sebelumnya

Berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan maka ada hasil-hasil penelitian-penelitian terdahulu atau sebelumnya yang dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi penyusun dalam melakukan penelitian ini antara lain sebagai berikut.

Selanjutnya dalam sebuah skripsi yang ditulis oleh Hasnia pada tahun 1995, dengan judul “*Pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin*”. Dalam skripsi tersebut dibahas mengenai politik luar negeri Indonesia era demokrasi terpimpin, yang menhususkan pada pembebasan Irian Barat hingga lahirnya konfrontasi

terhadap Malaysia serta meletusnya G30S/ PKI.¹⁷ Kemudian skripsi yang ditulis Muliadi.L pada tahun 2003, dengan judul “*Peranan Republik Rakyat Cina Pada Masa Demokrasi Terpimpin Dalam Politik Indonesia (1959-1965)*”. Dalam skripsi tersebut membahas bagaimana hubungan diplomatik antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Republik Rakyat Cina pada pemerintahan Soekarno era demokrasi terpimpin.¹⁸

Masih berkaitan dengan yang sebelumnya, yakni sebuah skripsi yang ditulis oleh Saprida pada tahun 2005, dengan judul “*Politik Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Indonesia (1945-1966)*”. Dalam skripsi tersebut membahas bagaimana hubungan antara pemerintah Amerika Serikat dengan pemerintah Indonesia terkait keterlibatan pemerintah Amerika Serikat dalam membantu pemerintah Indonesia untuk pembebasan Irian Barat.¹⁹ Selain dari pada ketiga skripsi tersebut yang penulis jadikan acuan, juga terdapat beberapa buku yang penulis anggap mempunyai keterkaitan dalam penulisan ini.

Selanjutnya adapun buku-buku yang penulis anggap memiliki keterkaitan dengan penulisan ini yakni, M. Sabir dengan buku yang berjudul “*Politik Bebas Aktif: Tantangan dan Kesempatan*”. Dalam buku ini membahas bagaimana cirri-ciri, pedoman dan tujuan politik bebas

¹⁷ Hasnia, Pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin. *Skripsi*. Ujung Pandang: FPIPS IKIP, 1995. Hlm 62-101.

¹⁸ Muliadi. L, Peranan Republik Rakyat Cina Pada Masa Demokrasi Terpimpin Dalam Politik Indonesia (1959-1965). *Skripsi*. Makassar: FEIS UNM, 2003. Hlm 50-54.

¹⁹ Saprida, Politik Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Indonesia (1945-1966). *Skripsi*. Makassar: FEIS UNM, 2005. Hlm 56-60.

aktif.²⁰ Kemudian Roeslan Abdulgani dengan buku yang berjudul “*The Bandung Connection*”. Dalam buku ini membahas bagaimana latar belakang lahirnya konferensi Asia-Afrika di Bandung.²¹

G. Metode Penelitian

Selanjutnya dalam penyusunan sebuah karya ilmiah diperlukan sebuah cara guna meringankan penyusun dalam menyusun sebuah karya ilmiah sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam melakukan penulisan karya ilmiah. Penelitian ini secara metodologis bersifat kualitatif dengan metode yang digunakan adalah deskriptif-analitis. Selanjutnya penulisan karya ilmiah khususnya dalam penulisan sejarah merupakan suatu rekonstruksi yang imajinatif, dalam hal ini penyusun mencoba mengkaji kembali sebuah peristiwa sejarah yang pernah terjadi dengan menggunakan sumber-sumber yang berkaitan dengan judul tersebut.

Berdasarkan metode sejarah yang berkaitan dengan pengumpulan data, sebelum melakukan penulisan sejarah seorang peneliti atau dalam hal ini penyusun harus memberikan kritikan terhadap sumber- sumber yang telah ditemukan, ini dikarenakan peristiwa sejarah adalah sebuah peristiwa yang hanya terjadi satu kali dalam kehidupan manusia, oleh karena itu untuk merekonstruksikannya diperlukan data yang sesuai dengan topik kesejarahan yang diangkat. Berkaitan dengan hal penulisan karya ilmiah khususnya dalam kesejarahan, historiografi memegang peranan penting

²⁰ M. Sabir, *Politik Bebas Aktif, Tantangan dan Kesempatan* (Jakarta: Haji Masagung, 1987). Hlm 19-51.

²¹ Roeslam Abdulgani, *THE BANDUNG CONNECTION, Konperensi Asia-Afrika di Bandung 1955* (Cet. II; Penerbit Gunung Agung, 2011) . Hlm 18-25.

yang tidak dapat disepelekan karena pada bagian ini seorang penulis dituntut menggunakan nalarnya untuk menyatukan setiap data yang didapat setelah melewati tahapan kritik.

Hal mana dalam penulisan sejarah seorang penulis harus sebisa mungkin objektif dalam melakukan penulisan sejarah sesuai dengan data yang diperoleh. Dengan kata lain baik tidaknya penulisan karya ilmiah khususnya penulisan sejarah ditentukan dengan metode yang digunakan oleh penulis itu sendiri.

Berdasarkan metode penulisan karya ilmiah yang digunakan penulis dengan pertimbangan untuk menjawab beberapa permasalahan mengenai perjuangan diplomasi sampai penyerahan kedaulatan Indonesia, hingga dampak politik luar negeri Indonesia terhadap rakyat Indonesia, dalam sebuah karya ilmiah yang menitik beratkan pada wilayah kesejarahan khususnya dalam hal politik atau yang dikenal sebagai sejarah politik, maka penulisan menggunakan beberapa tahapan- tahapan untuk memudahkan penulisan karya ilmiah sejarah yakni adalah sebagai berikut:

1. Heuristik

Heuristik atau dalam bahasa Jerman dikenal dengan penyebutan *Quellenkunde*,²² yang merupakan langkah awal dalam penulisan, yaitu sebuah kegiatan yang bertujuan untuk menemukan sumber-sumber yang digunakan penulis untuk mendapatkan data-data, atau materi sejarah yang berkaitan dengan topik yang

²² Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2007) hlm. 86.

diangkat. Dalam penulisan karya ilmiah, penulis mencoba mencari sumber-sumber yang berupa arsip-arsip, surat kabar, buku-buku, dan artikel-artikel yang memiliki keterkaitan dengan topic yang diteliti.

Selanjutnya, pada tahapan ini adapun langkah awal yang dilakukan yakni melakukan pencarian dan pengumpulan data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini yakni terkait dengan politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan soekarno. Sehubungan dengan hal tersebut, pencarian dan pengumpulan data yang dilakukan dengan mendatangi beberapa perpustakaan seperti, perpustakaan Pendidikan Sejarah UNM, Perpustakaan dan Arsip Daerah dan Badan Arsip Wilayah.

Terlepas dari beberapa perpustakaan yang didatangi untuk melakukan pencarian dan pengumpulan data, penulis juga memanfaatkan beberapa koleksi pribadi dan meminjam dari teman yang tentunya memiliki keterkaitan dengan politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan soekarno. Selain dari pada itu, penulis juga penulis juga memanfaatkan internet sebagai salah satu cara pencarian dan pengumpulan data seperti, mengunjungi website kementerian luar negeri yang rupanya juga menyimpan beberapa arsip terkait hubungan diplomatik Indonesia dengan negara lain pada masa pemerintahan soekarno.

2. Kritik

Selanjutnya setelah sumber-sumber atau data itu telah terkumpul, maka kegiatan yang dilakukan selanjutnya adalah menganalisa sumber-sumber yang terkumpul tersebut dengan memberikan kritik. Dalam hal ini harus diadakan sebuah penyelidikan apakah benar sumber itu sejati atau tidak, baik bentuk maupun seluruh isinya. Tahapan kerja kritik dalam metode penelitian merupakan suatu usaha menganalisa setiap data yang didapatkan, dengan menilai secara kritis dengan menyelidiki setiap sumber data yang telah terkumpulkan. Kritik terhadap sumber sejarah adalah proses menyaring sumber-sumber sejarah yang telah terkumpul, ini ditujukan untuk memisahkan antara sumber yang terkait dan yang tidak terkait sesuai dengan kebutuhan dari penulis. Adapun hasil dari kritik sejarah yang dilakukan ialah penemuan fakta-fakta sejarah yang sungguh-sungguh sesuai dengan peristiwa yang pernah terjadi pada masanya.

Tahap ini sangatlah penting dalam metode penulisan karya ilmiah, guna menganalisis dan membuktikan kevalidan setiap data yang telah diperoleh. Selanjutnya dalam penulisan karya ilmiah khususnya dalam metode penulisan sejarah tahap kritik dikenal dua tahap, yaitu kritik eksternal dan kritik internal. Untuk mengetahui

penjelasan dari kedua kritik tersebut, baik ekstern maupun intern maka akan diuraikan sebagai berikut:

a. Kritik Eksternal

Kritik eksternal atau kritik luar pada metode penulisan karya ilmiah dilakukan untuk meneliti keaslian sumber-sumber dalam hal ini berupa tulisan-tulisan dalam bentuk buku ataupun artikel, yakni dengan mengumpul sumber-sumber yang memiliki keterkaitan dengan judul, kemudian melakukan perbandingan antara sumber yang satu dengan yang lainnya dengan mengetahui penulis, penerbit, dan waktu diterbitkan.

Berkaitan dengan hal tersebut menurut Sjamsuddin:

“Kritik ekstern ialah suatu penelitian atas asal-usul dari sumber, suatu pemeriksaan atas catatan atau peninggalan itu sendiri untuk mendapatkan semua informasi yang mungkin dan untuk mengetahui apakah pada suatu waktu sejak asal mulanya sumber itu telah dirubah oleh orang-orang tertentu atau tidak. Kritik eksternal harus menegakan fakta dan kesaksian.”²³

Selanjutnya dalam proses kritik eksternal yang dilakukan, penulis menganalisis dan memverifikasi setiap sumber-sumber yang telah didapatkan dengan menjabarkannya berdasarkan letak dan asal usul dari setiap sumber-sumber tersebut sehingga kevalidan sumber bisa terjamin. Disamping itu penilaian juga perlu dilakukan dalam penulisan karya ilmiah dengan memperhatikan penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dan yang relevan sehingga membantu

²³*Ibid*, Hlm. 133.

dalam mengkritisi sumber dan membantu dalam penelusuran tahap penelitian selanjutnya.

b. Kritik Internal

Kritik internal adalah tahapan kedua setelah kritik eksternal hal ini dilakukan untuk meneliti sumber yang memiliki kaitan-kaitan dengan isi dari sumber. Dalam hal ini kritik intern menyajikan sebuah tehnik analisis yang cukup mendalam dimana tugas memverifikasi sumber dengan menggunakan penalaran dan ilmu pengetahuan sehingga nantinya sumber-sumber yang didapatkan akan memiliki keabsahan sebagaimana mestinya.

Kredibilitas sumber-sumber pada tahapan ini akan dipertanyakan secara akurat, sehingga hasil dari data yang telah melalui proses verifikasi akan diperoleh sebuah sumber fakta yang akan menjadi sumber vital dalam pengkajian dari penelitian ini, selanjutnya dalam metode penelitian untuk mengetahui keabsahan dari suatu sumber pada tahapan kritik, cara yang dapat dilakukan adalah dengan membandingkan antara sumber yang satu dengan sumber lainnya sehingga nantinya akan mengarah kepada sebuah fakta dari sumber-sumber yang telah didapat.

3. Interpretasi

Selanjutnya pada tahapan dimana setelah melalui sebuah proses kritik sumber, maka akan diperoleh fakta akan tetap fakta dimaksud dalam hal ini masih dalam keadaan terpisah-pisah dan dalam keadaan masih berdiri sendiri. Sehingga untuk itu seorang penulis perlu melakukan sebuah interpretasi, pada tahapan penafsiran inilah penulis harus memiliki kecermatan dengan nalar yang kritis dan sikap objektif. Pada dasarnya hal tersebut ditujukan untuk menghindari berbagai interpretasi yang bersifat subjektif yang akhirnya akan mencederai karya sejarah.

Dalam hal interpretasi sangat diperlukan kehati-hatian dari seorang penulis itu sendiri untuk menghindari berbagai interpretasi yang bersifat subyektif terhadap fakta yang ada. Berkaitan dengan hal yang dimaksudkan untuk memberi arti dari setiap aspek penelitian, dari fakta yang satu dengan fakta yang lainnya agar tercipta sebuah kesimpulan atau gambaran dari sebuah peristiwa sejarah yang bersifat ilmiah. Sehubungan dengan hal tersebut menurut M. Saleh Madjid:

“Dalam melakukan interpretasi, sejarah tidak dapat mengurainya dengan sendiri. Tetapi pada tahapan inilah diperlukan sejumlah konsep dan pendekatan teoritis dan ilmu-ilmu bantu lain, terutama ilmu-ilmu sosial”.²⁴

Selanjutnya sehubungan dengan judul yang akan diteliti, maka dalam hal ini penyusun menggunakan ilmu bantu lain guna mempermudah penelitian ini, adapun ilmu bantu yang digunakan

²⁴M. Saleh Madjid, Abd. Rahman Hamid, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2011). Hlm. 56

adalah ilmu politik dan hubungan internasional, maka dalam hal ini penyusun melakukan *Library Research* untuk menemukan hal-hal yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.

4. Historiografi

Selanjutnya dalam tahapan terakhir dalam penulisan sejarah adalah historiografi, dalam tahap akhir inilah penulis menuangkan kecermatan dan kompetensi daya nalar dalam mensintesis bahan-bahan guna menyajikan karya sejarah. Pada tahap ini hanya kerja keras dan keberanian seorang sejarawanlah yang mampu menghasilkan sebuah karya sejarah yang baik. Sehubungan dengan hal tersebut menurut A. Daliman bahwa :

“Penulisan sejarah tidak semudah dalam penulisan ilmiah lainnya, tidak cukup dengan menghadirkan informasi dan argumentasi. Penulisan sejarah, walaupun terikat pula oleh aturan-aturan logika dan bukti-bukti empiric, tidak boleh dilupakan bahwa ia adalah juga karya sastra yang menuntut kejelasan struktur dan gaya bahasa, aksentuasi serta nada retorika tertentu.”²⁵

Selanjutnya hasil dari penelitian ini dikemukakan secara deskriptif, yakni sebuah penggambaran peristiwa-peristiwa sejarah politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan Soekarno, kemudian dijelaskan secara kronologis rentetan peristiwa tentang perjuangan diplomasi Indonesia sampai mendapatkan kedaulatannya hingga turunnya Soekarno dari jabatan presiden secara penuh.

²⁵ A. Daliman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012). Hlm 99

BAB II

LATAR BELAKANG LAHIRNYA POLITIK LUAR NEGERI BEBAS AKTIF

A. Perang Dingin: Blok Barat vs Blok Timur

Perang dingin merupakan sebuah istilah yang menggambarkan kondisi dunia internasional pasca perang dunia dua.²⁶ Dimana pada waktu terjadi ketegangan antara dua kekuatan besar yang pada dasarnya kedua kekuatan tersebut merupakan pemenang Perang Dunia II. Dalam hal ini, dua kekuatan besar yang dimaksudkan adalah adanya dua Blok Besar yang beseteru pada waktu itu yakni Blok Barat dan Blok Timur. Blok Barat dan Blok Timur sendiri dalam hal ini, juga merupakan sebuah istilah untuk pengelompokan negara dalam sebuah Blok yang memiliki ideologi yang sama.

Dimana dalam hal ini, yang termasuk dalam Blok Timur adalah negara-negara yang menganut ideologi Sosial-Komunis yang dipimpin oleh Uni Soviet. Sedangkan negara-negara yang termasuk ke dalam Blok Barat adalah negara-negara yang menganut ideologi Liberal-Kapital yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Timbulnya perseteruan antara kedua blok ini atau yang lebih dikenal kedepannya sebagai perang dingin, itu terjadi pasca perang dunia II. Dimana kedua negara besar tersebut terlibat

²⁶ Perang Dunia dua merupakan sebuah perang yang bersifat global yang terjadi dari tahun 1939-1945. Dalam perang tersebut terdapat dua kekuatan yang saling berseteru yakni Blok Sekutu dan Blok Poros, di mana dalam masing-masing blok tersebut terdapat beberapa negara besar seperti diantaranya dalam Blok Sekutu yakni: Amerika Serikat, Uni Soviet dan Imperium Britania. Sedangkan dalam Blok Poros juga terdapat beberapa negara besar yakni: Jerman, Jepang dan Italia. Lihat https://id.wikipedia.org/wiki/Perang_Dunia_II. (Diakses pada tanggal 10 April 2016 pukul 11.15 Wita).

pertentangan terkait dengan usaha untuk membentuk dan memelihara keamanan pasca perang.

Ketidak sepahaman itu muncul dikarenakan Blok Barat pada waktu itu menghendaki adanya sebuah system pemerintahan yang bersifat demokrasi yang bisa diterapkan terhadap negara-negara di eropa. Sehingga dalam penyelesaiann konfliknya tidak lagi dengan menggunakan konfrontasi melainkan dengan jalan damai melalui lembaga-lembaga internasional. Sedangkan dalam pandangan Blok Timur hal itu tidak bisa dilakukan. Mereka menganggap bahwa untuk membentuk dan menciptakan keamanan perlulah campur tangan terhadap setiap urusan dalam negeri setiap negara yang berbatasan dengannya. Hal ini dilakukan karena pemerintah Uni Soviet ingin lebih mewaspadai segala kemungkinan yang mengarah kepada terulangnya peristiwa invasi yang dilakukan terhadap Uni Soviet selama perang dunia II.²⁷

Sehingga pada waktu itu untuk tetap menjaga keamanan maka diperlukan adanya campur tangan terhadap segala urusan dalam negeri negara-negara yang berbatasan dengannya.²⁸ Sehubungan dengan adanya perbedaan pendapat antara Uni Soviet dan Amerika Serikat telah menciptakan jurang pemisah diantara keduanya. Sehingga dalam perkembangan hubungan antara kedua negara tersebut telah mengarah

²⁷ Invasi terhadap Uni Soviet pernah dilakukan oleh tentara NAZI Jerman, dimana invasi tersebut diberi nama Operasi Barbarossa yang dilakukan pada tanggal 22 Juni 1941. Dalam hal ini invasi tersebut ditujukan untuk menaklukkan Eropa bagian barat dengan cepat. Lihat https://id.wikipedia.org/wiki/Operasi_Barbarossa. (Diakses pada tanggal 10 April 2016 pukul 09.20 Wita).

²⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Perang_Dingin (Diakses pada tanggal 5 Mei 2015 pukul 08.30 Wita).

kepada arah yang tidak harmonis lagi yang dibuktikan dengan pembentukan pakta pertahanan dimasing-masing pihak.

Dimana kedua pakta pertahanan tersebut merupakan sebuah pakta pertahanan yang bersifat kolektif yang dibangun oleh keduanya. Dalam hal ini pakta pertahanan ini berfungsi untuk saling melindungi antar sesama anggotanya ketika mendapatkan serangan dari luar. Jika membahas mengenai pakta pertahanan, maka untuk yang pertama kali membentuknya adalah Blok Barat yakni NATO pada tanggal 4 April 1949.²⁹ Dimana negara-negara yang tergabung di dalamnya adalah Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Kanada, Belanda, Luksemburg, Denmark, Islandia, Italia, Norwegia, Portugis dan Belgia.³⁰

Sedangkan Uni Soviet barulah menyusul dalam pembuatan pakta pertahanannya yakni pada tanggal 14 Mei 1955. Yang dimana pada waktu itu Uni Soviet bersama dengan negara-negara anggota Blok Timur melakukan penandatanganan persetujuan pembentukan pakta pertahanan di Warsawa.³¹ Dalam hal ini, negara-negara yang tergabung dalam Blok Timur pada waktu itu ialah Albania, Bulgaria, Ceko, Hongaria, Jerman Timur, Polandia, Rumania dan Uni Soviet.³²

Akan tetapi sebelum adanya pakta pertahanan tersebut, kedua negara besar tersebut telah terlibat dalam persaingan dalam hal

²⁹ Danto Pamungkas, *Kamus Sejarah Lengkap* (Yogyakarta: Mata Padi Pressindo, 2014). Hlm 345.

³⁰ <http://www.anneahira.com/sejarah-nato.htm> (Diakses pada tanggal 5 Mei 2015 pukul 09.10 Wita).

³¹ Danto Pamungkas, *Loc. Cit.*, Hlm 363-364.

³² *Ibid.*

memberikan bantuan kepada negara-negara yang menjadi korban dalam perang dunia II. Hal ini tampak dengan adanya bantuan yang diberikan oleh pemerintah Amerika Serikat kepada negara-negara Eropa untuk kembali membangun perekonomiannya yang diberinama Marshall Plan. Sedangkan dari pihak Uni Soviet juga yang tidak mau kalah dengan bantuan Molotov Plannya juga memberikan bantuan kepada negara-negara Eropa yang didudukinya.

Sama seperti halnya NATO dan Pakta Warsawa yang merupakan sebuah kebijakan dalam bidang militer.³³ Marshal Plan dan Molotov Plan juga merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh kedua negara tersebut terkait dengan pembangunan perekonomian negara-negara Eropa pasca peranga dunia II.³⁴ Terkait dengan pemberian bantuan kepada negara-negara Eropa pasca perang dunia II. Bisa dikatakan Blok Baratlah yang lebih dahulu memulainya dengan Marshal Plannya. Barulah kemudian Uni Soviet dengan Molotov Plannya.

Dimana dalam hal ini, kemunculan Molotov Plan sebagai sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh Uni Soviet terhadap negara-negara Eropa pada waktu itu.³⁵ Merupakan usaha yang dilakukannya agar negera-negara Eropa lainnya, khususnya yang masih dalam pendudukan Uni Soviet tidak

³³ *Ibid.* Lihat Juga Hlm 345.

³⁴ William L. Bradley dan Mochtar Lubis, *Dokumen-Dokumen Pilihan Tentang Politik Luar Negeri Amerika dan Asia* (Jakarta: Yayasan Obor, 1991). Hlm 80-83. Lihat juga https://id.wikipedia.org/wiki/Rencana_Marshall. Juga pada https://en.wikipedia.org/wiki/Molotov_Plan (Diakses pada tanggal 7 Mei 2015 pukul 10.46 Wita).

³⁵ https://en.wikipedia.org/wiki/Molotov_Plan (Diakses pada tanggal 7 Mei 2015 pukul 11.53 Wita)

tertarik dengan bantuan dari Blok Barat. Dalam hal ini usaha tersebut merupakan usaha dari pemerintah Uni Soviet agar Amerika Serikat tidak terlalu mendominasi Eropa dengan bantuan Marshal Plannya tersebut.

Pada perkembangannya, kedua negara yang sedang berseteru tersebut mencoba memperluas dominasinya ke berbagai negara. Seperti halnya yang dilakukan oleh Uni Soviet yang mencoba melebarkan pengaruhnya di kawasan Asia yang dimulai dari RRC, Korea Utara dan sampai pada Vietnam.³⁶ Tidak hanya Blok Timur yang menanamkan pengaruhnya di kawasan Asia, hal ini pun dilakukan oleh Blok Barat. Dimana pada waktu itu Blok Barat membentuk pakta pertahanan untuk kawasan Asia Tenggara yang dikenal dengan SEATO.

Pembentukan SEATO sendiri merupakan usaha yang dilakukan oleh Blok Barat untuk membendung pengaruh komunis untuk wilayah Asia Tenggara. Dalam hal ini adapun negara-negara yang tergabung dalam SEATO adalah Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Filipina, Singapura dan Thailand. Dengan mengikut sertakan beberapa negara yang di Asia Tenggara setidaknya merupakan sebuah usaha yang dilakukan oleh Blok Barat agar pengaruh komunis tidak mendominasi kawasan tersebut.

Sehubungan dengan terjadinya ketegangan antara Blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dengan Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Dimana ketegangan antara kedua Blok tersebut telah memasuki kawasan Asia, khususnya kawasan Asia Tenggara sedikit

³⁶ M. Sabir, *Politik Bebas Aktif, Tantangan dan Kesempatan* (Cet.I: Jakarta: Haji Masagung, 1987). Hlm 13.

banyaknya telah memberikan dampak terhadap negara-negara yang berada di kawasan tersebut. Dalam hal ini khususnya negara Indonesia yang pada waktu itu baru memproklamasikan kemerdekaannya.

Maka dari pada itu, terkait dengan kondisi dunia internasional yang pada waktu itu telah terbagi dalam dua Blok besar. Sehingga pemerintah Indonesia pun mengeluarkan sebuah kebijakan yang dapat digunakan untuk mewujudkan cita-cita nasional pada waktu itu. Adapun kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pada waktu itu ialah sebuah sikap politik luar negeri yang dikenal dengan Politik Bebas Aktif.

Politik bebas aktif merupakan sebuah istilah terhadap sikap politik yang diambil oleh pemerintah Indonesia guna menghadapi konflik politik internasional yang terjadi antara kelompok Amerika Serikat dengan kelompok Uni Soviet. Sikap politik tersebut diambil dikarenakan Indonesia merupakan sebuah negara yang baru memproklamasikan kemerdekaannya, yang pada waktu itu Indonesia mencoba mendapatkan dukungan dari negara-negara yang ada di dunia guna mendapatkan pengakuan *De Facto* sebagai sebuah negara yang merdeka. Selain dari pada itu, Indonesia juga sangat membutuhkan bantuan dari negara-negara yang ada di dunia terkait dengan konflik yang masih terjadi antara Indonesia dengan Belanda, yang pada waktu itu Belanda masih belum mau mengakui kemerdekaan yang telah diproklamasikan bangsa Indonesia dan masih melakukan agresi militernya.

Selanjutnya, terkait dengan politik bebas aktif yang dijalankan Indonesia, yang merupakan sebuah langkah yang digunakan bangsa Indonesia dalam menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan yang terjadi pada waktu itu, pada tanggal 25 Nopember 1947³⁷, Syahrir sebagai perwakilan bangsa Indonesia berpidato di depan *Asian Relations Conference* di New Delhi mengatakan bahwa:

“dunia tampaknya memaksa kita membuat pilihan antara kekuatan yang sekarang bermusuhan: Antara blok Anglo-Saxon dan blok Sovyet Rusia. Benarlah sikap kita yang menolak untuk dipaksa. Kita mencari wujud internasional yang sesuai dengan kehidupan intern kita dan kita tidak ingin terperangkap dalam sistem-sistem yang tidak cocok dengan kita dan tentu saja tidak kedalam sistem-sistem yang bermusuhan dengan tujuan kita”³⁸.

Tampilnya Syahrir sebagai perwakilan dari Indonesia dengan pidatonya di depan *Asian Relations Conference* di New Delhi, merupakan sebuah penggambaran bahwa Indonesia pada waktu itu telah menjalin hubungan bilateral dengan negara-negara lain, khususnya dengan India. Selanjutnya, Mohammad Hatta dalam pidatonya dalam sebuah sidang dihadapan Badan Pekerja KNP pada 2 september 1948³⁹, dalam hal penyelesaian masalah bangsa Indonesia. Dalam sidang tersebut, Mohammad Hatta selaku wakil presiden dan juga menjabat sebagai perdana menteri,⁴⁰ menyampaikan hal berikut:

³⁷ A. B. Loebis, *Kilas Balik Revolusi: Kenangan, Pelaku dan Saksi* (Jakarta: Universitas Indonesia 1992). Hlm 253.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Mohsammad Hatta, *Demokrasi Kita, Bebas Aktif, Ekonomi Masa Depan* (Cet. I; Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1992). Hlm 23.

⁴⁰ Mohammad Hatta diangkat menjadi wakil presiden Indonesia tepat sehari setelah kemerdekaan Indonesia yakni pada tanggal 18 Agustus 1945, sedangkan untuk pengangkatan ia sebagai seoarnag perdanan menteri yakni pada tanggal 29 Januari 1948. Lihat

“ mestikah kita bangsa indonesia, yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita, hanya harus memilih antara pro Rusia atau pro Amerika? Apakah tidak ada pendirian yang lain harus kita ambil dalam mengejar cita-cita kita?”⁴¹.

Selanjutnya, dalam sidang itu pula ia menyampaikan bahwa:

“perjuangan kita harus diperjuangkan di atas dasar semboyan kita yang lama: Percaya akan diri sendiri dan berjuang atas kesanggupan kita sendiri. Ini tidak berarti bahwa kita tidak akan mengambil keuntungan dari pada pergolakan politik internasional”⁴².

Selanjutnya, dihadapan sidang Badan Pekerja KNP Mohammad

Hatta berpandangan terkait dengan politik internasional, bahwa yang dibutuhkan dalam menghadapi politik internasional adalah mesti melihat realitas dengan menggunakan logika rasional dalam menghadapi persoalan itu. Dalam hal ini, alasan mengapa Mohammad Hatta mengatakan hal yang demikian, karena ia melihat keadaan yang sama pernah dialami oleh negara Rusia pada tahun 1939, dengan mengedepankan pertimbangan rasional Rusia terpaksa mengadakan perjanjian *Non-Agresi* dengan Jerman,⁴³ dalam hal ini Rusia pun diuntungkan dengan perjanjian tersebut karena terhitung dari tahun 1939-1941,⁴⁴ kedua negara tersebut tidak terlibat dalam kontak senjata, adapun keuntungan yang didapatkan

https://id.wikipedia.org/wiki/Mohammad_Hatta. (Diakses pada tanggal 10 April 2016 pukul 12.35 Wita).

⁴¹ Walaupun dalam pidato tersebut tidak ada yang menyebutkan politik bebas aktif, tapi dari pidato tersebut telah mengarah kepada sikap politik bebas aktif Indonesia. Lihat, Mohsammad Hatta, *Ibid.* Hlm 30.

⁴² *Ibid.*

⁴³ Dikatakan demikian, karena perjanjian *Non-Agresi* merupakan sebuah perjanjian yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bertikai untuk menghentikan penyerbuan terhadap wilayah satu sama lain sampai dengan batas waktu yang disepakati atau sampai pada ada yang melanggar mengenai dari isi yang di sepakati dalam perjanjian tersebut, ini seperti halnya yang pernah dilakukan oleh negara Rusia dengan Jerman. Lihat,

http://id.wikipedia.org/wiki/Pakta_Molotov%E2%80%93Ribbentrop (akses, 25 Januari 2015).

⁴⁴ *Ibid.*

Rusia pada waktu itu adalah, selama berlakunya perjanjian *Non-Agresi* tersebut negara Rusia kembali memperkuat pertahanannya.⁴⁵

Selanjutnya, apa yang disampaikan oleh kedua tokoh tersebut yakni Hatta dan Syahrir dalam pidatonya di dalam negeri maupun di luar negeri, sudah nampak bahwa sikap politik yang dijalankan Indonesia adalah sikap Politik Bebas Aktif atau juga bisa dikatakan Politik *Non Block*, walaupun di dunia internasional pada waktu itu nama politik *Non Block* belumlah dikenal. Digunakannya politik *Non Block* tersebut merupakan suatu langkah terobosan yang dianggap tepat untuk memecahkan berbagai masalah-masalah yang terjadi dalam diri bangsa Indonesia, baik itu masalah yang bersifat dalam negeri maupun luar negeri. Dalam hal ini, politik *Non Block* tersebut telah membuka jalan untuk semakin dekat kepada cita bangsa Indonesia pada waktu itu sendiri yakni sebuah kemerdekaan penuh dan sebuah pengakuan terhadap Indonesia dari negara-negara luar atas kedalulatanannya sebagai sebuah negara dan dapat diterima oleh negara-negara lain, sehingga dapat turut serta dalam memecahkan masalah-masalah yang ada di dunia internasional.

B. Amanat Undang-Undang Dasar 1945

Membahas mengenai konsep politik luar negeri sebuah negara, tidaklah terlepas dari pengaruh pemimpin yang berkuasa pada masa itu. Dalam hal ini, seorang pemimpin atau seorang presiden memiliki peranan yang cukup dalam pelaksanaan politik luar negerinya. Pada masa

⁴⁵ Mohsmmad Hatta, *Loc. Cit.*, Hlm 31.

pemerintahan Soekarno kita mampu melihat bagaimana kepriawaian seorang pemimpin yang menjalankan sebuah konsep politik luar negeri yang menyerupai pergerakan pendulum jam.⁴⁶

Dimana pada waktu itu pergerakan politik luar negeri Indonesia tidak pernah menetap pada satu tempat saja. Melainkan berpindah tempat dari tempat yang satu ke tempat lainnya sehingga menyerupai sebuah konsep pergerakan sebuah pendulum jam. Lahirnya konsep politik luar negeri yang menyerupai konsep pendulum pada waktu itu tidak terlepas dari dua factor yakni factor dari dalam dan dari luar. Dimana factor dari luar itu mencakup kondisi dunia internasional pada waktu itu yang terbagi dalam dua Blok besar. Sedangkan factor dari dalam adalah kondisinya dalam negeri Indonesia itu sendiri yang baru memproklamasikan kemerdekaannya serta aturan-aturan yang dijalankan pemerintah.

Terkait dengan dua factor tersebut maka diperlukanlah sebuah konsep politik yang mampu digunakan dalam mencapai tujuan nasional pada waktu itu. Sehingga pada waktu itu dipilihlah konsep politik yang tidak mengikat terhadap dua kekuatan besar pada waktu itu. Baik itu ikatan dalam bentuk persamaan ideologi hingga ikut tergabung dalam pakta aliansi militer yang dibangun. Serta aktif dalam setiap penyelesaian

⁴⁶ Terkait dengan konsep politik luar negeri Indonesia yang menyerupai pergerakan pendulum jam merupakan sebuah penggambaran yang diberikan terhadap perilaku politik luar negeri Indonesia pada waktu itu sedikit banyaknya dipengaruhi oleh kondisi dunia internasional yang sedang berada pada masa perang dingin. Dimana dalam hal ini pemerintah Indonesia telah bersikap tidak turut serta dalam persetujuan Blok Amerika Serikat dan Blok Uni Soviet pada waktu itu, tetapi akan tetap menjalin hubungan diplomatic terhadap kedua negara pemimpin blok tersebut beserta negara-negara yang terlibat di dalamnya. Hal ini dilakukan juga tidak terlepas untuk memenuhi berbagai macam keperluan dalam negeri pada waktu itu. Lihat M. Sabir, *Loc.Cit.*, Hlm 171.

permasalahan dalam dunia internasional. Dalam hal ini konsep tersebut lebih dikenal dengan Bebas Aktif.

Dalam hal ini juga, sebuah konsep politik luar negeri juga tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional negaranya. Terkhusus dalam hal ini adalah Indonesia sendiri, yang dimana memiliki kepentingan nasional seperti yang nampak dalam pembukaan UUD 1945. Dimana dalam pembukaan UUD 1945 tersebut, tepatnya pada alinea ke empat.⁴⁷ Terdapat sebuah amanat kepada bangsa Indonesia agar membentuk sebuah pemerintahan negara Indonesia yang dapat menyelenggarakan empat fungsi yakni, sebagai berikut:

1. Fungsi Hankam: Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tanah air.
2. Fungsi Ekonomi: memajukan kesejahteraan umum.
3. Fungsi Sosial dan Budaya: mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Fungsi Politik: ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social.⁴⁸

Berkenaan keempat tersebut merupakan kepentingan nasional yang mesti diwujudkan oleh pemerintahan Soekarno pada waktu itu, maka tidaklah salah jika pada waktu itu pemimpin negara kita menggunakan konsep pergerakan pendulum untuk mewujudkan hak tersebut. Dalam hal

⁴⁷ Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Lihat, Undang-Undang Dasar 1945.

⁴⁸ M. Sabir, *Loc. Cit.*, Hlm 51.

ini dalam mewujudkan kepentingan nasional Indonesia pada waktu itu, Presiden Soekarno tidak terbatas hanya kepada satu titik saja. Akan tetapi Presiden Soekarno tetap mencoba segala hal untuk mewujudkan kepentingan nasional Indonesia tersebut, walaupun meminta bantuan kepada kedua kekuatan yang sedang berseteru tersebut.

Perlu juga dipahami terkait dengan konsep politik luar negeri yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia dalam kondisi dunia internasional pada waktu itu. Dimana hal tersebut juga tidak bisa terlepas dari landasan konstitusional negara Indonesia yakni UUD 1945. Dalam hal ini, yang terdapat dalam batang tubuh UUD 1945 tersebut merupakan sebuah amanat yang mesti dijalankan oleh bangsa Indonesia sendiri. Yakni sebuah amanat yang didalamnya menghendaki agar bangsa Indonesia turut serta menjaga ketertiban dunia yang didasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social. Dengan adanya amanat yang mesti dijalankan dalam UUD 1945 yang merupakan landasan konstitusional Indonesia tersebut, maka setiap konsep yang dilahirkan tidaklah boleh bertentangan dengan landasan konstitusional tersebut.

Sehingga sebuah kesalahan yang terjadi jika untuk mewujudkan sebuah kepentingan nasional bangsa Indonesia, seorang pemimpin negara mengikutsertakan negaranya dalam pergolakan yang terjadi pada waktu itu. Maka hal tersebut telah bertentangan dengan amanat yang terdapat dalam batang tubuh UUD 1945. Maka dengan adanya amanat tersebut,

seorang pemimpin negara dapat mengambil sikap dari kondisi yang ada demi keuntungan negaranya.

Hal tersebut nampak pada penerapan politik luar negeri Indonesia pada pembahasan selanjutnya. Dimana dalam pembahasan tersebut dilihat bagaimana pemerintah Indonesia bergerak dari Blok Barat dan berpindah ke Blok Timur guna mendapatkan bantuan untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut.

Sehubungan dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, secara klasik Indonesia telah memenuhi unsur terbentuknya sebuah negara, dimana dalam hal ini unsur terbentuknya negara secara klasik mencakup, wilayah tertentu, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat.⁴⁹ Akan tetapi berdasarkan perjanjian Montevideo (Uruguay) 1933, yang merupakan juga konsep hukum internasional, indonesia pada waktu itu belumlah memenuhi unsur dari terbentuknya sebuah negara. Dalam hal ini dalam perjanjian Montevideo ada 4 unsur konstitutif dan 1 unsur deklartif yang nesti dipenuhi oleh Indonesia untuk menjadi sebuah negara pada waktu itu,⁵⁰ yakni:

1. Harus ada penghuni (rakyat, penduduk, warga negara).
2. Harus ada wilayah (tertentu) atau lingkukangan kekuasaan.
3. Harus ada kekuasaan tertinggi (penguasa yang berdaulat) atau pemerintah yang berdaulat.
4. Kesanggupan berhubungan dengan negara-negara lainnya.

⁴⁹ Romi Librayanto, *Ilmu Negara Suatu Pengantar* (Cet. II; Makasar: Puataka Refleksi, 2010). Hlm 72.

⁵⁰ *Ibid.* Hlm 73.

5. Pengakuan (deklaratif), dalam hal ini adanya pengakuan dari negara lain.⁵¹

Selanjutnya terkait dengan hal tersebut, maka dilakukan usaha-usaha yang dianggap perlu oleh Indonesia untuk menjadi sebuah negara. Adapun usaha-usaha yang dilakukan Indonesia pada waktu itu adalah perang dan diplomasi yang membuahkan hasil adanya pengakuan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949.⁵² usaha-usaha yang dilakukan pada waktu itu tidak terlepas dari kondisi dalam negeri Indonesia itu sendiri, dalam hal ini kondisi yang dimaksud adalah kedatangan kembali orang-orang Belanda ke Indonesia yang mencoba kembali melakukan pendudukan terhadap wilayah-wilayah di Indonesia. Dalam hal ini, pada waktu itu Belanda belum mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia dan masih menganggap Indonesia sebagai daerah jajahannya.

Selanjutnya dengan adanya pengakuan kedaulatan yang diberikan oleh pemerintah Belanda maka berdasarkan konsep hukum internasional, Indonesia telah memenuhi persyaratan ke lima sebagai sebuah negara, sekaligus juga memenuhi syarat keempat yakni kesanggupan untuk melakukan hubungan dengan negara-negara lain yang ada di dunia. Dalam hal ini terkait dengan adanya hubungan yang dilakukan Indonesia dengan negara-negara lain sebagai salah satu persyaratan dari konsep hukum internasional tersebut, Indonesia menerapkan kebijakan politik luar negeri

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Pramoedya Ananta Toer, Koeslah Soebagyo Toer dan Ediati Kamil, *Kronik Revolusi Indonesia* (Jakarta: KPG, 2014). Hlm 590.

yang bebas dan aktif sebagai sebuah langkah bijak terkait dengan perang dingin yang sedang terjadi di dunia internasional pada waktu itu.⁵³

Politik luar negeri yang bebas dan aktif sebagai sebuah landasan operasional hubungan internasional yang diterapkan oleh bangsa Indonesia untuk menghindarkan diri dari kedua blok yang berseteru sehingga tidak terlibat dalam perseteruan kedua blok besar tersebut yakni blok barat dan blok timur, dan juga merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang terdapat dalam batang tubuh UUD 1945 alinea ke empat, yakni ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.⁵⁴

Terkait dengan pernyataan yang tertulis dalam batang tubuh Undang-undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional Indonesia dalam menjalankan politik luar negerinya, jelas menegaskan bahwa posisi Indonesia dalam dunia internasional adalah posisi yang netral dalam artian tidak memihak dan masuk sebagai sekutu salah satu blok yang berseteru. Dalam hal menentukan kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh presiden Soekarno pada waktu itu tidak hanya melihat bagaimana keadaan yang terjadi dalam dunia internasional tetapi juga melihat bagaimana keadaan yang terjadi di dalam negeri Indonesia pada waktu itu. selain kedua hal

⁵³ Mirnawati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia VI* (Jakarta: Balai Pustaka, 1992). Hlm 325.

⁵⁴ Undang-Undang Dasar 1945.

tersebut landasan konstitusional juga mesti diperhatikan pula dalam menentukan kebijakan luar negeri.⁵⁵

Berdasarkan defenisi dari negara yang dimana didalamnya dijelaskan bahwa negara merupakan sebuah oragniasasi kemasyarakatan yang dimana organisasi tersebut telah memenuhi persyaratan tertentu terkait dengan unsur terbentuknya negara.⁵⁶ Terkait dengan pernyataan tersebut bahwa negara merupakan sebuah organisasi, yang dimana dalam sebuah organisasi terdapat sebuah konstitusi yang bersifat mengikat, maka dalam hal ini landasan oprasional politik luar negeri yakni politik luar negeri yang bebas dan aktif tidak boleh bertentangan dengan landasan konstitusional yang dimiliki yakni Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana pada landasan kontitusional itulah merupakan sebuah pedoman dalam menentukan setiap kebijakan baik itu dalam maupun luar negeri.

Landasan oprasional politik luar negeri yang bebas dan aktif juga bisa diartikan sebagai sebuah prinsip politik yang dijalankan oleh bangsa Indonesia terkait untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi selama perang kemerdekaan dan pasca perang kemerdekaan. Berdasarkan apa yang tertuang dalam batang tubuh UUD 1945 yang dimana dalam pernyataan tersebut, Indonesia sebagai sebuah negara turut berpartisipasi terhadap dunia Internasional dalam hal ketertiban, perdamaian dan keadilan sosial. Maka dari itu beradsarkan keputusan dari Dewan

⁵⁵ Genewati Wuryandari, *Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Pusaran Politik Domestik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008). Hlm 17-19

⁵⁶ Romi Librayanto, *Loc. Cit.*, Hlm 72.

Pertimbangan Agung dengan keputusan No. 2/Kpts/Sd/I/61, pada tanggal 19 Januari 1961, maka dasar politik luar negeri Indonesia adalah:

1. Dasar : UUD 1945.
2. Sifat : Bebas dan aktif, anti imperialisme dan kolonialisme.
3. Tujuan :
 - a. Mengabdikan pada perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia yang penuh.
 - b. Mengabdikan pada perjuangan untuk kemerdekaan nasional dari seluruh bangsa-bangsa di dunia.
 - c. Mengabdikan pada perjuangan untuk membela perdamaian dunia.⁵⁷

Maka berdasarkan dari keputusan Dewan Pertimbangan Agung tersebut, dalam hal ini terkait dengan politik luar negeri yang dijalankan Indonesia maka dapat dikatakan bahwa prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif yang dilakukan Indonesia lebih mengedepankan akan hal perdamaian. Dalam hal ini Indonesia sebagai sebuah negara yang baru lahir pasca perang dunia dua, telah membuat sebuah terobosan terkait masalah-masalah dalam negeri yang mesti diselesaikan untuk mencoba tidak ikut serta sebagai sekutu dari dua blok besar yang berseteru pada waktu itu. Dalam hal ini, dimana pada waktu itu

⁵⁷ Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Loc. Cit.*, Hlm 449.

masalah keamanan masih menjadi masalah yang utama dalam dunia internasional.

Terkait dengan hal itu, presiden Soekarno dalam pidatonya di istana merdeka pada tanggal 17 Agustus 1961,⁵⁸ juga menyampaikan tentang asas dan tujuan terkait dengan prinsip politik luar negeri yang dijalankan oleh Indonesia yang bersifat bebas dan aktif adalah sebagai berikut:

“Pertama: Bebas dan Aktif
Kedua : Solidaritas Asia-Afrika\
Ketiga : Tetangga baik, *good neighbour policy*”.⁵⁹

Selanjutnya, adapun tujuan dari ketiga asas yang disampaikan oleh presiden Soekarno dalam pidatonya tersebut adalah sebagai berikut:

“Untuk perdjongan menentang Kolonialisme-imperialisme (*pertama*).
Untuk mempertumbuhkan Keperibadian Nasional (*kedua*).
Untuk Persahabatan dan Perdamaian antar-bangsa. (*ketiga*)”.⁶⁰

Sehubungan dengan apa yang telah diputuskan oleh Dewan Pertimbangan Agung dan apa yang telah di sampaikan oleh presiden Soekarno dalam pidatonya di istana negara terkait dengan politik luar negeri yang dijalankan oleh Indonesia, maka prinsip politik yang bersifat bebas dan aktif merupakan sebuah jawaban atas permasalahan yang yang di hadapi Indonesia di dunia internasional yang dimana pada waktu itu terjadi perang dingin antara dua blok besar yakni blok timur yang berhaluan komunis-sosialis dan blok barat yang berhaluan kapitalis-

⁵⁸ Iwan Siswo, *Panca Azimat Revolusi* (Vol. II; Jakarta: PT Gramedia, 2014). Hlm 145.

⁵⁹ *Ibid.* Hlm 212.

⁶⁰ *Ibid.*

liberalis yang terbentuk pasca perang dunia II. Dengan adanya prinsip politik tersebut Indonesia bisa dengan leluasa melakukan kerjasama dengan negara-negara yang menjadi sekutu blok barat dan blok timur tanpa harus masuk menjadi sekutu salah satu blok dari kedua blok yang beseteru tersebut.

Berdasarkan dari prinsip politik tersebut, penyelesaian masalah-masalah yang dialami Indonesia pasca perang kemerdekaan sebagai sebuah negara yang kurang maju bisa tertasi yang dimana dalam penyelesaian masalah tersebut bisa melibatkan negara-negara lain, tanpa harus melanggar landasan konstitusional indonesia itu sendiri yakni UUD 1945. Karena pada dasarnya prinsip politik luar negeri Indonesia yang bersifat bebas dan aktif yang juga merupakan sebuah landasan oprasional yang dijalankan, yang mesti disandarkan kepada landasan konstitusional yang dimiliki Indonesia. Dalam hal ini segala bentuk kebijakan yang dikeluarkan yang menyangkut landasan oprasional sebuah negara mesti disusun dan tidak boleh bertentangan dengan landasan konstitusional yang dimiliki negara itu, karena dalam sebuah landasan konstitusional terdapat cita-cita dan tujuan dari berdirinya negara tersebut sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan.

C. Kondisi Dalam Negeri Indonesi (1945-1949)

Terkait dengan beberpa hal yang mendasari lahirnya politik bebas aktif seperti adanya perng dingin yang terjadi antar blok barat dan blok timur serta Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional

bangsa Indonesia. Dalam hal ini juga terdapat factor lain yang mempengaruhi yakni terkait dengan kondisi dalam negeri Indonesia itu sendiri dari tahun 1945 tepat setelah adanya proklamasi kemerdekaan sampai pada pengakuan kedaulatan yang didapatkan pada tahun 1949. Dimana pada waktu itu bangsa Indonesia mencoba membangun perekonomiannya serta usaha mempertahankan kemerdekaannya dari bangsa Belanda yang mencoba kembali melakukan penjajahan.

Perekonomian pada awal kemerdekaan bisa dikatakan merupakan sebuah masalah yang serius dihadapi oleh pemerintah Soekarno pada waktu itu.⁶¹ Maka dari pada itu untuk mempertahankan perekonomian pada waktu itu salah satu jalan yang dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan ekspor barang. Hal ini ditujukan agar segala keperluan negara dapat segera terpenuhi.

Akan tetapi dalam upaya pemerintahan Soekarno untuk membangun perekonomian dalam negeri kembali mendapatkan hambatan. Yakni bangsa Belanda kembali mencoba untuk melakukan penjajahan terhadap bangsa Indonesia. Upaya penjajahan kembali yang dilakukan oleh bangsa Belanda pada waktu itu telah mempengaruhi kondisi dalam negeri Indonesia. Dimana hal ini dapat dilihat dari serangkaian pertempuran-pertempuran yang terjadi serta blockade ekonomi yang dilakukan oleh pihak Belanda.⁶²

⁶¹ Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Op. Cit.*, Hlm 277-283

⁶² Pertempuran-pertempuran yang dimaksud diantaranya yakni pertempuran Medan Area, pertempuran Ambarawa, pertempuran Surabaya, pertempuran Bandung, merupakan usaha yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam hal mempertahankan kemerdekaan dengan jalan

Adanya blockade ekonomi yang dilakukan oleh pihak Belanda, pemerintah Indonesia pun mencari berbagai cara untuk mengatasinya. Salah satunya adalah usaha yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengirimkan bantuan beras ke India.⁶³ Usaha yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia tersebut pun menuai hasil yakni, sebagai bentuk balasan terhadap bantuan beras yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia maka pemerintah India pun akan mengirimkan bahan pakaian yang sangat dibutuhkan oleh bangsa Indonesia. Selain dari pada itu pemerintah Indonesia juga melakukan hubungan dagang ke luar negeri seperti dengan membentuk perwakilan resmi di Singapura dengan nama *Indonesian Office*.⁶⁴

Dampak lain yang timbul dari dalam negeri terkait dengan adanya blockade ekonomi yang dilakukan oleh pihak Belanda yakni makin parahnya inflasi yang terjadi di Indonesia. Hal ini juga diakarenakan tak terkendalinya peredaran mata uang Jepang ditambah lagi belum adanya mata uang bangsa sendiri. Tidak adanya mata uang sendiri serta tak terkendalinya peredaran mata uang Jepang juga meruakan permasalahan tersendiri. Sehingga pemenuhan kebutuhan dalam negeri pemerintah Indonesia harus mendatangkannya dari luar negeri.

peperangan. Sedangkan blockade ekonomi merupakan sebuah usaha dari Belanda yang dimulai pada bulan November 1945 untuk mengekang bangsa Indonesia dari segi ekonomi. *Ibid.* Hlm 187-201.

⁶³ Pengiriman beras dengan jumlah sekitar 500.000 ton yang dilakukan oleh bangsa Indonesia pada waktu itu merupakan usaha menembus blockade ekonomi pihak Belanda terhadap Indonesia dan juga sebagai usaha untuk membantu negara sahabat dan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri Indonesia. *Ibid.* Hlm 275.

⁶⁴ *Indoensian Office* merupakan badan yang dibentuk untuk memperjuangkan politik luar negeri Indonesia, akan tetapi disisi lain badan ini juga digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk menembus blockade ekonomi yang dilakukan oleh pihak Belanda. *Ibid.* Hlm 276.

BAB III
PELAKSANAAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA PADA ERA
PEMERINTAHAN SOEKARNO

A. Era Sebelum KMB (1945-1949)

Sehubungan dengan penerapan politik luar negeri Indonesia sebelum KMB, kebanyakan di tujukan untuk meredakan konfrontasi antara pemerintah Indonesia dengan tentara sekutu dibergai daerah pada waktu itu. Selain dari pada tujuan utamanya yakni mendapatkan kedaulatan dari pemerintah Belanda dan Negara-negara yang ada di dunia pada umumnya. Terkait dengan sikap politik luar negeri yang dijalankan pemerintah Indonesia pada waktu itu yang tak memihak dan mau menjalin hubungan diplomatic dengan Negara manapun, akhirnya juga mendapatkan sambutan baik khususnya dari Negara-negara arab. Di mana pada tanggal 18 Nopember 1946,⁶⁵ Dewan Menteri Luar Negeri Liga Arab dapat mengakui kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia secara *De Facto* dan *De Juore*, hingga akhirnya pada pertengahan tahun 1947,⁶⁶ semua Negara yang tergabung dalam Liga Arab telah mengakui kemerdekaan dan kedaulatan secara *De Facto* dan *De Juore*.

Maka sehubungan dengan hal itu, perjanjian persahabatan untuk yang pertama kalinya bagi Indonesia dengan Negara lain dalam hal ini dengan kerajaan Mesir pun ditanda tangani pada tanggal 10 Juni 1947,⁶⁷ yang kemudian disusul oleh Suriah pada tanggal 2 Juli 1947.⁶⁸ Selain dari

⁶⁵ M. Zein Hasan, *Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri* (Jakarta: Bulan Bintang, 1980). Hlm 290.

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid.* Hlm 290-291.

⁶⁸ *Ibid.*

pada itu, perundingan dengan pemerintah Belanda terkait dengan pengakuan kedaulatan Indonesia pun tetap dilakukan. Dalam hal ini pemerintah Indonesia dengan pemerintah Belanda telah melakukan setidaknya empat kali pertemuan guna membahas pengakuan kedaulatan negara Indonesia. Sebagai usaha untuk mewujudkan cita-cita pemerintah Indonesia pada waktu itu maka perundingan-perundingan dengan pemerintah Belanda pun dilakukan. Adapun perundingan-perundingan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan pemerintah Belanda yakni:

1. Perundingan Hoge Veluwe.

Perundingan *Hoge Veluwe* merupakan sebuah perundingan yang dilakukan oleh pemerintah RI dengan pemerintah Belanda yang bertempat di negeri Belanda, yang di mana perundingan tersebut dilakukan pada tanggal 24 Maret 1946.⁶⁹ Membahas tentang tuntutan pengakuan Negara Indonesia atas wilayah Jawa, Madura dan Sumatra mengalami kegagalan.

Selanjutnya, dalam perundingan tersebut pihak Indonesia diwakili oleh Dr. Sudarsono, A.K. Pringgodigdo, S.H., dan Suwandi, S.H. adapun yang menjadi perwakilan pemerintah Belanda adalah Van Mook serta yang menjadi penengah pada waktu itu yakni Sir A.C. Kerr, yang merupakan salah satu diplomat dari Inggris.

⁶⁹ Nyoman Dekker, *Sejarah Revolusi Nasional* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989). Hlm 40-42.

2. Perjanjian Linggarjati

Perundingan Linggarjati sendiri merupakan perundingan kedua yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan pemerintah Belanda yakni pada tanggal 10 November 1946.⁷⁰ Dimana pada waktu itu pemerintah Indonesia mengirimkan utusannya yakni, St. Syahrir, Moh. Roem, Mr. Sutanto Tirtoprojo, dan Dr. A.K. Gani. Sedangkan dari pemerintah Belanda diutus yakni, Prof. Schermerhorn, De Boer dan Van Pool, dan serta yang menjadi penengah adalah wakil Inggris Lord Killearn.

Dalam perjanjian tersebut, ada pun yang menjadi isi pokoknya adalah:

- a. Pemerintah Belanda mengakui Pemerintah RI *de facto* atas Jawa, Madura dan Sumatra. Daerah-daerah yang *de facto* diduduki oleh Belanda dengan berangsur-angsur, dan kerja sama dikedua belah pihak akan dimasukkan ke daerah RI selambat-lambatnya 1 Januari 1949.
- b. Pemerintah RI dan Pemerintah Belanda akan bekerja sama untuk membentuk Negara Indonesia Serikat. Negara Indonesia Serikat itu akan terdiri dari: RI,

⁷⁰ Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notokusanto, *Sejarah Nasional Indonesia VI (rev.ed.; Jakarta: Balai Pustaka, 2010)*. Hlm 211.

Kalimantan dan Timur Besar. Pembentukannya supaya sebelum 1 Januari 1949.

- c. Pemerintah RI dan Pemerintah Belanda akan bekerja sama membentuk Uni Netherland-Indonesia dengan raja Belanda sebagai kepala Uni.⁷¹

Terkait dari perjanjian yang telah diadakan tersebut. Indonesia telah mencuri perhatian dunia khususnya PBB dalam hal ini sekiranya bisa turut campur dalam menyelesaikan permasalahan kedua negara tersebut.

3. Perjanjian Renville

Perjanjian Renville yang dilasanakn pada tanggal 17 Januari 1948,⁷² bukti keseriusan dewan keamanan PBB untuk menyelesaikan masalah antara pemerintah Indonesia dan Pemerintah Belanda yang dilaksanakan di atas sebuah kapal milik Amerika Serikat yang bernama USS *Renville*. Adapun yang menjadi kesepakatan dari pertemuan kedua negara tersebut yakni adanya gencatan senjata serta beberapa isi pokok yang pada dasarnya sama dengan perjanjian Linggarjati.

Selanjutnya, adapun yang mewakili Pemerintah Indonesia dalam perundingan tersebut yakni, Amir Syarifuddin, Ali Sastroamidjoyo, Haji Agus Salim, Dr. J. Leimena, Dr. Coa Tik Ien dan Nasrun. Sedangkan dari Pemerintah Belanda yakni, R.

⁷¹ Nyoman Dekker, *Op.Cit.*, Hlm 44.

⁷² Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosusanto, *Op.Cit.*, Hlm 224.

Abdulkadir Wijoyoatmojo, Mr. H.A.L. van Vredenburg, Dr. P.J. Koets dan Mr. Dr. Chr Soumokil. Serta adapun yang diutus dewan keamanan PBB yakni, Graham, Van Zeeland dan Kirby.

4. Perjanjian Roem-Royen

Sehubungan dengan makin memburuknya hubungan antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Belanda, yang belum ada titik terang dari penyelesaian masalah pasca perjanjian *Renville*. Dewan keamanan PBB pun makin menunjukkan rasa keseriusannya dalam menyelesaikan masalah tersebut dengan membuat sebuah panitia khusus untuk menangani masalah antara Indonesia dan Belanda yang diberi nama UNCI (United Nations Commission of Indonesia).

Dalam pada itu, akhirnya perundingan pun dilakukan oleh perwakilan kedua negara tersebut dengan mengutus Moh. Roem wakil Indonesia dan dari Belanda diwakili oleh Dr. van Royen, dan telah mencapai kesepakatan pada tanggal 7 Mei 1949.⁷³ Dalam hal ini adapun kesepakatan yang tercapai pada waktu itu:

- a. Sukarno-Hatta dikembalikan ke Yogyakarta.
- b. Kesiediaan menghentikan tembak-menembak.
- c. Kesiediaan mengikuti konperensi Meja Bundar setelah pengembalian pemerintah RI ke Yogyakarta.

⁷³ Nyoman Dekker, *Op.Cit.*, Hlm 79.

Terkait dengan usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia pada masa sebelum KMB yakni dengan melakukan konfrontasi dan diplomasi akhirnya juga mendapatkan perhatian dari dunia internasional. Terkhusus dalam kawasan asia sendiri Perintah Indonesia sangat terbantu pada waktu itu dengan apa yang dilakukan oleh Jawahral Nehru dengan menyelenggarakan sebuah konferensi yang bernama *Conference on Indonesia* pada tanggal 20 Januari 1949.⁷⁴

B. Era RIS dan Demokrasi Liberal (1949-1959)

Sejak setelah diadakannya Konferensi Meja Bundar pada tanggal 23 Agustus 1949 di Den Hag,⁷⁵ maka babak baru dalam pemerintahan Indonesia telah dimulai. Dalam hal ini sesuai dengan kesepakatan kedua negara pada konferensi tersebut, system pemerintahan Indonesia haruslah berbentuk serikat. Yakni di mana dalam satu negara terdapat negara-negara bagian di dalamnya.

Selanjutnya terkait dengan hubungan diplomatic kedua negara tersebut, pemerintah Indonesia pada waktu itu mencoba menjalin hubungan baik dengan pemerintah Belanda. Hal yang dilakukan pemerintah Indonesia pada waktu juga merupakan satu usaha yang dilakukan guna mendapatkan kejelasan mengenai status dari Irian Barat yang masih dikuasai oleh pemerintah Belanda. Di mana salah satu isi kesepakatan dari KMB menyebutkan bahwa masalah Irian Barat akan

⁷⁴ *Ibid.* Hlm 75.

⁷⁵ Pramoedya Ananta Toer, Koesalah Soebagyo Toer dan Ediati Kamil, *Kronik Revolusi Indonesia* (Vol.V; Jakarta: KPG, 2014). Hlm 201.

diadakan perundingan tersendiri dalam waktu satu tahun setelah pengakuan kedaulatan atas RIS.

Akan tetapi hingga akhir tahun 1949, pemerintah Indonesia pun pada waktu itu belum mendapatkan kejelasan terkait masalah Irian Barat. Bahkan sampai pada kembalinya bentuk negara Indonesia ke dalam bentuk negara kesatuan, masalah Irian Barat pun belum terselesaikan.

Kembalinya negara Indonesia menjadi Negara Kesatuan yang didahului pembubaran negara Republik Indonesia Serikat pada tanggal 17 Agustus 1950,⁷⁶ yang dimana dalam pembentukan negara kesatuan tersebut bukan semata-mata kehendak dari pemerintah pada waktu itu akan tetapi adanya desakan dari sebagian besar rakyat negara-negara federal yang menghendaki agar negara federal tersebut dibubarkan dan bergabung ke dalam negara Republik Indonesia. Sehubungan dengan dibubarkannya negara Republik Indonesia Serikat maka kabinet serta segala bentuk kementerian yang berada di dalamnya juga ikut dibubarkan yang dimana pada waktu itu jalannya pemerintahan di dalam Republik Indonesia Serikat dipimpin oleh kabinet Moh. Hatta.

Sehubungan dengan hal tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia pasca pembubaran RIS mengalami kekosongan kabinet dalam artian NKRI pada waktu itu belum memiliki seorang perdana menteri untuk menjalankan pemerintahan negara. Dalam hal ini NKRI pada awal kembalinya menganut sistem pemerintahan Demokrasi Parlementer yang

⁷⁶ Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notokusanto, *Op.Cit.*, Hlm 307.

dimana presiden hanya sebagai pemimpin negara tapi yang menjalankan pemerintahan adalah seorang perdana menteri. Terkait dengan hal itu, pada masa awal dari kembalinya NKRI yakni dari tahun 1950-1959, terdapat tujuh kabinet yang pernah memimpin jalannya pemerintahan negara Indonesia yakni, kabinet Natsir (7 September 1950-21 Maret 1951), kabinet Sukiman (27 April 1951-23 Februari 1952), kabinet Wilopo (3 April 1952-3 Juni 1953) dan kabinet Ali Sastroamidjojo I (1 Agustus 1953-24 Juli 1955), kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955-3 Maret 1956), kabinet Ali Sastroamidjojo II (20 Maret 1956-4 Maret 1957) dan kabinet Djuanda (9 April 1957-10 Juli 1959).⁷⁷

Pada masa Demokrasi Parlemerter (1950-1959), merupakan sebuah masa dimana kedudukan partai politik sangatlah kuat. Dalam hal ini segala kebijakan yang akan diambil pada waktu itu tidak perlu melibatkan pemimpin negara atau persiden, karena kedudukan presiden pada waktu itu hanyalah mengesahkan apa yang telah menjadi keputusan dari parlemen. Berbeda dengan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan, dalam hal ini ia juga memiliki hak preogratif dalam parlemen. Dimana hal tersebut sudah merupakan ciri-ciri dari sebuah sistem pemerintahan parlemerter, dalam hal ini sebagai berikut :

- a. Dikepalai oleh soerang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan sedangkan kepala negara dikepalai oleh presiden atau raja.

⁷⁷ Adi Sudirman, *Sejarah Lengkap Indonesia* (Jogjakarta: Diva Press, 2014). Hlm 372-376.

- b. Kekuasaan eksekutif presiden ditunjuk oleh legislatif, sedangkan presiden atau raja diseleksi berdasarkan undang-undang.
- c. Perdana menteri memiliki hak preogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen.
- d. Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
- e. Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
- f. Kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif.
- g. kontrol terhadap negara, alokasi terhadap sumber daya alam dan manusia dapat terkontrol.
- h. Kelompok minoritas (agama, etnis) boleh berjuang untuk memperjuangkan dirinya.⁷⁸

Terkait dengan bentuk sistem pemerintahan yang bersifat Demokrasi Parlementer yang di mana seorang perdana menteri yang bertanggung jawab dalam hal pemerintahan sedangkan presiden hanya sebagai kepala negara, maka dari itu pada tanggal 6 September 1950,⁷⁹ secara resmi kabinet Natsir mulai memimpin jalannya pemerintahan NKRI.

1. Kabinet Natsir (7 September 1950-21 Maret 1951)

Pada masa Natsir menjabat sebagai perdana menteri yang memimpin jalannya pemerintahan di dalam NKRI, maka dari itu diperlukan sebuah program kerja sebagai sebuah langkah yang dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi baik itu masalah yang bersifat keluar ataupun ke dalam negeri. Dalam hal ini adapun yang menjadi program kerja yang penting dari kabinet Natsir, diantaranya adalah sebagai berikut:

⁷⁸ *Ibid.* Hlm 370-371.

⁷⁹ Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Op.Cit.*, Hlm 308.

- a. Meningkatkan usaha keamanan dan ketentraman.
- b. Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan.
- c. Menyempurnakan organisasi Angkatan Perang dan pemulihan bekas anggota-anggota tentara dan gerilya ke dalam masyarakat.
- d. Memperjuangkan penyelesaian soal Irian secepatnya.
- e. Mengembangkan dan memperkuat kekuatan ekonomi rakyat sebagai dasar untuk melaksanakan ekonomi nasional yang sehat.⁸⁰

Pada masa kabinet Natsir hubungan luar negeri pun tetap menjadi sebuah agenda yang penting dalam hal ini, pada tanggal 28 September 1950, Indonesia secara resmi telah bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).⁸¹ Terkait dengan hal itu, hubungan Indonesia dengan Belanda tetap menjadi prioritas, yang dimana hubungan luar negeri yang dilakukan oleh Indonesia mengkhhusus pada persoalan penyelesaian sengketa Irian Barat antara pemerintah Belanda dengan pemerintah RI yang belum mencapai titik terang terkhusus pada pemerintah RI yang menghendaki agar Irian Barat dapat masuk kedalam NKRI. Sehubungan dengan hal itu, dimana penyelesaian masalah Irian Barat merupakan salah satu dari program kerja yang penting pada masa kabinet Natsir maka dipandang perlu untuk tetap menjalin hubungan luar negeri dengan Belanda agar masalah Irian Barat bisa tetap dapat dibicarakan dan mendapatkan penyelesaian dari masalah tersebut.

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia_dan_Perserikatan_Bangsa-Bangsa (diakses tanggal 15 April 2015 pukul 01.00 Wita).

Maka dari pada itu, pada tanggal 4 Desember 1950,⁸² diadakan kembali perundingan dengan pemerintah Belanda untuk membicarakan kembali mengenai masalah Irian Barat. Akan tetapi hasil dari perundingan yang dilakukan oleh kedua negara tersebut berujung pada jalan buntu dalam hal ini, dari pihak pemerintah Belanda masih berpegang teguh pada pendiriannya yang tak ingin melepas Irian Barat untuk masuk ke dalam negara Republik Indonesia, yang memang pada awalnya dalam Konferensi Meja Bundar yang diadakan di Den Haag, Belanda tidak ingin melepaskan wilayah itu.

Pada masa pemerintahan kabinet Natsir, Indonesia mencoba memperluas hubungan luar negerinya sebagai bentuk dari prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia dengan negara-negara lain yang di Dunia terkhusus di dalam kawasan Asia. Dalam hal ini dalam wilayah kawasan Asia khususnya Asia Selatan, pada waktu itu Indonesia melakukan perjanjian persahabatan dengan negara Pakistan yang ditanda tangani pada tanggal 3 Maret 1951.⁸³ Dimana dalam perjanjian tersebut pihak Indonesia diwakili oleh Mr. Moh. Roem yang selaku menteri luar negeri pada masa kabinet Natsir, sedangkan dari negara Pakistan diwakili oleh Dr. O. H. Malik. Berdasarkan pasal-pasal dalam perjanjian yang dilakukan oleh kedua negara

⁸² Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notokusanto, *Loc. Cit.*, Hlm 308.

⁸³ Surat perjanjian persahabatan antara Republik Indonesia dan Pakistan, tahun 1951.

tersebut, lebih menekankan akan terciptanya sebuah perdamaian dari kedua negara tersebut hal ini sesuai dengan apa yang tertuan dalam pasal satu dari perjanjian persahabatan dari kedua negara tersebut yakni:

“Kedua Pihak yang Beijanji akan memelihara perdamaian yang abadi dan perhubungan yang kekal antara Indonesia dan Pakistan dan antara warga-warga negara mereka”.⁸⁴

Selain dari pada itu, dalam perjanjian tersebut pula terdapat pasal yang mengatur mengenai penyelesaian masalah antar kedua negara tersebut. Dimana pasal dalam perjanjian tersebut lebih mengedepankan adanya sebuah jalan damai dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang menyangkut kedua negara tersebut. Hal ini seperti yang tertuang dalam pasal empat dalam perjanjian tersebut yakni:

“Kedua Pihak yang Berjanji menyetujui serta menegaskan, bahwa semua perselisihan antara mereka akan diselesaikan secara damai dalam suasana persaudaraan dengan melalui kebiasaan jalan diploma tik dan jika gagal, mereka akan tetap berhak memilih cara lain apa saja, yang sesuai dengan peraturan-peraturan serta ketetapanketetapan dari Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa”.⁸⁵

Dalam perjanjian tersebut tidak hanya menyepakati masalah perdamaian tetapi juga, menyepakati adanya hubungan timbal-balik dari kedua belah pihak baik itu dalam bidang ekonomi, budaya dan bahkan dalam bidang hukum. Dimana seperti yang tertuang dalam pasal tiga dalam perjanjian tersebut yakni:

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ *Ibid.*

“Kedua Pihak yang Berjanji menyetujui untuk mengadakan, segera dapat dijalankan, persetujuan-persetujuan, atas dasar timbalbalik, mengenai dinas konsuler, perdagangan, pabean, perhubungan kebudayaan, perhubungan lalu-lintas, penerbangan sipil, penyerahan penjahat-penjahat dan segala hal-hal lain yang pehting bagi kedua negara”⁸⁶.

Berdasarka dari isi perjanjian yang disepakati oleh kedua negara tersebut, bisa diartikan bahwa kedua negara tersebut lebih mengedepankan perdamaian bahkan dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang menyangkut kedua negara tersebut apabila hal itu terjadi.

Sehubungan pasca diadakannya perjanjian persahabatan antara pemerintah Indonesia dengan negara Pakistan, maka pada bulan itu juga Natsir menyerahkan kembali mandat yang telah diterimahnya kepada presiden Soekarno pada waktu itu yakni pada tanggal 21 Maret 1951,⁸⁷ dimana hal tersebut menandakan berakhirnya kabinet Natsir. Adapun yang menjadi penyebab dari jatuhnya kabinet ini adalah, adanya mosi tidak percaya terkait dengan gagalnya perundingan antara Indonesia dengan Belanda yang menyangkut masalah Irian Barat.

2. Kabinet Sukiman (27 April 1951-23 Februari 1952)

Kabinet Sukiman merupakan sebuah kabinet yang terbentuk dari koalisi dua partai terkuat dalam parlemen yakni PNI dan Masyumi, dimana Sukiman sendiri merupakan orang dari partai

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Loc. Cit.*, Hlm 309.

Masyumi. Adapun yang menjadi program kerja dari kabinet ini adalah sebagai berikut:

- a. Menjalankan berbagai tindakan tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketentraman, serta menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara.
- b. Membuat dan melaksanakan rencana kemakmuran nasional dalam jangka pendek untuk mempertinggi kehidupan sosial ekonomi rakyat dan mempercepat usaha penempatan bekas pejuang dalam pembangunan.
- c. Meyelesaian persiapan pemilu untuk membentuk dewan kosntituante dan menyelenggarakan pemilu itu dalam waktu singkat, serta mempercepat terlaksananya otonomi daerah.
- d. Menyampaikan undang-undang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerja sama, penetapan upah minimum, dan penyelesaian pertikaian buruh.
- e. Menyelenggarakan politik luar negeri bebas aktif.
- f. Memasukkan wailayah Irian Barat ke wialyah RI secepatnya.⁸⁸

Selanjutnya pada masa kabinet Sukiman dalam hal memperbaiki kehidupan perokonomian Indonesia pada waktu itu tidak hanya terbatas pada penempatan bekas pejuang dalam pembangunan yang merupakan salah satu cara dalam menyelesaikan masalah perekonomian yang pernah di sampaikan oleh Moh. Hatta didepan Badan Pekerja KNP pada tanggal 2 September 1948,⁸⁹ melainkang juga melakukan hubungan kerjasama dengan negara-negara lain. Terkait dengan diperlukannya melakukan hubungan kerja sama dengan negara lain dalam hal menyelesaikan masalah

⁸⁸ Adi Sudirman, *Loc.Cit.*, Hlm 373.

⁸⁹ Mohsmmad Hatta, *Demokrasi Kita, Bebas Aktif, Ekonomi Masa Depan* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1992). Hlm 23.

perekonomian Indonesia, maka pada tanggal 15 Januari 1952,⁹⁰ Ahmad Subardjo selaku menteri luar negeri Indonesia melakukan penandatanganan perjanjian dengan Duta Besar Amerika Serikat yakni Marle Cochran. Dalam perjanjian yang ditanda tangani oleh menteri luar negeri Indonesia dan Duta Besar Amerika Serikat menyangkut tentang bantuan ekonomi dan persenjataan untuk Indonesia, yang kemudian perjanjian itu dikenal dengan nama perjanjian *Mutual Security Act* (MSA).

Selanjutnya, pasca ditanda tangannya perjanjian *Mutual Security Act* (MSA) tersebut sebagai usaha yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah ekonomi negara Indonesia, mendapatkan tanggapan negatif dari dalam negeri Indonesia. Dimana perjanjian tersebut dianggap telah membawa negara Indonesia menjadi sekutu blok barat dan sudah bertentangan dengan sifat dari prinsip politik Indonesia yang bebas dan aktif sebagai sebuah landasan operasional yang mesti di jalankan. Maka sehubungan dengan hal itu Sunario mengeluarkan mosi tuntutan bahwa segala macam bentuk perjanjian yang bersifat internasional haruslah disahkan oleh parlemen yang kemudian disusul oleh tuntutan PNI yang merupakan salah satu partai yang terkuat pada waktu itu untuk meletakkan jabatan perdana menteri dan mengembalikan mandat yang pernah di terimanya kepada presiden Soekarno. Maka

⁹⁰ <http://www.ceritamu.com/cerita/Mutual-Security-ACT-Kontrak-Indonesia-AS-di-masa-Sukarno-50an> (diakses 20 April 2015 pukul 01.35 wita).

pada tanggal 23 Februari 1952,⁹¹ Sukiman meletakkan jabatan perdana menterinya dan mengembalikan mandat tersebut kepada presiden Soekarno.

3. Kabinet Wilopo (3 April 1952-3 Juni 1953)

Kabinet Wilopo merupakan sebuah kabinet yang dibentuk bukan atas dasar dari adanya koalisi partai politik melainkan disusun berdasarkan kemampuan dan kelayakan dari setiap anggotanya atau yang biasa disebut dengan *Zaken Kabinet*, yang dimana dalam kabinet tersebut Wilopo membaginya dalam beberapa jatah yakni, masing-masing 4 orang untuk PNI dan Masyumi, 2 orang untuk PSI, masing-masing 1 orang untuk Partai Katholik Republik Indonesia (PKRI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Indonesia Raya (Parindra), Partai Buruh, dan PSII serta 3 orang untuk golongan tidak berpartai.⁹²

Sehubungan dengan dibentuknya sebuah *Zaken Kabinet* pada masa Wilopo menjabat sebagai perdana menteri, dengan program kerja sebagai berikut:

- a. Mempersiapkan pemilu.
- b. Berusaha mengembalikan Irian Barat ke dalam pangkuan RI.
- c. Meningkatkan keamanan dan kesejahteraan.
- d. Memperbarui bidang pendidikan dan pengajaran.
- e. Melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif.⁹³

⁹¹ Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notokusanto, *Loc. Cit.*, Hlm 310.

⁹² *Ibid.* Hlm 311.

⁹³ Adi Sudirman, *Loc. Cit.*, Hlm 374.

Memasuki awal tahun 1953, Indonesia kembali melakukan perjanjian perdangan dengan negara kawasan Asia Selatan yakni Negara India yakni pada tanggal 30 Januari 1953 di New Delhi.⁹⁴ Perjanjian yang dilakukan antara pemerintah Indonesia dengan India merupakan sebuah perjanjian perdagangan, yang dimana dalam perjanjian perdagangan antara kedua negara tersebut, adapun barang-barang yang akan di ekspor dan di impor oleh kedua negara tersebut diantaranya adalah:

- a. Ekspor dari India antara lain: pembuat tembakau, benang kapas, kipas angin, dinamo (motor listrik), minyak nabati, karet ban dan tabung.
- b. Impor dari Indonesia antara lain: timah, minyak kelapa, karet, garam, rotan, dan damar.⁹⁵

Pada masa kabinet Wilopo, pemerintah Indonesia tidak hanya melakukan perjanjian ekonomi dengan India saja akan tetapi dengan Pakistan juga pemerintah Indonesia lakukan. Perjanjian ekonomi antara Indonesia dengan Pakistan merupakan perwujudan dari perjanjian persahabatan kedua negara tersebut, khususnya Indonesia pada masa kabinet Natsir. Perjanjian itu sendiri ditanda tangani di Karachi pada tanggal 7 Februari 1953.⁹⁶ Sama halnya perjanjian yang dilakukan dengan pemerintah India, dalam

⁹⁴ *Trade Agreement Between The Republic of Indonesia and The Republic of India* (surat perjanjian perdagangan antara Republik Indonesia dan India), tahun 1953.

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ *Trade Agreement Between The Republic of Indonesia and Pakistan* (surat perjanjian perdagangan antara Republik Indonesia dan Pakistan), tahun 1953.

perjanjian ekonomi dengan pemerintah Pakistan Ekspor dan Impor barang merupakan hal pokok dari perjanjian ekonomi kedua negara tersebut.

Sedikit penggambaran mengenai kondisi dalam negeri pada masa kabinet Wilopo, baik dalam hal ekonomi maupun politik. Pada masa kabinet ini kondisi dalam negeri Indonesia belumlah stabil, walaupun pada pemerintahan waktu itu menggunakan sistem *Zaken Kabinet* akan tetapi gejolak politik dalam negeri terkusus pada pertentangan partai-partai besar belumlah berhenti baik itu pertentangan antara dua partai yang berbeda maupun pertentangan yang terjadi antara dua kubuh dalam satu partai yang sama. Dalam hal ini gejolak politik berupa pertentangan antar dua partai yang berbeda masih terjadi terutama antara PNI dan Masyumi, yang dimana pada masa kabinet ini kedua partai itu belum mampu untuk bekerja sama dalam pemerintahan.

Sementara pertentangan antara Masyumi dan PNI belum selesai, pada waktu itu dalam partai Masyumi juga terjadi perpecahan antara golongan Islam tradisional dan golongan Islam modern. Akan tetapi pertentangan yang terjadi pada waktu itu bukan terjadi karena adanya perbedaan ajaran, melainkan karena pada waktu jabatan menteri agama tidak diberikan kepada Wahid Hasjim dalam hal ini termasuk dalam golongan Islam tradisional

dalam partai Masyumi akan tetapi pada waktu itu jabatan menteri agama di berikan kepada golongan Islam modernis.⁹⁷

Selain pergolakan politik yang masih terjadi pada waktu itu, Indonesia kembali dihadapkan pada persoalan ekonomi yang memburuk. Memburuknya kondisi perekonomian pada waktu itu juga tidak terlepas dari kondisi internasional yang dimana pada waktu itu merupakan dampak dari berhentinya perang Korea yang terjadi antara Februari 1951 dan September 1952, yang membuat salah satu komoditas penting ekspor nasional yakni karet mengalami penurunan sebanyak 71%.⁹⁸ Akan tetapi masalah ekonomi itu dapat cepat etratasi dengan dikeluarkannya kebijakan untuk mengurangi pengeluaran negara dan mengenakan pajak tambahan sebanyak 100 sampai 200 terhadap barang impor yang mewah. Selain dari kedua kebijakan tersebut, pada masa kabinet ini juga dikeluarkan kebijakan untuk memperkecil jumlah birokrasi dan militer. Adapun yang menjadi sebab dari jatuhnya kabinet ini adalah, adanya mosi tidak percaya terhadap kabinet ini terkait dengan kegagalannya dalam melakukan demobilisasi,⁹⁹ serta beberapa masalah seperti kasus tanah di Tanjung Marowa Sumatra Timur.¹⁰⁰

4. Kabinet Ali Sastroamidjojo (1 Agustus 1953-24 Juli 1955)

⁹⁷ M. C . Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200- 2004* (Jakarta: PT. Ikrar Mandiriabadi, 2005). Hlm 485.

⁹⁸ *Ibid.* Hlm 486.

⁹⁹ *Ibid.* Hlm 488.

¹⁰⁰ Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Loc.Cit.*, Hlm 313.

Kabinet Ali merupakan kabinet yang terbentuk dari koalisi PNI dan NU pada waktu itu. Pada masa kabinet ini, kebijakan pada bidang pemerintahan hanya sedikit mengalami perubahan. Hal ini dikarenakan pada waktu perhatian pemerintah yang berkuasa hanya tertuju pada bagaimana cara mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan yang kemudian akan mereka bagi-bagi hasilnya.¹⁰¹ Akan tetapi, sebagai sebuah kabinet yang berkuasa terhadap pemerintahan Indonesia pada waktu, maka sudah kewajiban dari kabinet tersebut untuk membuat sebuah program kerja. Adapun yang menjadi program kerja dari kabinet Ali adalah sebagai berikut:

- a. Menumpas pemberontakan DI/TII di berbagai daerah.
- b. Memperjuangkan kembalinya Irian Barat kepada RI.
- c. Menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika.
- d. Meningkatkan keamanan dan kemakmuran serta segera menyelenggarakan pemilu.
- e. Pembebasan Irian Barat secepatnya.
- f. Pelaksanaan politik bebas-aktif dan peninjauan kembali persetujuan Konferensi Meja Bundar (KMB).
- g. Penyelesaian pertikaian politik.¹⁰²

Terlepas dari segala masalah yang terjadi dalam pemerintahan Indonesia pada masa kabinet Ali, juga terdapat perkembangan yang dianggap penting dalam bidang diplomatik Indonesia. Dalam hal ini adapun perkembangan yang dianggap penting dalam bidang diplomatik pada waktu itu yakni mengenai pembebasan Irian Barat, terciptanya hubungan diplomati Indonesia

¹⁰¹ M. C . Ricklefs, *Op.Cit.* Hlm 489.

¹⁰² Adi Sudirman, *Loc.Cit.*, Hlm 374.

dengan Cina sampai kepada diselenggarakannya Konferensi Asia-Afrika.

Selanjutnya terkait dengan terciptanya hubungan diplomatik Indonesia dengan Cina pada waktu itu, tidak terlepas dari usaha yang dilakukan oleh pemerinatah Republik Rakyat Cina pada waktu itu untuk melupakan segala permusuhan kepada negara-negar yang di Asia yang bukan Komunis dan netral.¹⁰³ Sehubungan dengan hal itu, kesempatan itu pun dimanfaatkan oleh pemerintah Indoensia untuk mengirim duta besarnya ke negeri Cina. Pengutusan Duta Besar Indonesia masa kabinet ini berujung pada terciptanya sebuah perjanjian perdagangan antar kedua negara tersebut yang ditanda tangani di Peking pada tanggal 30 November 1953,¹⁰⁴ yang merupakan perjanjian pertama antara pemerintah RI dengan pemerintah RRC. Dalam perjanjian perdagangan antar kedua negara tersebut melahirkan delapan pasal yang disepakati, dalam hal ini dalam perjanjian tersebut salah satu pasal menyatakan sebagai berikut:

“Untuk meluaskan perdagangan antara kedua negeri tersebut, kedua belah fihak akan mengambil tindakan-tindakan selajaknja untuk memudahkan perdagangan atas dasar multilateral”¹⁰⁵.

Terciptanya hubungan diplomatik Indonesia denga RRC yang merupakan negara Komunis pada waktu itu, merupakan

¹⁰³ M. C . Ricklefs, *Op.Cit.* Hlm 491.

¹⁰⁴ Surat persetujuan perdagangan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok., tahun1953.

¹⁰⁵ *Ibid.*

pangaplikasian dari prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia yang dimana mereka akan tetap membangun hubungan diplomatik dengan negara manapun tanpa memandang negara mereka merupakan salah satu penganut paham dari dua blok besar yang ada.

Memasuki tahun 1954, perkembangan diplomatik Indonesia dimulai dari terciptanya perjanjian persahabatan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Kerajaan Thailand, pembahasan mengenai utang-piutang antara pemerintah RI dengan pemerintah Kerajaan Belanda, penghapusan Uni Belanda-Indonesia dan sampai pada penandatanganan beberapa persetujuan antara pemerintah RI dengan pemerintah RRC.

Sehubungan dengan hal itu, memasuki tahun 1954 dimana perkembangan diplomatik Indonesia pada tahun itu yakni, adanya perjanjian persahabatan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Kerajaan Thailand yang didalamnya disepakati tujuh pasal yang kemudian ditandatangani pada tanggal 3 Maret 1954.¹⁰⁶ Adapun yang menjadi pembukaan dari surat perjanjian tersebut adalah:

“Republik Indonesia dan Keradjaan Thailand didorong oleh keinginan untuk mempererat dan mengekalkan tali persahabatan jang telah ada diantara mereka, dengan memakai aturan-aturan resmi jang bermaksud memperkuat perhubungan-perhubungan kerohanian, kebudajaan dan

¹⁰⁶ Surat perjanjian persahabatan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Thailan, Tahun 1954.

perekonomian, telah mengambil keputusan untuk mengadakan suatu perdjandjian persahabatan”.¹⁰⁷

Selanjutnya memasuki bulan Agustus pada tahun yang sama, pemerintah Indonesia kembali mengadakan pembicaraan dengan perwakilan pemerintah Kerajaan Belanda terakait dengan utang-piutang dari kedua negara tersebut. Dalam hal ini pertemuan kedua negara tersebut kembali menghasilkan sebuah surat persetujuan yang ditandatangani pada tanggal 11 Agustus 1954.¹⁰⁸ Dalam naskah persetujuan tersebut terdapat lima pasal yang disepakati dimana diantara salah satu dari ke-lima pasalnya membahas mengenai pemeberian uang dari pemerintah kerajaan belanda kepada pemerintah RI. Hal ini sesuai apa yang menjadi isi dari pasal enam dalam surat persetujuan tersebut:

“Pemerintah Keradjaan Nederland akan membajar kepada Pemerintah Republik Indonesia, jaitu dalam 14 hari sesudah Persetudjuan ini mulai berlaku, sedjumlah uang sebesar f. 20.000.000.- (dua puluh djuta rupiah) dalam nilai uang Belanda sebagai uang penebus untuk piutang-piutang...”¹⁰⁹

Sehubungan dengan hal itu, pembicaraan antara pemerintah RI dengan pemerintah Kerajaan Belanda yang berujung ditandatanganinya surat persetujuan antara kedua negara tersebut merupakan perkembangan kedua dalam hubungan diplomati Indonesia pada kurung waktu 1954, yang dimana juga pada bulan

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ Surat persetujuan tentang penyerahan piutang-piutang terhadap orang Belanda oleh Republik Indonesia kepada Kerajaan Beland, Tahun 1954.

¹⁰⁹ *Ibid.*

tersebut terkait masalah Irian Barat kedua negara kembali melakukan pertemuan, akan tetapi pertemuan tersebut tidak menghasilkan sebuah penyelesaian yang diinginkan oleh pemerintah RI, melainkan hanya menghasilkan sebuah usulan penghapusan Uni Belanda-Indonesia.¹¹⁰

Selanjutnya adapun yang menjadi perkembangan keempat dalam hubungan diplomatik Indonesia pada waktu itu adalah, kembalinya dibuka pembicaraan antara pemerintah RI dengan pemerintah RRC terkait dengan perjanjian pertama dari kedua negara tersebut.

Dalam hal ini, terkait dengan dibukanya pembicaraan antara pemerintah RI dengan pemerintah RRC yang kemudian berujung ditandatanganinya dua surat kesepakatan yang berbeda pada tanggal yang sama yakni surat protokol dagang dan surat persetujuan pembayaran antara pemerintah RI dengan pemerintah RRC yang di mana kedua naskah itu ditandatangani pada tanggal 1 September 1954.¹¹¹ Terkait dengan isi dari dua perjanjian yang ditandatangani pada tanggal itu adalah:

“Kedua belah pihak peserta setuju, bahwa Persetujuan Perdagangan yang ditanda-tangani pada tgl. 30 Nopember 1953 akan diperpanjang dan tetap berlaku sampai tgl. 31 Djuli 1955”.¹¹²

¹¹⁰ M. C . Ricklefs, *Loc.Cit.*, Hlm 491.

¹¹¹ Surat pembayaran dan Perotokol dagang antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok Tahun 1954.

¹¹² Protokol dagang antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok Tahun 1954, Pasal I.

“Sesuai dengan ketentuan² Persetujuan ini maka semua kontrak² dan paktur² mengenai perdagangan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok harus dinjatakan dalam mata uang Pound Sterling”.¹¹³

Sehubungan dengan ditandatanganinya kedua naskah tersebut, merupakan penggambaran semakin akrabnya hubungan diplomatik kedua negara yang berbeda ideologi tersebut yakni RI dan RRC. Dalam hal ini juga merupakan naskah persetujuan dua negara yang terakhir ditanda tangani pemerintah RI pada tahun 1954. Selanjutnya terkait dengan masalah Irian Barat yang masih menjadi sebuah masalah yang belum terselesaikan bagi pemerintah Indonesia, maka dari itu pada tanggal 23 November 1954,¹¹⁴ pemerintah Indonesia mengeluarkan sebuah resolusi yang ditujukan kepada Panitia Politik PBB yang dimana dalam isi resolusi tersebut menyatakan bahwa:

“bahwa Irian Barat merupakan bagian dari negara nasional Republik Indonesia, dan Indonesia mencari jalan penyelesaian secara damai dan meminta agar diadakan kembali perundingan dengan anjuran dan pengawasan PBB”.¹¹⁵

Terkait dengan resolusi yang diajukan oleh pemerintah Republik Indonesia, maka pada tanggal 30 November 1954,¹¹⁶ dalam sidang Panitia Politik PBB diadakan pemungutan suara terhadap resolusi yang diajukan oleh pemerintah Indonesia. Dalam hal ini, pada

¹¹³ Persetujuan pembayaran antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok, Pasal VI.

¹¹⁴ Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Loc.Cit.*, Hlm 437.

¹¹⁵ *Ibid.*

¹¹⁶ *Ibid.*

waktu itu resolusi tersebut diterima dengan perolehan 34 setuju, dan yang lainnya 14 menolak serta 10 suara abstain.¹¹⁷ Akan tetapi dalam sidang Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1954, pemerintah Indonesia tidak mendapatkan dukungan penuh terkait dengan resolusinya. Maka dari pada itu pada bulan yang sama pemerintah Indonesia menyelenggarakan Konferensi Perdana Menteri Mancanegara yang diikuti oleh Indonesia, India, Pakistan, Sri Lanka, Birma dan Myanmar.¹¹⁸

Memasuki tahun 1955, wakil pemerintah Indonesia dan pemerintah Cina kembali melakukan pertemuan untuk membahas mengenai masalah kewarganegaraan yang dimiliki oleh orang keturunan Cina yang ada di Indonesia, yang dimana dalam pertemuan tersebut kedua negara melahirkan sebuah perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 22 April 1955.¹¹⁹ Adapun yang menjadi kesepakatan dalam perjanjian tersebut sesuai dengan isi dari pasal satu dalam perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:

“Kedua Pihak Agung Jang Berdjandji menjetudjui, bahwa barangsiapa serempak mempunjai kewarganegaraan Republik Indonesia dan kewarganegaraan Republik Rakjat Tiongkok harus memilih satu diantara kewarganegaraan Republik Indonesia dan kewarganegaraan Republik Rakjat Tiongkok itu, dengan dasar menurut kehendak jang berkepentingan sendiri”¹²⁰.

¹¹⁷ *Ibid.*

¹¹⁸ *Ibid.* Hlm 438.

¹¹⁹ Surat perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok mengenai soal dwikewarganegaraan Tahun 1955.

¹²⁰ *Ibid.*

Selanjutnya mamsuki tahun 1955 terkait dengan perkembangan diplomatik Indonesia pada waktu itu, yang pada tahun itu indonesia menjadi tuan rumah dari sebuah konferensi regional yakni konferensi Asia-Afrika. Konferensi Asia-Afrika sendiri merupakan kelanjutan dari Konferensi kolombo pada bulan April-Mei 1954,¹²¹ yang dihadiri oleh lima perdana menteri yakni perdana menteri Indonesia, Burma, India, Pakistan dan Sri Langka. Dalam hal ini jelaslah keterkaitan antara konferensi lima perdana menteri yang diadakan di Kolombo dengan konferensi Asia-Afrika yang akan diadakan di Indonesia pada waktu itu, hal ini dikarenakan dalam konferensi yang diadakan pada waktu itu pada tanggal 30 April 1954,¹²² perdana menteri Ali Sastroamidjojo memeberikan usulan kepada empat perdana menteri lainnya terkait perlu diadakannya kembali sebuah konferensi yang setingkat dengan Konferensi Kolombo dimana cakupan konferensi tersebut tidak hanya mencakup Asia melainkan juga harus mencakup wilayah Afrika.

Sehubungan dengan hal itu, sebagai sebuah kelanjutan dari Konferensi Kolombo maka pada tanggal 18 April 1955, Konferensi Asia-Afrika secara resmi dibuka di ruang Sidang Pleno di Gedung Merdeka.¹²³ Terkai dengan kondisi dunia internasional yang

¹²¹ Roeslam Abdulgani, *THE BANDUNG CONNECTION, Konperensi Asia-Afrika di Bandung 1955* (Cet. II; Penerbit Gunung Agung, 2011) . Hlm 23.

¹²² *Ibid.*

¹²³ *Ibid.* Hlm 66.

dimana pada waktu itu memasuki masa perang dingin antara dua kekuatan besar, maka adapun yang menjadi tujuan diadakannya konferensi Asia-Afrika adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memajukan *goodwill* dan kerjasama antara bangsa-bangsa Asia dan Afrika, untuk menjelajah serta memajukan kepentingan-kepentingan mereka, baik yang silih berganti maupun yang bersama-sama, serta untuk menetapkan dan memajukan persahabatan serta perhubungan sebagai tetangga baik.
- b. Untuk mempertimbangkan soal-soal serta hubungan-hubungan di lapangan sosia, ekonomi dan kebudayaan dari pada negara-negara yang diwakili.
- c. Untuk mempertimbangkan soal-soal yang berupa kepentingan khusus dari pada bangsa-bangsa Asia dan Afrika, misalnya soal-soal yang mengenai kedaulatan nasional dan tentang masalah masalah rasialisme dan kolonialisme.
- d. Untuk meninjau kedudukan Asia dan Afrika, serta rakyat-rakyatnya dalam dunia dewasa ini serta sumbangan yang dapat mereka berikan guna memajukan perdamaian serta kerja sama di dunia.¹²⁴

Konferensi Asia-Afrika yang diadakan di Indonesia pada waktu itu, merupakan salah satu dari pencapaian terbesar yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia khususnya pada kabinet Ali Sastroamidjojo pada waktu itu. Dalam hal ini, pencapaian tersebut merupakan perwujudan dari cita-cita presiden Soekarno untuk melawan kolonialisme yang ada di dunia khususnya di Asia dan Afrika. Terkait dengan kondisi politik dalam negeri pasca diadakannya Konferensi Asia-Afrika, yang pada waktu itu merupakan masa kemunduran dari kabinet Ali dalam hal ini salah satu partai pendukung dari kabinet ini yakni NU merasa tidak puas

¹²⁴ *Ibid.* Hlm 32.

terkait segala kebijakan dalam kabinet ini terkhusus mengenai masalah personil, ekonomi dan keamanan pada waktu itu. Sehubungan dengan hal itu, terkait dengan adanya ketidak puasan yang dirasakan oleh partai NU terhadap kebijakan yang ada pada waktu itu, maka pada tanggal 20 Juli 1955,¹²⁵ NU pada waktu itu mengusulkan agar pemerintah yakni dalam hal ini Ali Sastroamidjojo yang selaku perdana menteri harus mengundurkan diri dari jabatannya. Dengan adanya putusan yang dikeluarkan oleh partai NU pada waktu itu yang merupakan salah satu partai pendukung dari kabinet Ali, maka empat hari setelah dikeluarkannya putusan tersebut Ali Sastroamidjojo pun mengundurkan diri dari jabatan perdana menteri. Maka dengan ini berakhirilah masa kabinet Ali Sastroamidjojo di Indonesia.

5. Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955-3 Maret 1956)

Kabinet Burhanuddin harahap merupakan kabinet yang terbentuk dari koalisi tiga partai pada waktu itu yakni Masyumi, PSI dan NU.¹²⁶ Pada awal masa pemerintahan kabinet Burhanuddin Harahap, kondisi politik dalam negeri belumlah membaik, dimana adanya ketidak puasan dari kalangan militer khususnya tentara terkait dengan anggota kabinet pada waktu itu. Dalam hal ini, pada waktu itu kalangan militer menganggap bahwa orang-orang yang duduk dalam kabinet Burhanuddin tidak ada

¹²⁵ M. C . Ricklefs, *Loc. Cit.*, Hlm 495.

¹²⁶ *Ibid.*

bedanya dengan para pendahulu mereka yang berada pada masa kabinet Ali, yang oleh kalangan militer dianggap melakukan korupsi. Terkait dengan tuduhan tersebut, maka kalangan militerpun melakukan penangkapan terhadap beberapa tokoh PNI termasuk juga yang pernah masuk dalam kabinet Ali yang menjabat sebagai menteri kehakiman pada waktu itu dan kemudian pada bulan Januari 1956,¹²⁷ mereka diadili dan dijatuhi hukuman satu tahun penjara akan tetapi pada tahun yang sama yakni pada bulan Juli mereka mendapatkan pengampunan dari presiden Soekarno.

Terkait dengan kondisi dalam negeri pada waktu itu, maka adapun yang menjadi program kerja dari kabinet ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengembalikan kewibawaan pemerintah, yaitu mengembalikan kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah.
- b. Melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan, dan mempercepat terbentuknya parlemen baru.
- c. Masalah disentralisasi, inflasi dan pemberantasan korupsi.
- d. Perjuangan pengembalian Irian Barat.
- e. Politik kerja sama Asia-Afrika berdasarkan politik luar negeri bebas aktif.¹²⁸

Terkait dengan terpilihnya Burhanuddin Harahap sebagai perdana menteri ke-lima Indonesia pada waktu itu, maka adapun yang menjadi perkembangan diplomatik pada waktu itu yakni,

¹²⁷ *Ibid.*

¹²⁸ Adi Sudirman, *Sejarah Lengkap Indonesia* (Cet . I; Jogjakarta: DIVA Press, 2014).

terciptanya hubungan perdangan antara Indonesia dengan Polandia sampai pada hubungan perdagangan antara Indonesia dengan Rumania. Terkait dengan perkembangan diplomatik pada masa kabinet Burhanuddin, Indonesia telah enam kali melakukan penandatanganan surat perjanjian dengan negara lain.

Pada masa awal kabinet Burhanuddin, adapun yang menjadi perkembangan diplomatik pada waktu itu adalah terciptanya hubungan perdagangan antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Republik Polandia yang ditandatangani pada tanggal 6 September 1955 di Jakarta,¹²⁹ dan terkait mengenai masalah Irian Barat, meneri luar negeri Indonesia yakni Anak Agung Gede Agung sebelum sidang ke-X Majelis Umum PBB, memberikan usulan agar masalah Irian Barat dicanyuman ke dalam agenda sidang Dewan Keamanan. Dalam hal ini, usul tersebut mendapatkan dukungan dari negara-negara Asia-Afrika yang kemudian membuat lunak sikap Belanda. Dengan melunaknya sikap Belanda pada waktu itu, berujung dibukanya lagi perundingan bilateral pada tanggal 2 Desember 1955.¹³⁰

Masih pada tahun yang sama, adapun yang perkembangan diplomatik pada waktu itu yakni adanya penandatanganan persetujuan kebudayaan antara pemerintah RI dengan wakil dari

¹²⁹ *Trade Agreement Between The Republic of Indonesia and The Polish People's Republic* (surat perjanjian perdagangan antara Republik Indonesia dan Republik Polandia), tahun 1955.

¹³⁰ Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Loc.Cit.*, Hlm 438.

pemerintah Mesir yang dilakukan pada tanggal yang dilakukan pada tanggal 10 Oktober 1955.¹³¹ Dimana dalam perjanjian tersebut telah disepakati sebanyak 11 pasal, yang diantara berbunyi:

“Para Pihak Agung yang Berdjandji akan mengandjurkan pembentukan kursus bahasa Indonesia pada universitas di Mesir dan kursus bahasa Arab pada universitas di Indonesia...”¹³²

Selanjutnya pada akhir tahun 1955 terkait dengan perkembangan diplomatik Indonesia yang merupakan perkembangan diplomatik ketiga yakni, pada waktu itu diadakan penandatanganan persetujuan kebudayaan dan pendidikan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah India yang ditandatangani di New Delhi pada tanggal 29 Desember 1955.¹³³ Dimana dalam perjanjian tersebut kedua negara sepakat melakukan kerja sama dalam bidang budaya dan pendidikan seperti yang tertulis dalam pasal 1 dan 2 dari perjanjian tersebut, yakni sebagai berikut:

“Para Pihak Agung yang bersetudju memaklumkan hasrat mereka untuk menggiatkan dan mengandjurkan kerjasama disemua lapangan ilmiah, sastra dan budaja”.¹³⁴

“Para Pihak Agung yang bersetudju memaklumkan hasrat mereka untuk menggiatkan dan mengandjurkan kundjungan2 timba- balik dari mahaguru2 Universitas dan

¹³¹ Surat persetujuan kebudayaan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Mesir, Tahun 1955.

¹³² *Ibid.* Pasal 3.

¹³³ Surat persetujuan kebudayaan dan pengajaran antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah India, Tahun 1955.

¹³⁴ *Ibid.*

anggota2 dari lembaga ilmiah. dan budaja, guna memberikan tjeramah ataupun kursus istimewa".¹³⁵

Terkait dengan perkembangan diplomatik pada waktu itu, dalam hal ini memasuki tahun 1956, kondisi dalam negeri Indonesia pasca pemilihan umum I pada tanggal 29 September 1955 dan pemilihan umum untuk Konstituante I pada tanggal 15 Desember 1955.¹³⁶ Dimana pada waktu itu terjadi ketidaktenangan dalam pemerintahan yang dipimpin oleh Burhanuddin Harahap yang dikarenakan banyaknya mutasi yang dilakukan oleh beberapa kementerian diantaranya yakni, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perekonomian yang merupakan salah satu faktor penyebab timbulnya desakan agar Burhanuddin selaku perdana menteri mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Karena adanya desakan terhadap Perdana Menteri Burhanuddin pada waktu itu, maka ia pun mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno dan pada tanggal 3 Maret 1956,¹³⁷ kabinet burhanuddin secara resmi pun bubar. Akan tetapi, sebelum penyerahan mandate yang dilakukan oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap pada tanggal 3 Maret 1956, sehari sebelum itu yakni pada tanggal 2 Maret 1956,¹³⁸ telah ada penandatanganan perjanjian antara pemerintah Indonesia

¹³⁵ *Ibid.*

¹³⁶ Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notokusanto, *Loc.Cit.*, Hlm 317-321.

¹³⁷ *Ibid.* Hlm 321.

¹³⁸ *Ibid.* Hlm 324.

dengan Pemerintah Amerika Serikat terkait dengan bantuan surplus makanan senilai \$96.700.000.¹³⁹

6. Kabinet Ali Sastroamidjojo II (20 Maret 1956-4 Maret 1957)

Terpilihnya Ali Sastroamidjojo dari PNI menjadi perdana menteri untuk yang kedua kalinya pada waktu itu bukan karena adanya penunjukan formatur yang dilakukan oleh Presiden Soekarno, melainkan pada waktu itu Presiden Soekarno hanya menunjuk kepada partai yang memiliki suara terbanyak atau partai yang memenangkan pemilu I pada waktu itu untuk mengajukan calonnya menjadi seorang perdana menteri. Dalam hal ini untuk membentuk kabinet baru setelah berakhirnya kabinet burhanuddin harahap, maka pada waktu itu PNI mengajukan dua nama kepada presiden Soekarno yakni Ali Sastroamidjojo dan Wilopo sebagai formatur yang pada dasarnya kedua orang tersebut merupakan mantan perdana menteri pada kabinet sebelumnya. Sehubungan dengan ditetapkannya dua nama tersebut sebagai calon perdana menteri oleh PNI kepada presiden Soekarno maka pada tanggal 8 Maret 1956,¹⁴⁰ Presiden Soekarno memilih Ali Sastroamidjojo untuk mengisi jabatan perdana menteri pada waktu itu.

Sehubungan dengan terpilihnya Ali Sastroamidjojo sebagai perdana menteri maka pada tanggal 20 Maret 1956,¹⁴¹ keanggotaan kabinet ini pun diumumkan. Dalam hal ini kabinet ini merupakan

¹³⁹ *Ibid.*

¹⁴⁰ *Ibid.* Hlm 321.

¹⁴¹ *Ibid.*

koalisi dari tiga partai yakni, PNI, Masyumi dan NU. Maka dari itu adapun yang menjadi program kerja dari kabinet ini adalah sebagai berikut:

- a. Menyelesaikan pembatalan KMB.
- b. Pembentukan provinsi Irian Barat.
- c. Menjalankan politik luar negeri bebas aktif.
- d. Perjuangan pengembalian Irian Barat.
- e. Pembentukan daerah-daerah otonomi dan mempercepat terbentuknya anggota-anggota DPRD.
- f. Mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai.
- g. Menyehatkan perimbangan keuangan negara.
- h. Mewujudkan perubahan ekonomi colonial menjadi ekonomi berdasarkan kepentingan rakyat.
- i. Pemulia keamanan dan ketertiban, pembangunan lima tahun, menjalankan politik luar negeri bebas aktif.
- j. Melaksanakan keputusan KAA.¹⁴²

Sehubungan dengan terpilihnya kembali Ali Sastroamidjojo menjadi perdana menteri untuk yang kedua kalinya, maka adapun yang menjadi perkembangan diplomatik pada masa pemerintahan kabinetnya yakni, adanya perjanjian persahabatan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah kerajaan Irak sampai pada penandatanganan perjanjian perdagangan dengan Cina.

Selanjutnya terkait perkembangan diplomatik Indonesia pada masa awal kabinet Ali II, yakni pada waktu itu pemerintah Indonesia dengan pemerintah Kerajaan Irak melakukan penandatanganan perjanjian persahabatan yang dilakukan di Jakarta pada tanggal 30 April 1956,¹⁴³ yang dimana dalam perjanjian

¹⁴²Adi Sudirman, *Loc. Cit.*, Hlm 375-376.

¹⁴³ Surat perjanjian persahabatan antara Irak dan Indonesia, Tahun 1956.

tersebut kedua negara akan memelihara perdamaian dan hubungan persaudaran dalam hal ini sesuai dengan apa yang menjadi isi dari pasal satu perjanjian tersebut. Termasuk juga didalam perjanjian tersebut disepakati mengenai penyelesaian masalah yang bersifat damai dari kedua negara tersebut sesuai dengan ketentuan dari piagam perserikatan bangsa-bangsa.

Pada perkembangan selanjutnya, yakni pada tanggal 3 November 1956 wakil pemerintah Indonesia dan pemerintah Cina kembali melakukan pertemuan, yang dimana dalam pertemuan itu kedua negara tersebut melakukan penandatanganan perjanjian perdagangan dengan jangka waktu satu tahun,¹⁴⁴ dalam hal ini sesuai dengan isi dalam pasal tujuh perjanjian tersebut, yakni:

"Persetujuan ini akan berlaku untuk masa satu tahun...Persetujuan ini mulai berlaku pada hari penandatanganan dan akan ditetapkan dengan pertukaran nota untuk maksud itu antara kedua Pemerintah".¹⁴⁵

Sehubungan dengan adanya beberapa perkembangan diplomatik yang terjadi pada masa pemerintahan kabinet Ali II, didalam negeri sendiri terjadi bebrbagai masalah yang menyebabkan kabinet ini berumur pendek. Adapun yang menjadi masalah pada waktu itu diantaranya, adanya sentimen terhadap orang-orang Cina yang ada di Indonesia terkait dengan kesulitan ekonomi yang dihadapi pada waktu itu yang berdampak pada

¹⁴⁴Surat persetujuan perdagangan antara pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok, Tahun 1956.

¹⁴⁵ *Ibid.*

adanya penyerangan yang dilakukan oleh gerombolan-gerombalan massa terutama pada wilayah yang penganut Islamnya kuat.¹⁴⁶ Selain dari pada itu, adanya pemberontakan yang terjadi membuat keamanan dalam negeri menjadi tidak stabil, dalam hal ini seperti yang terjadi di Makassar yang dimana pada waktu Letkol Ventje Sumual mendeklarasikan Piagam Perjuangan Rakyat Semesta atau yang dikenal dengan PERMESTA pada tanggal 2 Maret 1957.¹⁴⁷ Dengan munculnya tersebut, berdampak melemahnya kedudukan Ali Sastroamidjojo sebagai perdana menteri pada waktu sehingga pada tanggal 14 April 1957,¹⁴⁸ ia menyerahkan kembali mandatnya kepada Presiden Soekarno.

7. Kabinet Juanda (9 April 1957-10 Juli 1959)

Sehubungan dengan barakhirnya kabinet Ali II, dalam hal ini terkait dengan kondisi dalam negeri Indonesi yang tidak aman maka dari pada itu Presiden Soekarno menghubungi tokoh-tokoh partai politik untuk segera membentuk kabinet baru. Akan tetapi yang terjadi hanyalah tawar-menawar kedudukan dalam kabinet, maka dari pada itu Presiden Soekarno melakukan penunjukan langsung kepada dirinya sebagai formatur dalam menyusun kabinet. Dalam susunan kabinet yang dirancang oleh Presiden Soekarno, ia kemudian menunjuk Ir. Juanda yang merupakan seorang tokoh pada waktu itu yang tidak memiliki partai untuk

¹⁴⁶ M. C . Ricklefs, *Loc.Cit.*, Hlm 499.

¹⁴⁷ Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Loc.Cit.*, Hlm 372.

¹⁴⁸ *Ibid.*

menjadi seorang perdana menteri. Maka pada tanggal 9 April 1957, kabinet Juanda secara resmi terbentuk.¹⁴⁹

Kabinet Juanda dalam pemerintahan Indonesia memiliki kesamaan dengan kabinet yang pernah dipimpin oleh Wilopo yakni menggunakan sistem *Zaken Kabinet*. Sehubungan dengan terpilihnya Ir. Juanda sebagai perdana menteri, telah banyak pekerjaan yang menantinya diawal masa jabatannya yakni terkait masalah keamanan dalam negeri, masalah perekonomian, masalah Irian Barat yang belum juga selesai. Maka dari pada itu adapun yang menjadi program kerja dari kabinet ini adalah sebagai berikut:

- a. Membentuk dewan nasional.
- b. Normalisasi keadaan RI.
- c. Melanjutkan pembatalan KMB.
- d. Memperjuangkan kembali Irian Barat kembali ke RI.
- e. Mempercepat pembangunan.¹⁵⁰

Sehubungan dengan dibentuknya kabinet ini dengan Ir. Juanda sebagai perdana menteri, maka adapun yang menjadi perkembangan diplomatik pada waktu itu yakni, pada tahun 1958, walaupun kondisi dalam negeri belum sepenuhnya membaik terkait adanya normalisasi khususnya dalam hal keamanan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pergolakan yang terjadi baik itu PRRI di Sumatra dan PERMESTA di Sulawesi akan tetapi pada tahun tersebut, dalam bidang diplomatik Indonesia tetap mengalami perkembangan. Maka adapun yang menjadi perkembangan

¹⁴⁹ *Ibid.*

¹⁵⁰ Adi Sudirman, *Loc.Cit.*, Hlm 376.

diplomasi Indonesia pada tahun itu yakni dibuatnya sebuah persetujuan antara pemerintah Indonesia dengan wakil dari pemerintah Republik Ceko-Slowakia hingga perjanjian persahabatan dengan Kerajaan Iran.

Sehubungan dengan perkembangan diplomasi Indonesia pada tahun 1958, di tengah kondisi keamanan yang belum membaik dalam hal ini merupakan dampak dari adanya pergolakan yang terjadi di Sumatra dan Sulawesi. Dalam hal ini tidak menghentikan perkembangan diplomasi yang terjadi pada tahun itu, yang dimana pada tahun itu telah dibuat sebuah persetujuan antara pemerintah Indonesia dengan wakil dari pemerintah Republik Ceko-Slowakia yang kemudian ditandatangani pada tanggal 31 Mei 1958 di Jakarta.¹⁵¹ Dimana dalam persetujuan yang disepakati oleh kedua negara tersebut, hanya mengkhususkan pada bidang pendidikan dan kebudayaan saja, hal ini sesuai salah satu pasal yang disepakati dalam perjanjian tersebut yakni pasal 2 dan 4 yang berbunyi:

“Kedua Pihak Jang Berdjandji akan bersungguh-sungguh mengusahakan bertambahnja pertukaran ahli-ahli dan mahasiswa-mahasiswa dalam lapangan ilmu pengetahuan, pedagogi dan pendidikan maupun ahli-ahli dalam lapangan lain menurut keperluan dan kemungkinan-kemungkinannja”.¹⁵²

“Kedua Pihak Jang Berdjandji akan memajukan perkundjungan-perkundjungan rombongan-rombongan kebudayaan dan kesenian maupun perseorangan dan

¹⁵¹ Surat persetujuan kerja sama ilmiah, pendidikan dan kebudayaan antara Republik Indonesia dan Republik Ceko-Slowakia, Tahun 1958.

¹⁵² *Ibid.*

penjelenggaraan pameran-pameran bagi kepentingan pengetahuan dan kebudayaan kedua Negara”.¹⁵³

Selanjutnya masih dalam tahun yang sama yakni pada bulan Desember, dalam hal diplomatik pada tahun itu Indonesia masih mengalami perkembangan yakni dimana pada bulan itu, diadakan sebuah panandatanganan naskah perjanjian persahabatan antara pemerintah Indonesia yang diwakili oleh A.S. Bachmid dengan pemerintah Kerajaan Iran yang diwakili oleh Ali Asghar Hekmat yang dilakukana pada tanggal 29 Desember 1958 di Teheran.¹⁵⁴ sama halnya dengan perjanjian persahabatan dengan negara lain, dalam perjanjian tersebut pula kedua negara tersebut lebih menekankan pada terciptanya perdamaian baik itu pada dalam hal penyelesaian masalah jika itu terjadi.

Selanjutnya memasuki tahun 1959, ditandatangani perjanjian dagang antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Bulgaria yang ditanda tangani pada tanggal 27 Januari 1959 di Jakarata.¹⁵⁵ Dalam perjanjian dagang tersebut, adapun bebrapa barang yang disetujui dalam pertukarannya terhadap kedua negara tersebut yakni antara lain, karet, kopi, teh, kopra, kertas, kacang tanah, tembakau, rempah-rempah, minyak sawit, rotan dan kayu manis merupakan ekspor Indonesia untuk Bulgaria. Sedangkan

¹⁵³ *Ibid.*

¹⁵⁴ Surat perjanjian persahabatan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Iran, Tahun 1958.

¹⁵⁵ *Trade agreement between the Republic of Indonesia and the People's Republic of Bulgaria* (perjanjian perdagangan antara Repyblik Indonesia dan Republik Bulgaria), Tahun 1959.

adapun barang-barang dari Bulgaria antara lain yakni, peralatan mesin, peralatan listrik rumah tangga, alat pertanian, obat-obatan, semen, pesawat telepon, kabel, gandum dan keju.¹⁵⁶

Memasuki bulan Februari, tepatnya pada tanggal 13 Februari 1959,¹⁵⁷ perwakilan pemerintah Indonesia dengan perwakilan pemerintah kerajaan Kambojja melakukan penandatanganan naskah perjanjian persahabatan antar kedua negara tersebut di Jakarta. Dimana pada waktu itu, yang mewakili Indonesia dalam penandatanganan perjanjian tersebut adalah perdana menteri Indonesia sendiri yakni Ir. Juanda, sedangkan yang mewakili pemerintah Kambojja adalah Pangeran Norodom Sihanouk yang merupakan ketua dewan menteri kerajaan Kambojja.¹⁵⁸ Perkembangan diplomatik Indonesia selanjutnya yakni sebulan setelah penandatanganan perjanjian persahabatan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah kerajaan Kambojja tepatnya pada tanggal 28 April 1959, yang dimana pada waktu itu diadakan penandatanganan naskah persetujuan kebudayaan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Philipina.¹⁵⁹ Dalam hal ini perjanjian tersebut bertujuan untuk saling mengenalkan

¹⁵⁶ *Ibid.*

¹⁵⁷ Surat perjanjian persahabatan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Kambojja, Tahun 1959.

¹⁵⁸ *Ibid.*

¹⁵⁹ Surat persetujuan kebudayaan antara Republik Indonesia dan Philipina, Tahun 1959.

kebudayaan masing-masing diantara keduanya baik itu melalui siaran radio dan film-film.¹⁶⁰

Pada masa kabinet ini, perkembangan tidak hanya terjadi dalam hubungan diplomatik Indonesia saja, melainkan perkembangan dari dalam negeri pun terjadi khususnya dalam normalisasi keamanan yang dilakukan oleh tentara terkait dengan adanya pergolakan yang terjadi seperti yang terjadi di Sumatra dan Sulawesi. Akan tetapi dalam hal pemerintahan pada waktu itu belumlah mengalami sebuah perkembangan membaik, yang dimana pada waktu itu berbagai golongan melakukan pengecaman terhadap Presiden Soekarno terkait dengan pembentukan Dewan Nasional yang ia lakukan pada tanggal 6 Mei 1957.¹⁶¹ Selain dari pada itu, Konstituante yang telah dibentuk untuk menyusun kembali undang-undang dasar baru pengganti UUDS belum berhasil melakukannya. Maka sehubungan dengan hal itu, pada tanggal 22 April 1959,¹⁶² di depan sidang Konstituante Presiden Soekarno dalam pidatonya menganjurkan untuk diberlakukannya kembali UUD 1945.

Terkait dengan usul dari Presiden Soekarno tersebut, Konstituante pun melakukan pemungutan suara yang dimana pada waktu itu Konstituante sampai melakukan dua kali pemungutan

¹⁶⁰ *Ibid.* Pasal 3.

¹⁶¹ Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Loc.Cit.*, Hlm 380.

¹⁶² *Ibid.*

suara yakni pada tanggal 30 Mei dan 2 Juni 1959,¹⁶³ yang dimana kedua-duanya sama-sama tidak mencapai kuorum.

Maka dari pada itu, berdasarkan saran yang diberikan oleh Suwirjo (Ketua Umum PNI) agar presiden mendekritkan berlakunya kembali UUD 1945 serta melakukan pembubaran terhadap Konstituante, maka pada tanggal 5 Juli 1959,¹⁶⁴ disusunlah dekrit presiden tersebut dan kemudian dibacakan pada soreh harinya oleh Presiden Soekarno pada pukul 17.00 di Istana Merdeka dalam sebuah upacara resmi.¹⁶⁵ Dalam hal ini dekrit yang disusun pada tanggal tersebut kemudian dikenal sebagai Dekrit 5 Juli 1959. Adapun yang menjadi inti dari dekrit yang dibacakan pada tanggal tersebut adalah:

- a. Pembubaran Konstituante.
- b. Berlakunya kembali UUD 1945 dan.
- c. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung.¹⁶⁶

Sehubungan telah dibacakannya dekrit tersebut, lima hari kemudian secara resmi kabinet Juanda di bubarkan dan digantikan oleh kabinet kerja dibawah pimpinan Presiden Soekarno yang juga sekaligus menjabat sebagai perdana menteri pada waktu itu.¹⁶⁷

C. Era Demokrasi Terpimpin Hingga (1959-1967)

¹⁶³ *Ibid.* Hlm 381.

¹⁶⁴ *Ibid.*

¹⁶⁵ *Ibid.* Hlm 385.

¹⁶⁶ *Ibid.*

¹⁶⁷ *Ibid.* Hlm 419.

Sehubungan dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang merupakan sebuah langkah yang dilakukan oleh Presiden Soekarno untuk mengatasi berbagai masalah pemerintahan Indonesia, yang sekaligus juga mengakhiri sistem pemerintahan parlementer yang digunakan sejak kembalinya Indonesia menjadi negara kesatuan. Maka dari pada itu, dengan berakhirnya sistem pemerintahan Parleментар terkait dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tersebut, maka bangsa Indonesia telah memasuki era pemerintahan baru yakni era demokrasi terpimpin.

Demokrasi terpimpin sendiri merupakan sebuah sistem pemerintahan yang dimana segala kebijakan dipusatkan kepada pemimpin negara atau presiden yang dimana seorang presiden memiliki kekuasaan penuh dan tidak terbatas masanya atau yang biasa dikenal dengan istilah otokrasi.¹⁶⁸ Dalam hal ini adapun yang menjadi ciri-ciri dari sistem pemerintahan demokrasi parlementer pada waktu itu adalah:

- a. Dominasi presiden. Presiden Soekarno berperan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Terbatasnya peran partai politik.
- c. Meluasnya peran militer sebagai unsur politik.
- d. Berembangnya pengaruh partai komunis di Indonesia.¹⁶⁹

Berdasarkan ciri-ciri dari sistem pemerintahan demokrasi terpimpin tersebut, maka dari pada itu ada pun yang menjadi program kerja dari pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Presiden Soekarno, adalah sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan keamanan dalam negeri.
- b. Pembebasan Irian Barat.
- c. Melengkapi sandang pangan rakyat.¹⁷⁰

¹⁶⁸ Adi Sudirman, *Loc.Cit.*, Hlm 385.

¹⁶⁹ *Ibid.*

Terkait dengan beberapa program kerja yang akan dilakukan oleh kabinet kerja pimpinan Presiden Soekarno, maka dalam hal ini adapun yang menjadi perkembangan hubungan diplomatik Indonesia dengan negara lain sampai pada akhir tahun 1959 adalah adanya beberapa penandatanganan surat perjanjian perdagangan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan beberapa negara.

Sehubungan dengan hal itu, adapun negara-negara yang melakukan hubungan diplomatik dengan Indonesia pada masa itu yakni Turkey dan Australia. dalam hal ini, penandatanganan perjanjian yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan Turkey dilakukan di Ankara pada tanggal 14 September 1959.¹⁷¹ Sedangkan dengan pemerintah Australia dilakukan di Jakarta pada tanggal 17 Desember 1959,¹⁷² yang dimana pada penandatanganan perjanjian waktu itu pemerintah Indonesia diwakili oleh Soewito Koesoemowidagdo sedangkan yang mewakili pemerintah Australia adalah L. R. Mc Intyre.¹⁷³ Terkait dengan perjanjian perdagangan yang dilakukan pada waktu itu, pemerintah Indonesia hanya mengandalkan hasil bumi untuk di tukarkan dengan barang-barang yang dimana di dalam negeri Indonesia sendiri belum bisa diproduksi.

Memasuki tahun 1960, terkait dengan kondisi dalam negeri Indonesia yang pada waktu itu kepala pemerintahan dipimpin langsung

¹⁷⁰ Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Op.Cit.*, Hlm 419.

¹⁷¹ Trade Agreement Between The Republic of Indonesia and Republic of Turkey, Tahun 1959.

¹⁷² Trade Agreement Between The Republic of Indonesia and The Commonwealth of Australia, Tahun 1959.

¹⁷³ *Ibid.*

oleh Presiden Soekarno, maka ada pun yang menjadi perkembangan hubungan diplomatik pada tahun itu, yakni:

- a. Tanggal 18 Februari 1960, terkait dengan kunjungan Perdana Menteri Uni Soviet, Nikita Khrushchev ke Indonesia atas undangan dari Presiden Soekarno yang dimana pada waktu itu, antara pemerintah Indonesia dan Uni Soviet telah melakukan penandatanganan kesepakatan kerja dan Perdana Menteri Uni Soviet berjanji akan memberikan bantuan kepada pemerintah Indonesia sebesar US\$259 juta.¹⁷⁴
- b. Tanggal 4 dan 5 April 1960, pemerintah Indonesia dan pemerintah Irak melakukan penandatanganan perjanjian dagang serta membuat pernyataan bersama terkait dengan masalah-masalah yang masih terjadi pada dunia internasional seperti masih terjadinya penjajahan terhadap negara lain. Terkait dengan pernyataan bersama tersebut, pemerintah Indonesia juga mendapatkan dukungan dari pemerintah Irak terhadap usahanya untuk menghilangkan penjajahan terhadap Irian Barat dan memasukkannya kedalam bagian negara Indonesia.¹⁷⁵
- c. Tanggal 11 April 1960, terkait dengan kunjungan pemerintah Indonesia ke negara Bulgaria pada tanggal 8-11 April 1960, telah membuat sebuah pernyataan bersama yang kemudian

¹⁷⁴ Nurani Soyomukti, *Soekarno & Cina* (Cet I; Jogjakarta: Garasi, 2012). Hlm 79-80.

¹⁷⁵ Surat Perjanjian Dagang dan Pernyataan Bersama Antara Republik Indonesia dan Republik Iraq, Tahun 1960.

ditanda tangani pada tanggal 11 April 1960. Dimana dalam pernyataan bersama tersebut kedua negara sepakat terhadap adanya upaya penghentian percobaan-percobaan senjata nuklir dan pelucutan senjata sebagai usaha untuk mewujudkan perdamaian dunia. Terkait dengan perntaan bersama kedua negara tersebut, pemerintah Indonesia juga mendapatkan dukungan terkait dengan usaha yang dilakukan dalam untuk memasukkan Irian Barat menjadi bagian dari pemerintahan Indonesia.¹⁷⁶

- d. Tanggal 17 April 1960, terkait dengan kunjungan pemerintah Indonesia ke negara Hongaria pada tanggal 14-17 April 1960, telah membuat sebuah pernyataan bersama yang kemudian ditanda tangani pada tanggal 17 April 1960. Dimana dalam pernyataan bersama tersebut, kedua negara tidak sepakat dengan segala bentuk penjajahan yang masih terjadi di dunia dan mengecam politik diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah Uni Afrika Selatan yang telah menyebabkan korban terhadap penduduk Afrika Selatan. Dalam pernyataan bersama itu juga, pemerintah Hongaria memberikan dukungan terhadap

¹⁷⁶ Surat Pernyataan Bersama Indonesia-Bulgaria Tentang Kunjungan Presiden Republik Indonesia, Dr. Soekarno ke Republik Rakyat Bulgaria dari Tanggal 8 April Sampai 11 April, Tahun 1960.

pemerintah Indonesia terhadap usahanya untuk memasukkan Irian Barat menjadi bagian dari pemerintahan Indonesia.¹⁷⁷

- e. Tanggal 28 April 1960 pemerintah Indonesia dan pemerintah Guinea, terkait dengan kunjungan kenegaraan pemerintah RI ke negara Guinea pada tanggal 26-28 April, telah membuat sebuah pernyataan bersama yang kemudian ditanda tangani pada tanggal 28 April 1960. Dimana dalam perntaan bersama tersebut kedua negara menyatakan kesepakatannya bahwa perdamaian tidak akan tercipta di dunia jika Imperialisme dan Kolonialisme juga masih ada, serta kedua negara tersebut merasa perihatin terhadap kondisi negara Aljazair yang masih bersitegang dengan pemerintah Percancis. Dalam pernyataan bersama itu juga, pemerintah Guinea tidak membenarkan terkait dengan penjajahan yang masih terjadi di Irian Barat serta tidak memebenarkan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Belanda untuk mengirimkan kapal-kapal perangnya memasuki perairan Indonesia dan juga mendukung usaha pemerintah Indonesia untuk memasukkan wilayah Irian Barat menjadi bagian dari Indonesia.¹⁷⁸

¹⁷⁷ Surat Pernyataan Bersama Indonesia – Hongaria pada Peristiwa Kundjungan Presiden Republik Indonesia Dr. Soekarno ke Republik Rakjat Hongaria, Tahun 1960.

¹⁷⁸ Surat Pernyataan Bersama Indonesia-Guinea Pada Peristiwa Kundjungan P.J.M Presiden Republik Indonesia, DR. Sukarno, ke Republik Guinea, Tahun 1960.

- f. Tanggal 13 Mei 1960, pemerintah Indonesia melakukan kunjungan kenegaraan ke negara Cuba yang berlangsung dari tanggal 9-14 Mei 1960. Pada kunjungan kenegaraan tersebut, kedua negara tersebut telah membuat beberapa kesepakatan yakni sebuah pernyataan bersama dan sebuah persetujuan kerja sama kebudayaan yang dimana kedua kesepakatan tersebut masing-masing ditanda tangani pada tanggal yang sama yakni pada tanggal 13 Mei 1960. Dimana dalam kedua kesepakatan bersama tersebut terkhusus pada pernyataan bersama tersebut, pemerintah Indonesia dan pemerintah Cuba sepakat terkait penghapusan segala bentuk dari Kolonialisme yang masih terjadi serta kedua negara tersebut memberikan dukungan terhadap negara-negara yang sedang memperjuangkan hak-hak mereka. Sedangkan dalam persetujuan kerja samanya, kedua negara tersebut sepakat untuk mengadakan kunjungan tenaga pengajar dengan tujuan untuk bertukar pengalaman.¹⁷⁹
- g. Tanggal 17 Agustus 1960, hubungan diplomatik antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Belanda secara resmi diputuskan oleh pemerintah Indonesia, hal ini dikarenakan sikap pemerintah Belanda yang masih tetap menolak atau bahkan membicarakan masalah Irian Barat.¹⁸⁰

¹⁷⁹ Surat Pernyataan Bersama dan Persetujuan Kerdja Sama Antara Republic Indonesia dan Republic Cuba, Tahun 1960.

¹⁸⁰ Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Loc.Cit.*, Hlm 439.

h. Tanggal 30 September 1960, Presiden Soekarno menyampaikan pidatonya yang berjudul *To Build The World A New* atau Membangun Dunia Baru di dalam sidang umum ke-15 PBB.¹⁸¹ Dimana dalam pidatonya tersebut, Presiden Soekarno menentang adanya Imperialisme dan Kolonialisme karena kedua hal tersebut merupakan sebuah ancaman terhadap terciptanya perdamaian dunia. Hal ini sesuai dengan salah satu dari isi pidato tersebut, yakni:

“oposisi kami terhadap kolonialisme dan imperialisme timbul baik dari hati maupun dari kepala kami. Kami menentangnya pula dengan alasan bahwa hal ini merupakan suatu ancaman yang besar dan makin besar lagi terhadap perdamaian”¹⁸².

Selain dari pada itu, dalam pidatonya Presiden Soekarno juga menawarkan Pancasila sebagai suatu konsep yang dapat digunakan sebagai dasar dalam piagam Peserikatan Bangsa-Bangsa,¹⁸³ serta dalam pidato itu juga Presiden Soekarno menyapaikan permasalahan yang dialami oleh pemerintah Indonesia dengan pemerintah Belanda terkait dengan Irian Barat yang belum juga terselesaikan.¹⁸⁴

Berdasarkan dari beberapa perkembangan diplomatik yang dialami oleh Indonesia pada tahun 1960, dapat dilihat dari beberapa negara yang menjadi tujuan kunjungan kenegaraan Indonesia sebagian besar memberikan dukungan terhadap pemerintah Indonesia terhadap usahanya

¹⁸¹ Sukarno, *Membangun Dunia Baru*(Bantul: Kreasi Wacana, 2013). Hlm v.

¹⁸² *Ibid.* Hlm 32.

¹⁸³ *Ibid.* Hlm 66.

¹⁸⁴ *Ibid.* Hlm 43.

untuk memasukkan Irian Barat dalam wilayah pemerintahan Republik Indonesia.

Selanjutnya memasuki tahun 1961 terkait dengan beberapa perkembangan diplomatik pada tahun sebelumnya, maka adapun yang menjadi perkembangan diplomatik dari pemerintahan Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Tanggal 27 Mei 1961, pemerintah Indonesia dan pemerintah Kerajaan Iran kembali melakukan penandatanganan perjanjian persahabatan untuk yang kedua kalinya dimana pada perjanjian persahabatan yang pertama pemerintah Indonesia diwakili oleh A. S. Bachmid yang hanya bersifat lima tahun,¹⁸⁵ sedangkan pada perjanjian persahabatan kedua diwakili oleh Ir. Juanda tidak ada batas waktu dalam perjanjian tersebut.¹⁸⁶
- b. Tanggal 29 Mei 1961, pemerintah Indonesia dengan pemerintah Cekoslowakia telah mempererat hubungan keduanya dengan melakukan penandatanganan perjanjian persahabatan dan kerjasama pada tanggal tersebut.¹⁸⁷ Dalam perjanjian tersebut, kedua negara telah sepakat dalam hal mempererat hubungan keduanya maka dipandang perlu

¹⁸⁵ Surat perjanjian persahabatan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Iran, Tahun 1958.

¹⁸⁶ Surat perjanjian persahabatan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Iran, Tahun 1961.

¹⁸⁷ Surat perjanjian persahabatan antara dan kerja sama antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Tjekoslovakia, Tahun 1961.

melakukan kerjasama dalam bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknik.¹⁸⁸

- c. Pemerintah Indonesia dan pemerintah Singapura telah membuat kesepakatan terkait hubungan perdagangan dan perekonomian kedua negara tersebut yang ditandatangani pada tanggal 29 Juni 1961, yang dimana pada penandatanganan perjanjian tersebut pemerintah Indonesia diwakili oleh Mr. Arifin Harahap sedangkan pemerintah Singapura diwakili oleh Dr. Goh Keng Swee.¹⁸⁹
- d. Tanggal 1 Juli 1961, pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Jepang mencoba mempererat hubungan keduanya dengan melakukan penandatanganan perjanjian persahabatan dan perdagangan pada tanggal tersebut. Dalam perjanjian tersebut, kedua belah pihak sepakat agar terciptanya kemajuan dalam bidang ekonomi maka dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknik perlu dikembangkan.¹⁹⁰
- e. Tanggal 23 Agustus 1961, pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Presiden Soekarno sendiri dan pemerintah Hongaria yang diwakili oleh Dr. Ferenc Munnich kembali telah membuat sebuah kesepakatan berupa perjanjian persahabatan dan

¹⁸⁸ Surat perjanjian persahabatan antara dan kerja sama antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Tjekoslovakia, Tahun 1961, Pasal 6.

¹⁸⁹ Surat Permufakatan-permufakatan Pokok Mengenai Hubungan Dagang dan Ekonomi Jang Disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Singapore, tahun 1961.

¹⁹⁰ Surat Perdjanjian Hubungan Keramahan dan Perniagaan antara Djepang dan Republik Indonesia, tahun 1961.

kerjasama yang kemudian ditanda tangani pada tanggal tersebut.¹⁹¹ Dimana dalam perjanjian tersebut, kedua negara sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

1. Pembebasan Irian Barat.

Selanjutnya memasuki tahun 1962, dimana pada tahun itu kondisi dalam negara Indonesia pasca pernyataan sikap yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia yang bernama *Tri Komando Rakyat* (Trikorra) pada tanggal 19 Desember 1961,¹⁹² untuk melakukan konfrontasi total terhadap Belanda. Maka dari pada itu, Presiden Soekarno sebagai panglima tertinggi dari komando pembebasan Irian Barat mengeluarkan sebuah keputusan yakni, Keputusan No. 1 Tahun 1962, tentang pembentukan Komando Mandala Pembebasan Irian Barat.¹⁹³ Dengan adanya keputusan yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno tentang pembentukan komando mandala, maka operasi penyusupan pun dilakukan oleh pasukan Indonesia yang kemudian membuahkan hasil dengan dikuasainya kota Teminabuan.

Terkait dengan adanya operasi militer yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap kedudukan Belanda di Irian Barat, maka pada tanggal 15 Januari 1962, terjadi sebuah insiden yang

¹⁹¹ Surat Perdjanjian Persahabatan dan Kerdjasama antara Republik Indonesia dan Republik Rakjat Hongaria, tahun 1961.

¹⁹² Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Loc.Cit.*, Hlm 440.

¹⁹³ *Ibid.* Hlm 441.

mengejutkan dimana pada tanggal tersebut, sebuah kapal patroli milik Indonesia tenggelam karena mendapatkan tembakan dari kapal perang Belanda. Dimana kejadian tersebut telah menewaskan pasukan angkatan laut Indonesia termasuk di dalamnya salah satu pembesar angkatan laut Indonesia yakni, Komodor Yos Sudarso.¹⁹⁴

Terkait dengan kejadian tersebut, Presiden Kennedy (Amerika Serikat) membujuk Presiden Soekarno untuk kembali melakukan pembicaraan dengan Belanda dan dengan PBB sebagai pengawasnya. Terkait dengan ajakan Presiden Kennedy, maka dari pada itu pada tanggal 20-22Maret 1962 dimulailah perundingan kembali antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Belanda yang diadakan di Middleburg Virginia,¹⁹⁵ yang dimana dalam perundingan tersebut pihak Amerika Serikat sebagai mediator yang berada di bawah pengawasan PBB dengan mengutus Ellsworth Bunker sebagai wakilnya. Akan tetapi pada perundingan pertama itu tidak mendapatkan sebuah penyelesaian dan hanya mengalami jalan buntu.

Terkait dengan belum adanya penyelesaian diantara kedua negara tersebut pada perundingan pertama, maka pada tanggal 13 Juli 1962 kembali diadakan perundingan.¹⁹⁶ Akan tetapi pada perundingan kedua tersebut lagi-lagi mendapatkan hambatan dalam

28. ¹⁹⁴ Beny Adrian, *52 Tahun Infiltrasi PGT di Irian Barat* (Jakarta: Gramedia, 2014). Hlm

¹⁹⁵ *Ibid.* Hlm 13.

¹⁹⁶ *Ibid.* Hlm 17.

mencapai sebuah kesepakatan terkait pemerintahan transisi di bawah PBB. Dimana pada waktu itu pihak Belanda menginginkan waktu yang lama terkait dengan jaminan kebebasan rakyat dalam menentukan pilihan kedepannya. Sedangkan dari pihak Indonesia menginginkan waktu yang singkat yakni pemerintahan transisi tersebut harus berakhir pada tanggal 1 Januari 1963.¹⁹⁷ Selain dari pada itu pihak Indonesia menuntut agar pasukan Indonesia yang berada di Irian Barat agar dibiarkan tetap di sana guna menjalankan tugasnya selama pemerintahan transisi berlangsung.

Berdasarkan tuntutan tersebut, pihak Belanda merasa keberatan. Akan tetapi sebagai balasan dari sikap keberatan pihak Belanda, pihak Indonesia mengancam untuk tidak melanjutkan kembali perundingan tersebut dan memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Terkait dengan hal itu, pihak Amerika Serikat pun membujuk pihak Indonesia agar bersikap dewasa. Dengan adanya bujukan yang dilakukan oleh pihak Amerika Serikat agar pihak Indonesia untuk tetap melakukan perundingan dengan pihak Belanda, maka pada tanggal 15 Agustus 1962 di New York,¹⁹⁸ antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Belanda diadakan penandatanganan sebuah perjanjian yang kemudian dikenal dengan nama *Perjanjian New York*. Adapun beberapa isi dari perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:

¹⁹⁷ Nuryani Soyomukti, *Loc.Cit.*, Hlm 85.

¹⁹⁸ Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Op.Cit.*, Hlm 441.

- a. Segera setelah Resolusi Majelis Umum PBB dikeluarkan, (pemerintah) Belanda akan mengalihkan pemerintahan kepada UNTEA (*United Nations Temporary Executive Authority* atau Otoritas Eksekutif Sementara PBB).
- b. UNTEA akan menentukan dimulainya proses peralihan pemerintahan kepada Indonesia sewaktu-waktu setelah Mei 1963.
- c. Pasukan Indonesia yang berada di Irian Barat akan berada di bawah kendali UNTEA.
- d. UNTEA boleh mendayagunakan para pejabat baik Indonesia dan Belanda.
- e. Satu tahun sebelum “penentuan pendapat rakyat” (Pepera) yang mesti dilaksanakan sebelum tahun 1969, Sekjen PBB akan menunjuk wakilnya dan staf untuk menasihati dan membantunya dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.
- f. Bendera Indonesia boleh dikibarkan di samping bendera PBB mulai Januari 1963.¹⁹⁹

Terkait dicapainya sebuah kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Belanda tentang Irian Barat di bawah pengawasan PBB, maka pada tanggal 1 Mei 1963, penyerahan atas Irian Barat dilakukan oleh UNTEA selaku pihak yang berwenang menengahi permasalahan tersebut. Selanjutnya setelah penyerahan yang dilakukan oleh UNTEA tepatnya pada tanggal 5 September 1963,²⁰⁰ Irian Barat dijadikan daerah karantina yang pada waktu itu pemerintah Indonesia melakukan pembubaran terhadap Dewan Papua dan melakukan pelarangan terhadap penggunaan bendera dan lagu kebangsaan Papua Barat atau Irian Barat.²⁰¹

¹⁹⁹ Nuryani Soyomukti, *Op. Cit.*, Hlm 85.

²⁰⁰ http://id.wikipedia.org/wiki/Operasi_Trikora (diakses pada tanggal 11, Februari 2015 pukul 11.15 Wita).

²⁰¹ *Ibid.*

2. Konfrontasi dengan Malaysia.

Pasca penyerahan Irian Barat, sebagai sebuah masalah internasional yang harus diselesaikan pemerintah Indonesia merupakan sebuah kemajuan yang telah dicapai pada waktu itu. Akan tetapi, permasalahan tersebut bukan merupakan satu-satunya permasalahan Negara Indonesia dengan negara-negara lain yang ada di dunia. Karena pasca pembebasan Irian Barat negara Indonesia kembali diperhadapkan kepada masalah internasional lainnya yang dimana kemudian berdampak terhadap keadaan dalam negeri Indonesia. dalam hal ini adapun yang menjadi permasalahan internasional yang mesti dihadapi pemerintah Indonesia, yakni pada waktu itu terjadi ketegangan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Malaysia yang kemudian berujung dengan adanya kontak senjata terhadap kedua negara tersebut.

Selanjutnya adapun yang menjadi awal mula dari permusuhan kedua negara ini, yakni adanya perbedaan ideologi politik antara kedua negara tersebut dimana Indonesia pada waktu itu cenderung anti-barat sedangkan Malaysia cenderung pro-barat. Selain dari pada itu, pada waktu itu pemerintah Indonesia juga mendapatkan tuduhan dari Tengku Abdul Rahman sebagai biang keladi dari pemberontakan yang dilakukan oleh Azahari di

Kalimantan Utara pada tanggal 8 Desember 1962,²⁰² yang pada waktu Azahari di Manila melakukan proklamasi dan mendeklarasikan dirinya sebagai seorang perdana menteri Kalimantan Utara dengan wilayah Brunai, Sarawak dan Sabah. Terkait dengan adanya tuduhan tersebut Ketua Umum PNI, Ali Sastroamidjojo memberikan reaksi dengan membantah tuduhan tersebut. Hal ini kemudian membuahkan kemarahan dari Tengku Abdul Rahman yang kemudian mengeluarkan pernyataan kepada Presiden Soekarno yakni, 'jangan campuri urusan Kalimantan Utara'.²⁰³

Selain dari pada itu, pembentukan negara Malaysia membuat Presiden Soekarno kembali merasa curiga, bahwa pembentukan negara tersebut merupakan usaha yang dilakukan kekuatan-keuatan Neokolonialisme untuk mengepung Indonesia. Dimana kecurigaan tersebut didasari pada pandangan Soekarno terhadap Indonesia sebagai sebuah Nefo akan dikepung oleh kekuatan negara Oldefo.²⁰⁴ Hal ini didasarkan pada posisi Indonesia sendiri yang dimana sebelah utaranya akan berbatasan dengan Malaysia, sedangkan sebelah selatannya akan berbatasan dengan Australia dan Selandia Baru.

²⁰² Efantino F dan Arifin SN, *Ganyang Malaysia* (Cet, I; Yogyakarta: Bio Pustaka, 2009). Hlm 38.

²⁰³ *Ibid.* Hlm 39.

²⁰⁴ *Ibid.*

Pada perkembangannya, hubungan kedua negara ini semakin memburuk yang dimana pada waktu itu yakni pada tanggal 30 Januari 1963, Kamaruddin Hj Idris selaku Dubes Malaya untuk Indonesia, untuk waktu yang tidak ditentukan dipanggil kembali oleh pemerintah Malaya.²⁰⁵ Dimana hal tersebut kemudian juga disusul dengan deklarasi Federasi Malaysia pada tanggal 16 September 1963.²⁰⁶ Sehari setelah pendeklarasian tersebut yakni pada tanggal 17 September 1963, pemerintah Indonesia juga pada waktu itu mengambil sebuah tindakan yakni pemutusan hubungan diplomatik dengan negara Malaya.²⁰⁷ Pemutusan hubungan diplomatik ini merupakan bentuk dari ketidak senangan pemerintah Indonesia terkait dengan pembentukan Federasi Malaysia.

Selain dari pada itu, bentuk ketidak senangan terkait dengan pembentukan Federasi Malaysia juga direspon oleh masyarakat Indonesia, yang dimana pada waktu itu terjadi demonstrasi yang berujung pada pembakaran gedung kedutaan Inggris dan Malaya di Indonesia.²⁰⁸ Terkait dengan adanya reaksi dari masyarakat Indonesia tersebut, maka masyarakat Malaysia pun melakukan aksi balasan yakni juga dengan melakukan demonstrasi dan aksi pengerusakan terhadap KBRI (Kedutaan Besar Republik

²⁰⁵ Linda Sunarti, *Persaudaraan Sepanjang Hayat* (Cet, I; Serpong Utara: Serat Alam Media, 2014). Hlm 96.

²⁰⁶ *Ibid.* Hlm 99.

²⁰⁷ Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Loc. Cit.*, Hlm 463.

²⁰⁸ Linda Sunarti, *Op. Cit.*, Hlm 99.

Indonesia) yang berada di sana,²⁰⁹ dengan merobek-robek foto Presiden Soekarno dan membawa lambang Garuda, kemudian memaksa Tengku Abdul Rahman untuk menginjak-injaknya.²¹⁰ Hal yang dilakukan oleh Tengku Abdul Rahman pada waktu itu membuat Presiden Indonesia menjadi marah, yang kemudian berujung dengan dikeluarkannya gerakan yang dikenal dengan nama “Ganyang Malaysia”.²¹¹

Sehubungan dengan hal itu, konfrontasi fisik oleh kedua negara ini pada waktu sudah tidak dapat dihindarkan lagi. Pemerintah Indonesia pada waktu itu dalam sebuah rapat yakni pada tanggal 3 Mei 1964, mengumumkan sebuah perintah yang dikenal dengan nama Dwikora (Dwi Komando Rakyat).²¹² Dimana pada perkembangan selanjutnya pasca pengumuman perintah Dwikora tersebut, pemerintah Indonesia kemudian melakukan Infiltrasi yang lebih luas terhadap wilayah Malaysia, yakni dengan melakukan pendaratan pasukan di wilayah Malaysia seperti di Johor pada tanggal 17 Agustus 1964, serta pendaratan kedua yakni pada tanggal 2 September 1964 di Labis dan Johor.²¹³

Terkait dengan makin meningkatnya ketegangan kedua negara tersebut, yang dimana terjadinya konfrontasi fisik sudah tidak dapat terhindarkan lagi terkait pengiriman pasukan yang

²⁰⁹ *Ibid.*

²¹⁰ Efantino F dan Arifin SN, *Loc. Cit.*, Hlm 45.

²¹¹ *Ibid.*

²¹² Linda Sunarti, *Op. Cit.*, Hlm 100.

²¹³ *Ibid.*

dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk melakukan infiltrasi di wilayah Malaysia, kembali membuat PBB turun tangan untuk meredakan ketegangan kedua negara tersebut. Adapun hal yang dilakukan oleh PBB pada waktu itu yakni mendesak kepada kedua negara untuk menyelesaikan konfliknya dalam meja perundingan. Maka dari pada itu, PBB pun menunjuk Thailand sebagai tuan rumah dari perundingan kedua negara tersebut.²¹⁴

Akan tetapi perundingan yang diadakan di Bangkok, Thailand tersebut kembali tidak menemukan kata sepakat dalam penyelesaian konflik tersebut. Hal ini dikarenakan usul yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia terkait dengan pengiriman makanan untuk pasukan Indonesia yang berada di wilayah Malaysia ditolak oleh pemerintah Malaysia.²¹⁵ Pasca konferensi yang dilakukan oleh kedua negara tersebut di Bangkok mengalami kegagalan, maka ketegangan di wilayah Malaysia kembali terjadi. Hal ini membuat kembali PBB mendesak kedua negara tersebut untuk menyelesaikan masalahnya sekali lagi dalam meja perundingan. Dimana pada perundingan kedua ini PBB menunjuk Tokyo, Jepang sebagai tuan rumah dalam perundingan tersebut.²¹⁶

Selanjutnya, dijadikannya Tokyo sebagai tempat perundingan kedua negara yang sedang berkonfrontasi ini masih saja mengalami kegagalan. Lagi-lagi hal tersebut dikarenakan

²¹⁴ Efantino F dan Arifin SN, *Op.Cit.*, Hlm 56.

²¹⁵ *Ibid.*

²¹⁶ *Ibid.* Hlm 56-57.

kedua negara yang sedang berkonfrontasi ini masih saja mempertahankan tuntutananya. Akan tetapi pada perkembangannya upaya untuk mengakhiri konfrontasi tidak hanya muncul dari PBB saja melainkan, pada waktu itu bermunculanlah penjajak rujuk dari kedua negara.

Seperti halnya yang dilakukan oleh dua tokoh Malaysia pada waktu itu yakni, Ghazali Shafie dan Tun Abdul Razak yang coba membangun komunikasi dengan Indonesia. Khususnya orang-orang yang mempunyai keinginan yang sama dengan mereka yakni menghentikan konflik yang terjadi antara Indonesia dengan Malaysia.²¹⁷ Ternyata hal yang serupa juga terjadi di dalam negeri Indonesia. Dimana pada waktu itu terdapat juga orang-orang yang mencoba mencari jalan damai dari konflik yang terjadi tersebut. Dalam negeri Indonesia sendiri hal tersebut dilakukan oleh Ahmad Yani beserta Mayjen Soeharto. Dimana kedua orang tersebut mencoba melakukan kontak dengan orang yang berada di Malaysia yang juga memiliki keinginan yang sama.

Usaha yang dilakaukan Ahmad Yani dan Mayjen Soeharto pun membuahkan hasil dengan bantuan seorang pelarian politik Indonesia yang memiliki hubungan dengan Tun Razak yang bernama Des Alwi.²¹⁸ Terkait dengan adanya usaha yang dilakukan oleh orang-orang yang menginginkan berakhirnya

²¹⁷ Linda Sunarti, *Op.Cit.*, Hlm 190.

²¹⁸ *Ibid.* Hlm 197.

konfrontasi diantara kedua negara tersebut, telah mencapai sebuah kemajuan dimana orang-orang dari perwakilan kedua negara tersebut telah melakukan beberapa pertemuan di Bangkok yakni pada bulan April 1965, di Hotel Amarin dan pada bulan Juli 1965, di Hotel Errawan.²¹⁹

Akan tetapi pada perkembangannya, komunikasi rahasia perwakilan kedua negara ini sempat terhenti. Hal ini dikarenakan kondisi dalam negeri Indonesia mengalami kekacauan yang dimana terjadi pembunuhan terhadap pemimpin-pemimpin AD yang dilakukan oleh PKI beserta pengikutnya.²²⁰ Pada dasarnya kekacauan dalam negeri pada waktu itu juga memberikan dampak terhadap penyelesaian konflik antara Indonesia dan Malaysia. Hal ini dikarenakan pasca terjadinya pemberontakan yang dilakukan oleh PKI beserta pengikutnya membuat keamanan nasional menjadi terganggu. Dimana pada waktu itu terjadi demonstrasi-demonstrasi yang menuntut tiga tuntutan kepada pemimpin Indonesia atau yang dikenal dengan TRITURA.²²¹

Terkait dengan tidak stabilnya keamanan nasional pada waktu itu, kemudian dimanfaatkan oleh Soeharto yang telah berpangkat panglima AD pada waktu itu, dalam mendesak Presiden Soekarno agar segera mengeluarkan surat perintah untuk menjaga keamanan jalannya pemerintahan. Adanya desakan

²¹⁹ *Ibid.* Hlm 202-203.

²²⁰ Efantino F dan Arifin SN, *Op.Cit.*, Hlm 70-75.

²²¹ *Ibid.* Hlm 80.

tersebut, akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah tertanggal 11 Maret 1966 atau yang dikenal dengan nama Supersemar, kepada Soeharto.²²² Sehubungan dengan dikeluarkannya surat perintah tersebut membawa dampak terhadap makin melemahnya pengaruh kepemimpinan Presiden Soekarno di dalam negeri. Dimana hal yang sebaliknya terjadi pada Soeharto, berkat adanya surat perintah tersebut, telah menguatkan posisinya di dalam negeri.

Sehubungan dengan melemahnya pengaruh kepemimpinan Presiden Soekarno di dalam negeri kemudian dimanfaatkan oleh Tun Abdul Razak selaku menteri luar negeri Malaysia untuk memperbaiki hubungan Indonesia dan Malaysia yang telah rusak. Maka dari pada itu pada tanggal 27 Mei 1966, Soeharto dan pemimpin Malaysia yakni Tengku Abdul Rahman kembali mengadakan pertemuan di Jakarta.²²³ Dimana pertemuan tersebut kemudian dilanjutkan dengan pertemuan lanjutan pada tanggal 29 Mei-1 Juni 1966, di Bangkok.²²⁴ Adapun hasil dari pertemuan tersebut adalah:

- a. Rakyat Sabah diberi kesempatan menegaskan kembali keputusan yang telah mereka ambil mengenai kedudukan mereka dalam Federasi Malaysia.
- b. Pemerintah kedua belah pihak menyetujui pemulihan hubungan diplomatik.

²²² *Ibid.* Hlm 83.

²²³ *Ibid.* Hlm 85.

²²⁴ *Ibid.*

- c. Tindakan permusuhan antara kedua belah pihak akan dihentikan.²²⁵

Maka dari pada itu, akhirnya pada tanggal 11 Agustus 1966, hasil pertemuan tersebut kemudian ditanda tangani. Maka dengan ini konflik antara Indonesia dengan Malaysia telah berakhir.²²⁶

²²⁵ *Ibid.* Hlm 86.

²²⁶ *Ibid.*

BAB IV
DAMPAK PELAKSANAAN POLITIK LUAR NEGERI BEBAS AKTIF
TERHADAP INDONESIA DAN DUNIA PADA UMUMNYA

A. Keadaan Politik Dalam Negeri

Membahas mengenai keadaan politik Indonesia pada era kepemimpinan Presiden Soekarno, tidak bisa dilepaskan terhadap dua model pemerintahan yang dijalankan pada waktu itu yakni Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin.²²⁷ Demokrasi Liberal sendiri merupakan sebuah sistem pemerintahan yang di mana kepala pemerintahannya dipimpin oleh perdana menteri sedangkan presiden hanya bertanggung jawab sebagai kepala negara. Sedangkan Demokrasi Terpimpin merupakan sistem pemerintahan yang di mana kepala pemerintahan sekaligus kepala negara dipegang oleh seorang presiden.

Terkait dengan hal tersebut, yang dimana demokrasi liberal merupakan sistem pemerintahan pertama yang digunakan oleh pemerintah Indonesia pasca mendapatkan kedaulatannya. Ternyata belum mampu memberikan solusi dari masalah-masalah dalam negeri yang terjadi pada waktu itu.²²⁸ Hal ini dapat dibuktikan dengan silih bergantinya kabinet yang memimpin pada waktu itu dengan masa jabatan yang tidak begitu lama. Hal tersebut dapat dilihat pada bab sebelumnya dimana terdapat tujuh kali

²²⁷ Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia VI (rev.ed.)*; Jakarta: Balai Pustaka, 2010). Hlm 301-425

²²⁸ Adapun beberapa permasalahan dalam negeri yang dimaksud dalam hal ini diantaranya yakni, adanya sikap kritis dari setiap anggota parlemen pada waktu itu sehingga menimbulkan perdebatan yang tidak berkesudahan. Dimana hal tersebut didukung oleh menguatnya kedudukan partai politik pada waktu itu. Selanjutnya, ketidak mampuan dewan konstituante dalam merumuskan undang-undang yang baru sehingga hal tersebut mendorong Presiden Soekarno untuk mengeluarkan Dekret ^{CVI} 1959 yang menentukan berlakunya kembali UUD 1945. Lihat, Adi Sudirman, *Sejarah Lengkap Indonesia* (Jogjakarta: Diva Press, 2014). Hlm 369-370.

pergantian kabinet hingga dihapuskannya model pemerintahan tersebut dan digantikan dengan model pemerintah yang bernama demokrasi terpimpin.

Akan tetapi pada masa ini (demokrasi liberal) pemerintah Indonesia pada waktu itu telah berhasil melakukan pemilihan umum untuk yang pertama kalinya yakni pada tahun 1955. Keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan pemilihan umum yang pertama pada waktu itu tidak bisa terlepas dari usaha yang dilakukan dibawah pemerintahan kabinet Burhanuddin Harahap.

Pemilihan umum pertama pada waktu itu dilakukan dalam dua tahap yakni tahap pertama pada tanggal 22 September 1955.²²⁹ Dalam hal ini, pemilihan tersebut merupakan pemilihan umum untuk menentukan anggota dewan perwakilan rakyat. Sedangkan tahap kedua merupakan pemilihan untuk Konstituante yang dilakukan pada tanggal 15 Desember 1955.²³⁰

Secara keseluruhan terkait dengan sistem pemerintahan demokrasi liberal yang pernah dijalankan oleh pemerintah Indonesia pada waktu itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Dalam hal ini adapun yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari sistem pemerintahan demokrasi liberal yang diterapkan pada waktu itu adalah:

1. Kelebihan Demokrasi Liberal

²²⁹ Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, , *Op.Cit.*, Hlm 317.

²³⁰ *Ibid.* Hlm 321.

- a. Pembuat kebijakan dapat ditanagani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislative. Hal ini karena kekuasaan eksekutif dan legislatif berada pada satu partai atau satu koalisi partai.
 - b. Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan public jelas.
 - c. Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan.
 - d. HAM dipegang teguh dan dijunjung tinggi oleh negara.
2. Kelemahan Demokrasi Liberal
- a. Kedudukan badan eksekutif/kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen. Sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen.
 - b. Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tidak bisa di tentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya. Sebab, sewaktu-waktu kabinet dapat bubar.
 - c. Kabinet dapat mengendalikan parlemen. Hal itu terjadi apabila para anggota kabinet adalah anggota parlemen dimanfaatkan dan menjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya.
 - d. Multipartai, yang mengakibatkan aspirasi belum tersalurkan seluruhnya dengan baik.

- e. Kebebasan mengeluarkan pendapat yang terlalu bebas, sehingga tidak ada pertanggung jawabannya.²³¹

Berdasarkan apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari sistem pemerintahan demokrasi liberal, sehingga memunculkan beberapa permasalahan yang berujung pada gagalnya sistem pemerintahan tersebut di pertahankan di Indonesia. Jadi adapun yang menjadi kegagalan dari sistem pemerintahan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Dominannya politik aliran. Artinya , berbagai golongan politik dan partai politik sangat mementingkan kelompok atau alirannya sendiri daripada mengutamakan kepentingan bangsa.
- b. Landasan sosial ekonomi rakyat yang masih rendah.
- c. Tidak mempunyai para anggota konstituante bersidang dalam menetapkan dasar negara sehingga keadaan menjadi berlarut-larut.
- d. Instabilitas negara karena terlalu sering terjadi pergantian kabinet. Hal ini menjadikan pemerintah tidak berjalan secara efisien. Sehingga, perekonomian Indonesia sering jatuh dan terinflasi.
- e. Timbul berbagai masalah keamanan dalam negeri, yaitu terjadi pemberontakan hamper di seluruh wilayah Indonesia, seperti gerakan DI/TII, gerakan Andi Azis, gerakan APRA, dan gerakan RMS akibat ketidak stabilan pemerintahan.

²³¹ Adi Sudirman, *Op.Cit.*, Hlm 382-383.

- f. Sering terjadi konflik dengan pihak militer, seperti pada peristiwa 17 oktober 1952.
- g. Mundurnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah akibat lemahnya sistem pemerintahan.
- h. Seringnya terjadi konflik antar partai politik dalam pemerintahan untuk mendapatkan kekuasaan.
- i. Praktik korupsi meluas. Pada masa ini, tindak pidana korupsi tidak bisa ditangani karena oknum partai maupun pemerintahan tidak luput dari melakukan korupsi.
- j. Kesejahteraan rakyat terbengkalai karena pemerintah hanya terfokus pada pengembangan bidang politik bukan pada ekonomi.²³²

Banyaknya permasalahan yang terjadi terkait penerapan sistem pemerintahan demokrasi liberal di Indonesia pada waktu itu. membuat pemimpin negara waktu itu yakni, Presiden Soekarno mengambil sebuah kebijakan dengan mengeluarkan Dekrit Presiden yang disusun pada tanggal 5 Juli 1959.²³³ Dimana dalam Dekrit tersebut terdapat tiga inti pokok penyampaian presiden pada waktu itu yakni:

1. Pembubaran Konstituante.
2. Berlakunya kembali UUD 1945

²³² *Ibid.* Hlm 383-384.

²³³ Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Op.Cit.*, Hlm 381.

3. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan pembentukan Dewan Pertimbangan Agung.²³⁴

Terkait dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1955 yang merupakan sebuah usaha yang dilakukan oleh Presiden Soekarno dalam mengatasi berbagai masalah yang terjadi di dalam negeri pada waktu itu. Selain dari pada itu, pemberlakuan Dekrit tersebut menandai berakhirnya sistem pemerintahan demokrasi liberal.

Berakhirnya sistem pemerintahan demokrasi liberal pada waktu yang dianggap memiliki banyak kegagalan. Maka langkah yang dilakukan pemerintah pada waktu itu menerapkan sistem pemerintahan yang dikenal dengan nama Demokrasi Terpimpin. Demokrasi Terpimpin sendiri merupakan sebuah sistem pemerintahan yang dimana pemimpin negara merupakan sebuah pusat dari segala keputusan dan pemikiran.

Selanjutnya, dalam hal ini adapun yang menjadi pokok dari sistem Demokrasi Terpimpin terkait pemaparan Presiden Soekarno pada tanggal 22 April 1959 adalah:

1. Demokrasi Terpimpin bukanlah diktator
2. Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi yang cocok dengan keberibadian dan dasar hidup bangsa Indonesia.
3. Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi di segala soal kenegaraan dan kemasyarakatan yang meliputi bidang politik, ekonomi dan sosial.

²³⁴ *Ibid.* Hlm 385.

4. Inti dari pada Demokrasi Terpimpin adalah permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
5. Oposisi dalam arti melahirkan pendapat sejati yang membangun diharuskan dalam Demokrasi Terpimpin.

Selanjutnya terkait bagaimana penggambaran mengenai keadaan politik dalam negeri pada masa diterapkannya sistem pemerintahan demokrasi terpimpin yang memberikan karakteristik pada waktu adalah:

1. Mengaburnya sistem kepartaiaan. Kehadiran partai-partai politik bukan untuk mempersiapkan diri dalam kerangka kontestasi politik untuk mengisi jabatan politik di pemerintahan, tetapi merupakan elemen penopang dari tarik tambang antara Presiden Soekarno, Angkatan Darat, dan PKI.
2. Masa Demokrasi Terpimpin merupakan puncak dari semangat anti-kebebasan pers. Sejumlah surat kabar dan majalah dibrangus oleh Soekarno, seperti harian Abadi dari Masyumi dan Pedoman dari PSI.
3. *Basic Human Rights* menjadi sangat lemah. Soekarno dengan mudah menyingkirkan lawan-lawan politik yang tidak sesuai dengan kebijaksanaannya atau yang mempunyai keberanian untuk menentangnya.
4. Dengan terbentuknya DPR-GR peranan lembaga legislatif dalam politik nasional menjadi sangat lemah. Proses

rekrutmen politik untuk lembaga ini pun ditentukan oleh presiden.

5. Sentralisasi kekuasaan menjadi sangat dominan dalam proses hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Daerah-daerah memiliki otonomi yang sangat terbatas. UU tentang Otonomi Daerah No. 1/1957 digantikan dengan penetapan Presiden, yang kemudian dikembangkan menjadi UU No. 18 Tahun 1965.²³⁵

Demikianlah kondisi politik dalam negeri pada era pemerintahan Soekarno, dimana pada masa awal pasca pengakuan kedaulatan. Pemerintah Indonesia menggunakan sistem pemerintahan Demokrasi Liberal, yang mana di dalamnya terdapat banyak permasalahan yang timbul dari penerapan sistem pemerintahan tersebut. Dalam hal ini salah satu dampak nyatanya adalah banyaknya kabinet yang memerintah dengan masa jabatan yang relative singkat.

Selanjutnya, pasca dikeluarkannya Dekrit 5 Juli 1955, sistem pemerintahan dalam negeri Indonesia pun mulai berubah. Dalam hal ini, salah satu dampak nyata dari perubahan tersebut adalah, di mana pada era Demokrasi Liberal kedudukan presiden hanya sebagai kepala negara saja. Hal ini sangat berbeda setelah diterapkannya sistem pemerintahan Demokrasi Terpimpin. Dalam hal ini, pada era Demokrasi Terpimpin

²³⁵ Adi Sudirman, *Op.Cit.*, Hlm 387-394.

jabatan kepala negara dan kepala pemerintahan itu berada di tangan seorang presiden.

B. Hubungan Indonesia dengan Blok Barat

Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, terkait kondisi dunia internasional pada waktu itu yang terbagi dalam dua kekuatan besar yakni Blok Barat dan Blok Timur. Dimana kedua blok besar tersebut mencoba menanamkan pengaruhnya terhadap negara-negara lain, yang di mana usaha yang dilakukan kedua blok tersebut agar negara-negara yang belum tergabung ke dalam salah satu blok tersebut mau dan ikut serta ke dalamnya.

Akan tetapi, Indonesia sebagai sebuah negara baru pada waktu itu mencoba untuk tidak mengambil bagian dalam perseteruan kedua blok besar tersebut. Dalam hal ini, prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif merupakan sebuah langkah yang ditempuh pemerintah Indonesia dalam memasuki dunia Internasional dan juga sebagai sebuah cara yang ditempuh untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam negeri terkhusus pada perlunya untuk meminta bantuan kepada negara lain.

Terkait dengan hubungan diplomatik yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pasca penyerahan kedaulatan dikhususkan untuk menjalin hubungan baik dengan pemerintah Belanda yang juga merupakan anggota dari salah satu blok besar yang ada pada waktu itu yakni Blok Barat. Hal tersebut bukannya tidak mempunyai sebuah alasan, melainkan terdapat sebuah alasan yang kuat mengapa hal tersebut mesti dilakukan.

Menjalin hubungan baik dengan pemerintah Belanda merupakan suatu cara yang ditempuh oleh pemerintah Indonesia terkait keinginan pemerintah pada waktu itu yang menginginkan agar kiranya Irian Barat dapat dijadikan menjadi bagian dari NKRI.

Mengingat juga bahwa dalam KMB yang pernah diadakan di Den Haag, akan ada pembicaraan kembali antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Belanda terkait masalah Irian Barat. Perundingan-perundingan pun mulai dilakukan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Belanda untuk membicarakan kembali masalah Irian Barat tersebut. Dalam hal ini usaha yang dilkakukan oleh pemerintah Indonesia akhirnya menuai hasil, di mana pada tanggal 15 Agustus 1962 di New York,²³⁶ antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Belanda melakukan penandatanganan perjanjian yang dikenal dengan nama *Perjanjian New York*. Adapun beberapa isi dari perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Segera setelah Resolusi Majelis Umum PBB dikeluarkan, (pemerintah) Belanda akan mengalihkan pemerintahan kepada UNTEA (*United Nations Temporary Executive Authority* atau Otoritas Eksekutif Sementara PBB).
- b. UNTEA akan menentukan dimulainya proses peralihan pemerintahan kepada Indonesia sewaktu-waktu setelah Mei 1963.

²³⁶ Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Op.Cit.*, Hlm 441.

- c. Pasukan Indonesia yang berada di Irian Barat akan berada di bawah kendali UNTEA.
- d. UNTEA boleh mendayagunakan para pejabat baik Indonesia dan Belanda.
- e. Satu tahun sebelum “penentuan pendapat rakyat” (Pepera) yang mesti dilaksanakan sebelum tahun 1969, Sekjen PBB akan menunjuk wakilnya dan staf untuk menasihati dan membantunya dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.
- f. Bendera Indonesia boleh dikibarkan di samping bendera PBB mulai Januari 1963.²³⁷

Terkait dengan adanya penandatanganan perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Belanda pada waktu itu, merupakan sebuah keberhasilan dari pemerintah Indonesia khususnya dalam bidang diplomasi. Ada satu hal yang tidak bisa dipungkiri di balik keberhasilan pemerintah Indonesia untuk menjadikan Irian Barat sebagai satu bagian dalam NKRI. Dalam hal ini keberhasilan tersebut tercapai karena adanya campur tangan negara lain yakni Amerika Serikat.

Turut sertanya Amerika Serikat dalam masalah Indonesia tidak terlepas dari kedekatan kedua pemimpin negara tersebut. Kedekatan tersebut dapat dilihat dari usaha yang dilakukan Presiden Kennedy (Amerika Serikat) dalam membujuk Presiden Soekarno agar melakukan perundingan dengan pemerintah Belanda terkait masalah Irian Barat.

²³⁷ Nuryani Soyomukti, *Soekarno & Cina* (Yogyakarta: Garasi, 2012). Hlm 85.

Selain dari pada itu kedekatan kedua negara tersebut dibuktikan juga dengan adanya bantuan dari pemerintah Amerika Serikat kepada pemerintah Indonesia sebesar US\$ 372 Juta.²³⁸

Sebenarnya apa yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat pada waktu itu yakni Presiden Kennedy, dalam hal ini turut serta dalam penyelesaian masalah Irian Barat antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Belanda. Bukannya tanpa alasan, melainkan di dalamnya terdapat alasan kuat bagi pemerintah Amerika Serikat pada waktu itu. Dalam hal ini, usaha yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat pada waktu itu dalam hal membantu penyelesaian masalah Irian Barat. Nampaknya mengarah kepada usaha untuk menjauhkan pemerintah Indonesia agar tidak terlalu dekat dengan Uni Soviet. Karena jika hal tersebut terjadi akan mempengaruhi perimbangan kekuatan politik di kawasan Asia Tenggara.

C. Hubungan Indonesia dengan Blok Timur

Seperti halnya dengan negara-negara yang menjadi anggota dari Blok Barat. Pemerintah Indonesia juga menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara yang menjadi anggota dari Blok Timur. Dimana hal tersebut tidak bisa dipungkiri mengingat prinsip politik luar negeri yang dijalankan pemerintah Indonesia adalah politik luar negeri yang bebas dan

²³⁸ *Ibid.* Hlm 80.

aktif. Tanpa harus terikat pada salah satu kekuatan besar yang ada di dunia pada waktu itu merupakan perwujudan dari prinsip politik luar negeri yang dijalankan.

Hubungan diplomatik yang baik antara pemerintah Indonesia dengan negara-negara yang menjadi anggota dari Blok Timur pada waktu itu, dapat dilihat dari adanya bantuan-bantuan yang diberikan kepada pemerintah Indonesia. Dimana dalam hal ini adapun negara yang menjadi anggota dari Blok Timur yang telah menjalin hubungan diplomatik dengan pemerintah Indonesia pada waktu itu yakni, Uni Soviet, Bulgaria, Cekoslowakia, Hongaria, Polandia dan Romania.

Seperti dalam pembahasan sebelumnya, dimana negara-negara anggota Blok Timur tersebut dengan pemerintah Indonesia mencoba mempererat hubungan diplomatiknya dengan melakukan penandatanganan surat-surat perjanjian. Dimana hal tersebut merupakan sebuah bukti keseriusan dari pemerintah Indonesia kepada negara-negara Blok Timur tersebut dalam menjalin hubungan diplomatik. Dalam perkembangan hubungan diplomatik antara pemerintah Indonesia dengan negara-negara anggota Blok Timur. Pada waktu itu, sedikit banyaknya pemerintah Indonesia telah mendapatkan bantuan dari negara anggota Blok Timur tersebut.

Terkhusus dalam hal ini dengan negara Uni Soviet, dimana pemerintah Uni Soviet pada waktu itu. Telah memberikan banyak bantuan kepada pemerintah Indonesia dalam hal ini baik dalam membangun bidang

ekonomi maupun dalam bidang militer. Dalam hal ini, untuk membangun bidang perekonomian Indonesia pada waktu itu, pemerintah Uni Soviet telah memberikan bantuan sebesar US\$ 200 Juta sedangkan dalam bidang militer bantuan yang diberikan pada waktu itu sebesar US\$ 100 Juta. Selain dari pada itu, pemerintah Uni Soviet juga memberikan bantuan kepada pemerintah Indonesia dengan mengirimkan 400 orang ahli ekonomi dan teknisi militer.²³⁹

Bantuan yang diberikan oleh pemerintah Uni Soviet kepada pemerintah Indonesia tidak hanya itu, melainkan juga mendapatkan bantuan teknis dan kredit setelah melakukan penandatanganan protocol pada tanggal 14 Agustus 1959 sebesar US\$ 117,5 juta.²⁴⁰ Hubungan antara pemerintah Uni Soviet dengan pemerintah Indonesia juga semakin menunjukkan kedekatannya dengan adanya bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah Uni Soviet terhadap pemerintah Indonesia. Semakin dekatnya hubungan kedua negara tersebut membuat perdana menteri Uni Soviet harus memenuhi undangan Presiden Soekarno.

Terkait kunjungan yang dilakukan perdana menteri Uni Soviet atas undangan Presiden Soekarno, Nikita Khrushchev ke Indonesia pada tanggal 18 Februari 1960.²⁴¹ Merupakan bukti bahwa kedua negara tersebut telah menjalin hubungan diplomatik yang dekat. Apa lagi pada waktu itu untuk memperkuat sistem pertahanan dalam negeri. Pemerintah Indonesia pada waktu itu mengambil sebuah langkah yakni dengan

²³⁹ *Ibid.* Hlm 79.

²⁴⁰ *Ibid.*

²⁴¹ *Ibid.* Hlm 79-80.

melakukan pembelian senjata kepada negara-negara lain. Hal ini dilakukan, mengingat bahwa negara Indonesia pada waktu itu belumlah mampu untuk memperkuat sistem pertahanannya sendiri. Sehingga langkah yang dibuat pemerintah pada waktu itu hanya melakukan pembelian senjata. Maka dari pada itu, pemerintah Indonesia memrintahkan Nasution untuk melakukan pembelian persenjataan di Uni Soviet.²⁴²

Masih pada tahun yang sama, dalam hal ini dimana pada waktu itu telah tercapai sebuah kesepakatan kerja antara kedua negara tersebut, dimana dalam hal ini pemerintah Uni Soviet yang diwakili oleh perdana menteri telah menjajikan kepada pemerintah Indonesia untuk memberikan bantuan yang jumlahnya mencapai US\$ 259 Juta.²⁴³

Sama halnya dengan Uni Soviet, hubungan diplomatik pemerintah Indonesia dengan negara yang tergabung dalam Blok Timur telah mengarah kepada terciptanya sebuah hubungan diplomatik yang erat. Dimana hubungan diplomatik itu terwujud dengan adanya penandatanganan surat-surat perjanjian. Baik berupa perjanjian persahabatan, perjanjian kerja sama dan sampai kepada pernyataan bersama antar dua negara.

Kedekatan pemerintah Indonesia dengan negara-negara yang tergabung dalam Blok Timur bukanlah merupakan suatu tindakan keberpihakan terhadap blok tersebut, melainkan merupakan bentuk dari

²⁴² Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Op.Cit.*, Hlm 440.

²⁴³ Nuryani Soyomukti , *Op.Cit.*, Hlm 79-80.

perwujudan sikap politik luar negeri yang dijalankan pemerintah Indonesia pada waktu itu. Begitu pun dengan kedekatannya dengan negara-negara yang tergabung dalam Blok Barat. Dimana lahirnya sikap politik yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia pada waktu itu tidak terlepas dari kondisi internasional serta kondisi dalam negeri Indonesia sendiri.

D. Indonesia Menjadi Pelopor Gerakan Non Blok

Gerakan Non Blok merupakan sebuah gerakan yang menghimpun beberapa negara yang memiliki kesepahaman terkait ketidak berpihakan terhadap dua kekuatan besar pada waktu itu serta tidak terlibat dalam satu pakta pertahanan militer. Keberadaan gerakan ini merupakan sebuah usaha yang dilakukan oleh beberapa negara yang dimana ditujukan untuk mengurangi ketegangan yang terjadi antara dua kekuatan besar tersebut. Serta mencoba menjadi penengah diantara dua kekuatan besar tersebut sehingga dapat terwujud hubungan yang harmonis antara Moskow dan Washinton.

Jika ditinjau Gerakan Non Blok sendiri merupakan kelanjutan dari Konferensi Asia-Afrika yang pernah dilaksanakan di Bandung pada tanggal 18 April 1955. Akan tetapi yang menjadi pembeda pada waktu hanyalah cakupan wilayahnya, dimana Konferensi Asia-Afrika sendiri merupakan konferensi tingkat regional Asia-Afrika. Sedangkan Gerakan Non Blok sendiri memiliki sifat yang lebih luas yang tak hanya mencakup wilayah Asia atau Afrika saja. Dimana dalam hal ini, terdapat beberapa persamaan yang mengarahkan bahwa Gerakan Non Blok sendiri

merupakan kelanjutan dari Konferensi Asia-Afrika yang pernah dilaksanakan di tahun 1955.

Dalam hal ini hal itu bisa dilihat dari apa yang menjadi isi dari Dasasila Bandung yang merupakan hasil dari Konferensi Asia-Afrika dengan apa yang menjadi keputusan dari Konferensi Gerakan Non Blok itu sendiri. Maka dari pada itu adapun yang menjadi isi dari Dasasila Bandung adalah:

1. Menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta asas-asas yang termuat dalam piagam PBB.
2. Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa-bangsa.
3. Mengakui persamaan semua suku-suku bangsa dan persamaan semua bangsa-bangsa besar maupun kecil.
4. Tidak melakukan intervensi atau campur tangan dalam soal dalam negeri negara lain.
5. Menghormati hak tiap-tiap negara bangsa untuk mempertahankan diri sendiri secara sendirian atau kolektif, yang sesuai dengan piagam PBB.
6. a. Tidak mempergunakan peraturan-peraturan dari pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus dari salah satu dari negara-negara besar.
b. Tidak melakukan tekanan terhadap negara lain.
7. Tidak melakukan tindakan-tindakan atau ancaman agresi ataupun penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik suatu negara.
8. Menyelesaikan segala perselisihan-perselisihan internasional dengan jalan damai, seperti perundingan, persetujuan, arbitrase atau penyelesaian hakim atau pun lain-lain cara damai lagi menurut pilihan pihak-pihak yang bersangkutan, yang sesuai dengan piagam PBB.
9. Memajukan kepentingan bersama dan kerja sama.
10. Menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional.²⁴⁴

Sedangkan adapun isi dari keputusan konferensi Gerakan Non

Blok itu sendiri adalah:

²⁴⁴ Roeslam Abdulgani, *THE BANDUNG CONNECTION, Konferensi Asia-Afrika di Bandung 1955* (Cet. II; Penerbit Gunung Agung, 2011) . Hlm 277.

1. Aksi bersama untuk membebaskan negara-negara yang masih terjajah; penghapusan kolonialisme, neo-kolonialisme, dan imperialism.
2. Menghormati hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri dan mengutuk penggunaan kekerasan terhadap pelaksanaan hak itu.
3. Diskriminasi *Apartheid*.
4. Hidup berdampingan secara damai dan kodifikasi prinsip-prinsip oleh PBB.
5. Menghormati kedaulatan negara-negara dan keutuhan wilayah mereka; masalah bangsa-bangsa yang terpecah-pecah.
6. Penyelesaian persengketaan-persengketaan tanpa ancaman atau penggunaan kekerasan sesuai dengan prinsip-prinsip piagam PBB.
7. Peluncuran senjata secara umum dan total; penggunaan tenaga atom untuk tujuan damai, larangan segala percobaan senjata nuklir, penentuan daerah berbasis nuklir, pencegahan penyebaran senjata nuklir dan penghapusan semua senjata nuklir.
8. Pakta-pakta militer, pasukan-pasukan dan pangkalan-pangkalan asing.
9. PBB, peranannya di dalam soal-soal internasional, pelaksanaan resolusi-resolusinya dan perubahan piagamnya.
10. Perkembangan dan kerja sama ekonomi.
11. Kerja sama kebudayaan, ilmiah dan pendidikan serta konsolidasi organisasi-organisasi internasional dan regional yang bekerja untuk tujuan itu.²⁴⁵

Jika dilihat apa yang terdapat dalam isi Dasasila Bandung dengan apa yang menjadi keputusan dari konferensi Gerakan Non Blok itu sendiri, dapat diketahui bahwa Gerakan Non Blok yang dilaksanakan untuk pertama kalinya di Boegard pada tanggal 1-6 September 1961.²⁴⁶ Merupakan sebuah usaha yang dilakukan oleh beberapa negara yang ada di dunia untuk tetap menjaga perdamaian dunia dengan mengedepankan usaha penyelesaian masalah dengan jalan damai. Serta sebuah usaha untuk mencapai tujuan nasional dari tiap-tiap negara yang terlibat di dalamnya dengan melakukan kerja sama satu sama lainnya. Selain dari pada itu, juga

²⁴⁵ Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Op.Cit.*, Hlm 457.

²⁴⁶ *Ibid.* Hlm 451.

sebagai usaha untuk menentang tindakan kolonialisme, neo-kolonialisme dan imperialisme yang masih terjadi.

Gerakan Non Blok ini memanglah merupakan sebuah gerakan yang terbangun dari berbagai negara yang tidak memihak kepada salah satu blok yang ada pada waktu itu. Akan tetapi dibalik ketidakberpihakan negara-negara tersebut terdapat salah satu keuntungan yang didapat. Yakni tidak adanya batasan untuk melakukan hubungan diplomatik dengan negara manapun baik itu negara-negara yang menjadi anggota dari Blok Timur maupun Barat. Dimana tidak adanya batasan sebuah negara dalam melakukan hubungan diplomatik dengan negara manapun maka tak ada batasan pula negara tersebut untuk meminta bantuan dalam mewujudkan apa yang menjadi tujuan nasionalnya.

Jika membahas mengenai hal tersebut, negara Indonesia telah menjalankannya semenjak di awal berdirinya. Dimana ketidakberpihakan terhadap salah satu dari dua blok besar yang ada pada waktu itu, telah menjadi sebuah konsep politik luar negeri yang di jalankan. Sedangkan yang menjadi landasannya adalah apa yang termaktub dalam UUD 1945 yang merupakan sebuah landasan operasional negara Indonesia.

Maka dari pada itu, tidaklah salah jika pemerintah Indonesia pada waktu itu melibatkan diri serta menjadi pelopor dalam perkumpulan negara-negara tersebut. Dalam hal ini terkait dengan keterlibatan Indonesia dalam konferensi tersebut, tidak lain juga merupakan sebuah usaha dari pemerintah Indonesia sendiri dalam dunia internasional untuk

menentang tindakan kolonialisme, neo-kolonialisme dan imperialism yang masih terjadi. Dimana terbentuknya Gerakan Non Blok merupakan sebuah jalan yang betul-betul digunakan pemerintah Indonesia untuk mewujudkan hal tersebut.

Dalam hal ini, Gerakan Non Blok sendiri merupakan gerakan yang diperakarsai oleh lima orang tokoh dari lima negara yang berbeda. Dimana diantara kelima orang tokoh tersebut merupakan perwakilan dari Indonesia. Adapun kelima tokoh tersebut yang menjadi pendiri dari Gerakan Non Blok itu sendiri adalah:

1. Presiden Soekarno, Indonesia.
2. Presiden Gamal Abdul Naser, Mesir.
3. Presiden Josep Broz Tito, Yugoslavia.
4. PM Pandit Jawaharlal Nehru, India.
5. Presiden Kwame Nkrumah, Ghana.²⁴⁷

Terkait dengan hal itu, dimana dalam konferensi Gerakan Non Blok yang pertama yang diadakan di Boegard telah di ikuti oleh 25 negara dan 3 negara peninjau, yaitu Afganistan, Aljazair, Burma, Ceylon, Cyprus, Ethiopia, Ghana, Guinea, India, Indonesia, Irak, Kamboja, Kongo, Kuba, Libanon, Mali, Maroko, Nepal, Saudi Arabia, Somalia, Sudan, Tunisia, RPA, Yaman dan Yugoslavia. Sedangkan yang menjadi negara peninjau adalah Bolivia, Brazilia dan Equador.

²⁴⁷ http://id.wikipedia.org/wiki/Gerakan_Non-Blok. (diakses pada tanggal 10 April 2016 pukul 09.16 Wita).

Jika dilihat dari negara-negara yang mengikuti KTT GNB yang pertama, dapat diketahui bahwa apa yang menjadi semangat dari adanya Konferensi Asia-Afrika yang ada di Bandung. Bukanlah lagi sebuah semangat yang bersifat kawasan saja, melainkan telah menjadi sebuah semangat yang lebih luas karena telah melibatkan banyak negara dari berbagai kawasan yang ada di dunia. Dengan lebih mendunianya semangat KAA tersebut, telah memberikan jalan kepada pemerintah Indonesia khususnya untuk tetap melakukan perlawanan terhadap segala bentuk dari Kolonialisme, Neo-kolonialisme dan Imperialisme.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Lahirnya perang dingin antara dua kekuatan besar yang keluar sebagai pemenang perang dunia dua memberikan dampak yang besar terhadap dunia internasional pada waktu itu. Dimana ketegangan yang terjadi terhadap kedua negara tersebut juga telah menyeret beberapa negara lain. Sehingga ketegangan yang terjadi telah berubah menjadi ketegangan antar sekutu dengan penggabungan diri pada salah satu blok dari keduanya. Selain dari pada itu, kehadiran kedua blok tersebut kemudian diikuti dengan pembentukan pakta pertahanan kolektif dimasing masing bloknnya. Hal inilah yang kemudian membuat sebagian negara-negara harus memilih untuk bergabung dalam blok yang mana. Terlepas dari pada itu sesuai dengan amanat yang tertuang dalam batang tubuh UUD 1945, maka pemerintah Indonesia pada waktu telah menyatakan sikap bahwa tidak akan menggabungkan diri kepada salah satu blok tersebut. akan tetapi tetap aktif dalam menjalin hubungan kepada negara manapun yang ada.
2. Setelah dibacakannya teks proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Tidak serta merta membebaskan bangsa Indonesia dari cengkraman penjajahan, hal ini dirasakan ketika kedatangan kembali tentara belanda yang mencoba kembali menjajah Indonesia. Akan tetapi hal tersebut tidak semudah seperti yang pernah mereka lakukan dahulu. Dimana pada kedatangan kedua tersebut

permasalahan kedua negara tersebut sedikit banyaknya mesti diselesaikan dalam meja perundingan hingga akhirnya pengakuan kedaulatan yang diinginkan pemerintah Indonesia dapat terwujud. Terlepas pada hal tersebut dimana pada masa itu pemerintah Indonesia mencoba menjalin hubungan dengan negara manapun tanpa memandang kedudukan negara tersebut dalam dunia internasional apa berada pada Blok Barat atau Blok Timur. Hal tersebut dilakukan oleh pemerintah Indonesia tidak terlepas dari apa yang menjadi amanat dari UUD 1945 serta kondisi dalam negeri Indonesia sendiri.

3. Berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan politik luar negeri yang dijalankan pemerintah Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soekarno serta bagaimana keadaan politik dalam negeri pada waktu itu, sedikit banyaknya telah memberikan dampak terhadap Indonesia. Dalam hal ini terkait dengan kedekatannya dengan negara-negara yang tergabung dalam Blok Barat terkhusus dengan pemerintah Amerika Serikat, yang dimana telah mempermudah jalan pemerintah Indonesia untuk memasukkan wilayah Irian Barat dalam NKRI. Selain dari pada itu juga pemerintah Amerika Serikat juga pernah memberikan bantuan kepada pemerintah Indonesia. Terlepas dari kedekatan yang pernah terjalin antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Amerika Serikat, pemerintah Indonesia juga pernah mendekati diri dengan negara yang tergabung dalam Blok Timur. Dalam hal ini terkhusus dengan kedekatannya dengan pemerintah Uni Soviet, yang dimana pada

waktu itu pemerintah Indonesia sedikit banyaknya juga telah menerima bantuan bantuan dari pemerintah Uni Soviet.

B. Implikasi

Membahas mengenai gaya politik yang dilakukan oleh Presiden Soekarno, dalam hal ini terkhusus mengenai politik luar negeri yang dilakukannya telah memberikan implikasi terhadap Negara Indonesia itu sendiri. Adanya implikasi dari politik luar negeri yang dijalankan oleh Presiden Soekarno pada waktu itu dapat diketahui dengan melihat bagaimana Presiden Soekarno melakukan hubungan diplomatik dengan berbagai negara pada waktu itu. Walaupun pada waktu itu dunia internasional berada dalam kondisi perang dingin antara Blok Barat dan Blok Timur.

Selain dari pada itu, keadaan politik dalam negeri pada waktu itu juga bisa menjadi acuan kita melihat sejauh mana implikasi dari gaya politik luar negeri yang dijalankan oleh Presiden Soekarno pada waktu itu.

C. Saran

1. Masukan dan kritikan sangat dibutuhkan oleh penulis demi kesempurnaan dari pada skripsi ini yang berjudul “Politik Luar Negeri Indonesia Pada Masa Pemerintahan Soekarno (1949-1966)”. Dimana dalam skripsi ini bagaimana sikap politik luar negeri yang bebas dan

aktif dijalankan oleh pemerintah Indonesia pada waktu itu terhitung dari tahun 1949 yang dimana pada tahun tersebut Indonesia telah mendapatkan kedaulatannya sebagai sebuah negara. Sedangkan batasan akhir ditahun 1966, merupakan masa menurunnya pengaruh soekarno dalam pemerintahan.

2. Penulis dalam hal ini mempunyai harapan yang besar akan kemanfaatan dari skripsi ini, dalam hal ini terhadap pembaca yang memiliki ketertarikan terhadap sejarah politik yang ada di Indonesia secara umum dan politik luar negeri secara khusus.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip Perjanjian

- Protokol Dagang antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok Tahun 1954, Pasal I.
- Persetujuan Pembayaran antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok, Pasal VI.
- Surat pembayaran dan Perotokol dagang antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok Tahun 1954.
- Surat Perdjanjian Hubungan Keramahan dan Perniagaan antara Djepang dan Republik Indonesia, Tahun 1961.
- Surat Perdjanjian Persahabatan dan Kerdjasama antara Republik Indonesia dan Republik Rakjat Hongaria, Tahun 1961.
- Surat Perjanjian Dagang dan Pernyataan Bersama Antara Republik Indonesia dan Republik Iraq, Tahun 1960.
- Surat perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok mengenai soal dwikewrganegaraan Tahun 1955.
- Surat perjanjian persahabatan antara Irak dan Indonesia, Tahun 1956
- Surat perjanjian persahabatan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Iran, Tahun 1958.
- Surat perjanjian persahabatan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Iran, Tahun 1961.
- Surat perjanjian persahabatan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Kambodja, Tahun 1959.
- Surat perjanjian persahabatan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Thailand, Tahun 1954.
- Surat perjanjian persahabatan antara Republik Indonesia dan Pakistan, Tahun 1951.
- Surat perjanjian persahabatan antara dan kerja sama antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Tjekoslovakia, Tahun 1961.
- Surat perjanjian persahabatan antara dan kerja sama antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Tjekoslo Tahun 1961, Pasal 6.
- Surat Permufakatan-permufakatan P^{CXXXI}_{JUROR} Mengenai Hubungan Dagang dan Ekonomi Jang Disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Singapore, Tahun 1961.
- Surat Pernjataan Bersama dan Persetudjuan Kerdja Sama Antara Republic Indonesia dan Republic Cuba, Tahun 1960.
- Surat Pernjataan Bersama Indonesia-Guinea Pada Peristiwa Kundjungan P.J.M Presiden Republik Indonesia, DR. Sukarno, ke Republik Guinea, Tahun 1960.
- Surat Pernjataan Bersama Indonesia – Hongaria pada Peristiwa Kundjungan Presiden Republik Indonesia Dr. Soekarno ke Republik Rakjat Hongaria, Tahun 1960.
- Surat Pernyataan Bersama Indonesia-Bulgaria Tentang Kunjungan Presiden Republik Indonesia, Dr. Soekarno ke Republik Rakyat Bulgaria dari Tanggal 8 April Sampai 11 April, Tahun 1960.

- Surat persetujuan kebudayaan antara Republik Indonesia dan Filipina, Tahun 1959.
- Surat persetujuan kebudayaan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Mesir, Tahun 1955.
- Surat persetujuan kebudayaan dan pengajaran antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah India, Tahun 1955
- Surat persetujuan kerja sama ilmiah, pendidikan dan kebudayaan antara Republik Indonesia dan Republik Cekoslowakia, Tahun 1958.
- Surat persetujuan perdagangan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok., Tahun 1953
- Surat persetujuan perdagangan antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Rakyat Tiongkok, Tahun 1956.
- Surat persetujuan tentang penyerahan piutang-piutang terhadap orang Belanda oleh Republik Indonesia kepada Kerajaan Belanda, Tahun 1954.
- Trade Agreement Between The Republic of Indonesia and Pakistan* (surat perjanjian perdagangan antara Republik Indonesia dan Pakistan), Tahun 1953.
- Trade agreement between the Republic of Indonesia and the People's Republic of Bulgaria* (perjanjian perdagangan antara Republik Indonesia dan Republik Bulgaria), Tahun 1959.
- Trade Agreement Between The Republic of Indonesia and Republic of Turkey*, Tahun 1959.
- Trade Agreement Between The Republic of Indonesia and The Commonwealth of Australia*, Tahun 1959.
- Trade Agreement Between The Republic of Indonesia and The Polish People's Republic* (surat perjanjian perdagangan antara Republik Indonesia dan Republik Polandia), Tahun 1955.
- Trade Agreement Between The Republic of Indonesia and The Republic of India* (surat perjanjian perdagangan antara Republik Indonesia dan India), Tahun 1953.

Buku

- Abdulgani, Roeslam. 2011. *THE BANDUNG CONNECTION, Konperensi Asia-Afrika di Bandung 1955*. Penerbit Gunung Agung.
- Algadri, Hamid. 1991. *Suka-Duka Masa Revolusi*. Jakarta: UI-Press.
- Adrian, Beny. 2014. *52 Tahun Infiltrasi PGT di Irian Barat*. Jakarta: PT Gramedia.
- Daliman, A. 2012. *Metode Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Dekker, Nyoman. 1989. *Sejarah Revolusi Nasional*. Jakarta: Balai Pustaka.
- F, Efantino dan Arifin SN. 2009. *Ganyang Malaysia*. Yogyakarta: Bio Pustaka.
- Gonggong, Anhar, dkk, Tim Revisi. 1993. *SEJARAH NASIONAL INDONESIA VI, Republik Indonesia: dari Proklamasi sampai Demokrasi Terpimpin*. Jakarta: CV. Tumaritis.
- Loebis, A. B. 1992. *Kilas Balik Revolusi: Kenangan, Pelaku dan Saksi*. Jakarta
- Hatta, Mohammad. 1992. *Demokrasi Kita, Bebas Aktif, Ekonomi Masa Depan*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

- Hamid, Abd. Rahman dan Saleh Madjid. 2011. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Hasan, M. Zein. 1980. *Diplomasi Indonesia di Luar Negeri*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Librayanto, Romi. 2010. *Ilmu Negara Suatu Pengantar*. Makasar: Puataka Refleksi.
- Muljana, Slamet. 2008. *Kesadaran Nasional*. Yogyakarta: LKis Yogyakarta.
- Nasution, A.H. 1978. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 6*. Bandung.
- Pamungkas, Danto. 2014. *Kamus Sejarah Lengkap*. Yogyakarta: Mata Padi Pressindo.
- Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto. 1992. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ricklefs, M. C . 2005. *Sejarah Indonesia Modern 1200- 2004*. Jakarta: PT. Ikrar Mandiriabadi.
- Sabir, M. 1987. *Politik Bebas Aktif, Tantangan dan Kesempatan*. Jakarta: Haji Masugung.
- Siswo, Iwan. 2014. *Panca Azimat Revolusi*. Jakarta: PT Gramedia.
- Sudirman, Adi. 2014. *Sejarah Lengkap Indonesia*. Jogjakarta: DIVA Press.
- Sjamsudin, Helius. 2007. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Sukarno. 2013. *Membangun Dunia Baru*. Bantul: Kreasi Wacana.
- Sunarti, Linda. 2014. *Persaudaraan Sepanjang Hayat*. Serpong Utara: Serat Alam Media.
- Susilo, Taufik Adi. 2008. *Soekarno Biografi Singkat 1901-1970*. Jogjakarta: GARASI.
- Soyomukti, Nurani. 2012. *Soekarno & Cina*. Jogjakarta: Garasi.
- Toer, Pramoedya Ananta, Koesalah Soebagyo Toer dan Ediaty Kamil. 2014. *Kronik Revolusi Indonesia*. Jakarta: KPG.

Skripsi

- Hasnia. 1995. *Pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin*. Skripsi tidak diterbitkan. Ujung Pandang: FPIPS IKIP.
- L, Muliadi. 2003. *Peranan Republik Rakyat Cina Pada Masa Demokrasi Terpimpin Dalam Politik Indonesia (1959-1965)*. Skripsi tidak diterbitkan. Makassar: FEIS UNM.
- Saprida. 2005. *Politik Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Indonesia (1945-1966)*. Skripsi tidak diterbitkan. Makassar: FEIS UNM.

Internet

- <http://www.anneahira.com/sejarah-nato.htm> (diakses tanggal 5 Mei 2015 pukul 02.47 Wita).
- <http://www.ceritamu.com/cerita/Mutual-Security-ACT-Kontrak-Indonesia-AS-di-masa-Sukarno-50an> (diakses 20 April 2015 pukul 01.35 wita).
- http://id.wikipedia.org/wiki/Pakta_Molotov%E2%80%93Ribbentrop (akses, 25 Januari 2015 pukul 01.15 wita).
- http://id.wikipedia.org/wiki/Operasi_Trikora (diakses pada tanggal 11, Februari 2015 pukul 02.10 wita).

http://id.wikipedia.org/wiki/Perang_Dingin#Permulaan_Perang_Dingin_.281947.E2.80.931953.29 (diakses pada tanggal 20, Oktober 2014 pukul 03.45 wita).

https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia_dan_Perserikatan_Bangsa-Bangsa (diakses tanggal 15 April 2015 pukul 01.00 Wita).

https://id.wikipedia.org/wiki/Perang_Dingin (diakses tanggal 5 Mei 2015 pukul 02.15 Wita).

https://id.wikipedia.org/wiki/Gerakan_Non-Blok. (akses 10 April 2016 pukul 01.28 Wita).

https://id.wikipedia.org/wiki/Perang_Dunia_II. (akses 10 April 2016 pukul 01.30 Wita).

https://id.wikipedia.org/wiki/Operasi_Barbarossa. (akses 10 April 2016 pukul 01.35 Wita).